

**PENGARUH INFRASTRUKTUR SOSIAL-EKONOMI,
PENANAMAN MODAL ASING (PMA), DAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
(Studi Kasus Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.)

Oleh:

DEDE ISFATKHUROHMAH

NIM. 2017201201

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Isfatkhurohmah
NIM : 2017201201
Jenjang : S 1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Infrastruktur Sosial-Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kasus Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 1 Oktober 2024

Saya yang Menyatakan,



Dede Isfatkhurohmah

NIM. 2017201201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH INFRASTRUKTUR SOSIAL-EKONOMI, PENANAMAN
MODAL ASING (PMA), DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
(PMDN) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (STUDI
KASUS PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO)**

Yang disusun oleh Saudara **Dede Isfatkhurohmah NIM 2017201201** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 18 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Parno, S.E., M.S.I.

NIP. 19771128 201101 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Safrina Muarifah, S.E., M.Si.

NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji

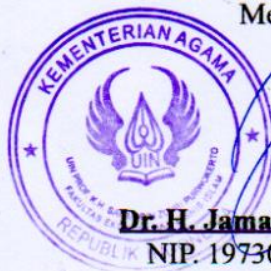
Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.

NIDN. 2010028901

Purwokerto, 18 Oktober 2024

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Dede Isfatkhurohmah NIM 2017201201 yang berjudul:

Pengaruh Infrastruktur Sosial-Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kasus Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 1 Oktober 2024

Pembimbing,



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(QS. Ar-Ra’d ayat 11)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kamu ceritakan.”

(Boy Chandra)

“Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?”

(QS. Ar-Rahman ayat 53)



**PENGARUH INFRASTRUKTUR SOSIAL-EKONOMI,
PENANAMAN MODAL ASING (PMA), DAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
(Studi Kasus Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo)**

Dede Isfatkhurohmah
NIM. 2017201201

E-mail : dederohmah617@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Data Kementerian Keuangan memaparkan bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2015 s.d. 2023, hampir seluruh pencapaian pertumbuhan ekonomi selalu gagal mencapai target yang telah ditetapkan oleh APBN. Hanya pada tahun 2022, target 5,2% terealisasi sebesar 5,31%. Padahal, Presiden Joko Widodo berjanji akan mendongkrak perekonomian Indonesia sebesar 7% dan realisasinya rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,13% saja. Selama pemerintahan, Presiden Joko Widodo memfokuskan pemerintahan pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan tentunya membutuhkan sumber dana yang sangat besar berupa investasi untuk menunjang pembangunan ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif berdasarkan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari BPS baik secara publikasi online maupun buku tahunan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dari 34 provinsi di Indonesia pada periode 2015 s.d. 2023. Model regresi data panel terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menggunakan bantuan aplikasi *Eviews 12*. Penelitian ini tidak dilakukan pada provinsi baru yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan karena adanya keterbatasan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur telekomunikasi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, secara simultan semua variabel independen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Implikasi penelitian ini adalah dihasilkan temuan baru mengenai pengaruh infrastruktur sosial-ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebagai bahan pertimbangan pemerintah berikutnya dalam menentukan kebijakan. Penelitian berikutnya diharapkan mampu meneliti dengan meninjau bahwa sumber daya manusia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Kesehatan, Infrastruktur Telekomunikasi, dan Penanaman Modal

**EFFECT OF SOCIAL-ECONOMIC INFRASTRUCTURE,
FOREIGN INVESTMENT (PMA), AND DOMESTIC INVESTMENT
(PMDN) ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA
(Case Study During the Joko Widodo Government)**

Dede Isfatkhurohmah

NIM. 2017201201

E-mail: dederohmah617@gmail.com

Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Data from the Ministry of Finance explains that during Joko Widodo's government for the period 2015 to. In 2023, almost all economic growth achievements will always fail to reach the targets set by the APBN. Only in 2022, the target of 5.2% will be realized by 5.31%. In fact, President Joko Widodo promised to boost the Indonesian economy by 7% and in reality the average economic growth only reached 4.13%. During his administration, President Joko Widodo focused his government on infrastructure development. Intensive infrastructure development certainly requires enormous financial resources in the form of investment to support economic development.

The research method used is quantitative research based on secondary data. Secondary data was obtained from BPS both online publications and yearbooks. The data analysis technique used in this research is panel data regression analysis from 34 provinces in Indonesia in the period 2015 to 2023. The best panel data regression model is the Fixed Effect Model (FEM) using the Eviews 12 application. This research was not conducted in the new provinces, namely Southwest Papua, South Papua, Central Papua and Mountain Papua due to data limitations.

The results of this research show that road infrastructure, foreign investment and domestic investment partially have a positive effect on economic growth in Indonesia. Meanwhile, health infrastructure and telecommunications infrastructure do not partially have a positive effect on economic growth in Indonesia. Meanwhile, simultaneously all independent variables have a positive effect on economic growth in Indonesia. The implication of this research is that new findings are produced regarding the influence of socio-economic infrastructure on economic growth and as material for consideration by the next government in determining policy. It is hoped that future research will be able to examine by reviewing that human resources play an important role in economic growth.

Keywords : *Economic Growth, Road Infrastructure, Health Infrastructure, Telecommunication Infrastructure, and Capital Investment*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em

ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. *Ta' marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة لغير	ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā

	تتس	ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لعن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القياس	ditulis	al-qiyas
القرآن	ditulis	al-qur'añ

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	ditulis	zawī al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillahirobbil'alamin*, dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah Swt berikan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Iskandar (alm), cinta pertama dan panutanku yang tidak sempat menemani dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. dan Mama Sutariyah, pintu surgaku dan sosok ibu terhebat di dunia yang kasih sayangnya tiada tara. Skripsi ini, aku persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang telah mereka berikan. Teruntuk bapak, semoga bapak bangga melihat putri kecilnya telah tumbuh dewasa dan berhasil meraih gelar sarjana. Semoga Allah Swt melapangkan kubur dan menempatkan bapak di tempat yang paling mulia disisi Allah Swt. Teruntuk mama, semoga Allah Swt selalu memberkahi mama dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan rezeki, dan umur panjang.
2. Yuyu dan kakang tersayang Dewi Ismawati, Deddy Iswanto, Muslikhah, dan saudara iparku Arifudin Nurharyanto, Ngadawiyah, Herwanto, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi hingga aku bisa ke tahap ini.
3. Keponakan yang lilik sayang, Rifky Aryanto, Zahra Alya Nabila, Najwa Wiydy Assyifa, Azzam Zain Heriyanto, Reyhan Uwais Al-Fath, Hana Naura Herliana dan Rayyan Labib Al-Farizqi, yang selalu memberikan keceriaan.
4. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Dede Isfatkhurohmah. Terimakasih telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Orang lain tidak akan pernah mengerti dan paham seberapa kuat dirimu bertahan, meredam isi kepala, menjadikan semuanya terlihat baik-baik saja. Jadi, jangan lupa genggam erat dirimu sendiri, jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Kuatkan pundakmu, kokohkan tekadmu karena pada akhirnya adalah diri sendiri yang paling paham semuanya. Nikmati prosesnya dan mari berbahagia walaupun dengan cara sederhana dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihnya dirimu, kamu hebat, mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas limpahan rahmat, ridho, serta karunia dari Allah Swt, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam bertindak dan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada kekasih langit dan bumi Nabi Agung Muhammad saw, yang telah mendidik manusia dari zaman yang diselimuti oleh kebodohan dan ketakutan menuju zaman yang penuh ketenangan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya do'a, dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Sochimim, Lc., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan, motivasi, dan

semangat serta kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, rezeki yang dilancarkan, urusan yang dimudahkan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, serta semoga menjadi amal jariah bapak.

9. Segenap Dosen dan Staff karyawan Fakultas Ekoonmi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Nyai Hj. Dra. Nadhiroh Noeris, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto beserta seluruh ustadz-ustadzah yang telah memberikan do'a, ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
11. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Iskandar (alm) dan pintu surgaku Mama Sutariyah. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, tetapi mereka berhasil memberikan pendidikan untuk anaknya di jenjang sarjana. Mereka memberikan yang terbaik, tidak pernah lelah mendoakan, dan selalu mendukung putri kecilnya menyelesaikan studi sampai berhasil meraih gelar sarjana.
12. Saudara kandungku tersayang Dewi Ismawati, Deddy Iswanto, Muslikhah, dan saudara iparku Arifudin Nurharyanto, Ngadawiyah, Herwanto. Terimakasih telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi hingga aku bisa ke tahap ini. Semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, perlindungan, keselamatan, dan rejeki yang lancar.
13. Keponakanku tersayang, Rifky Aryanto, Zahra Alya Nabila, Najwa Wiydy Assyifa, Azzam Zain Heriyanto, Reyhan Uwais Al-Fath, Hana Naura Herliana dan Rayyan Labib Al-Farizqi. Terimakasih telah memberi semangat dan menemaniku selama ini dengan tingkah lucu kalian. Semoga kalian bisa menjadi anak hebat yang berbakti dan membanggakan orang tua.
14. Diri sendiri, Dede Isfatkhurohmah. Terimakasih telah berjuang sejauh ini dan terus berusaha kuat menyelesaikan semuanya hingga akhir tanpa menyerah. Di ujung jalan, hanya akan ada diri sendiri yang tidak akan pernah meninggalkan apapun yang terjadi. Terimakasih telah bertahan dan menyakinkan diri sendiri bahwa dirimu pasti bisa.

15. Teman terdekatku, Nida Vidayanti, Fitriyanawati, dan Ismi Budiarti. Terimakasih atas waktu, doa, dukungan, motivasi yang telah kalian berikan selama ini. Aku tidak memiliki begitu banyak teman dekat dalam kehidupanku, jadi aku sangat berterimakasih kepada kalian yang mau meluangkan waktunya hanya untuk sekedar mendengarkan keluh kesahku.
16. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah E angkatan 2020, teman pondok Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto khususnya kamar baru, teman Teenscieone khususnya Teenscieone Purwokerto, dan teman kost Avesina 3. Terimakasih telah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan kebersamaan penulis selama perkuliahan sampai berhasil meraih gelar sarjana.
17. SiiBluee, laptop biru kesayanganku. Terimakasih telah menemani prosesku selama ini. Terimakasih telah menjadi saksi bisu perjalananku menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih telah kebersamaiku, mendengarkan misuhku, tangisku, frustasiku dalam mengerjakan skripsi ini. Maaf jika aku sering mentelantarkanmu dan menyakitimu.
18. Semua pihak serta orang yang kenal dan mengenali penulis. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang banyak.
19. Terakhir, teruntuk jodoh yang masih menjadi rahasia Allah Swt. Entah jodoh atau kematian yang akan menemuiku terlebih dahulu. Percayalah, kamu menjadi salah satu alasanku menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita segera dipertemukan oleh Allah Swt dengan cara indah dan versi terbaik masing-masing. Semoga kamu baik-baik disana dan dimudahkan segala prosesnya.

Purwokerto, 1 Oktober 2024

Penulis,



Dede Isfatkhurohmah

NIM. 2017201201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
DAFTAR DIAGRAM	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Teori	13
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2. Infrastruktur.....	17
3. Penanaman Modal atau Investasi	20
B. Landasan Teologis	21

C. Kajian Pustaka.....	25
D. Hipotesis.....	29
E. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Populasi dan Sampel Penelitian	34
1. Populasi Penelitian	34
2. Sampel Penelitian.....	34
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	35
1. Variabel Penelitian	35
2. Definisi Operasional Variabel.....	35
D. Pengumpulan Data Penelitian	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
1. Pemilihan Model Regresi	39
2. Pengujian Asumsi Klasik	41
3. Pengujian Koefisien Determinasi.....	43
4. Pengujian Hipotesis.....	43
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
B. Deskripsi Pemerintahan Joko Widodo	47
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	55
1. Pertumbuhan Ekonomi	55
2. Infrastruktur Jalan	57
3. Infrastruktur Kesehatan	59
4. Infrastruktur Telekomunikasi.....	62
5. Penanaman Modal Asing	65
6. Penanaman Modal Dalam Negeri	67
D. Analisis Data Penelitian	70
1. Statistik Deskriptif	70
2. Pemilihan Model Regresi	73
3. Uji Asumsi Klasik.....	74

4. Uji Hipotesis	76
5. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	78
E. Hasil dan Interpretasi	79
1. Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	80
2. Pengaruh Infrastruktur Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	81
3. Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	83
4. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	85
5. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	87
6. Pengaruh Simultan Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Kesehatan, Infrastruktur Telekomunikasi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.....	88
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (Persen).....	2
Tabel 1.2 Realisasi Penanaman Modal Periode 2015 s.d. 2023 (Unit).....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian	37
Tabel 4.1 Provinsi-Provinsi di Indonesia	47
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	70
Tabel 4.3 Hasil Uji Model Data Panel	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow.....	73
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman	74
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	75
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	75
Tabel 4.8 Hasil Uji t.....	76
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	78
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	78
Tabel 4.11 Hasil Fixed Effect Model.....	79

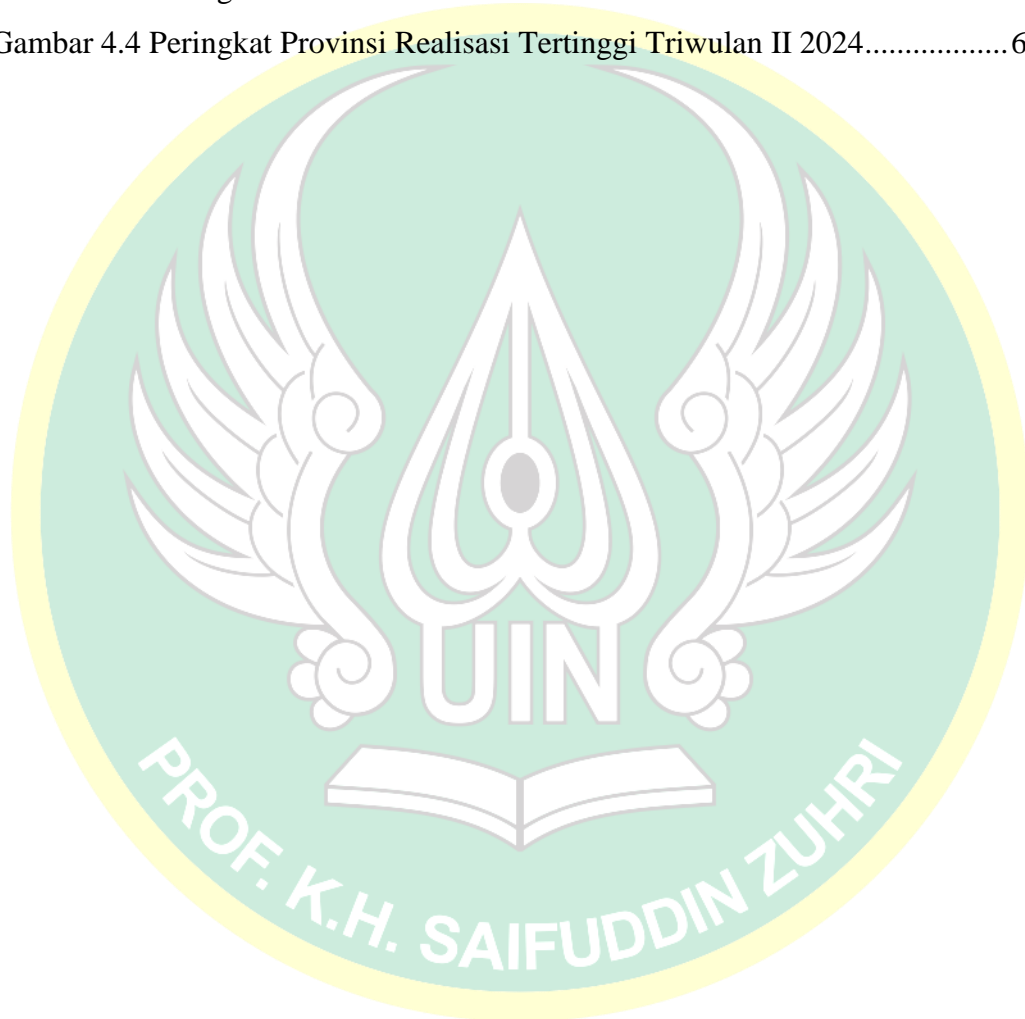


The logo of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri is a circular emblem. It features a central white silhouette of a bird with its wings spread, perched atop an open book. The acronym 'UIN' is prominently displayed in white capital letters across the bird's chest. The entire emblem is set against a light green background and is enclosed within a yellow circular border. The text 'PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white capital letters along the bottom inner edge of the yellow border.

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data	38
Gambar 4.1 Capaian Sasaran Pembangunan Periode 2015 s.d. 2019	50
Gambar 4.2 Capaian Sasaran Pembangunan Periode 2020 s.d. 2023	51
Gambar 4.3 Peringkat Subsektor Realisasi Triwulan I 2024	67
Gambar 4.4 Peringkat Provinsi Realisasi Tertinggi Triwulan II 2024.....	69



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Besaran dan Pertumbuhan Anggaran Infrastruktur	6
Grafik 4.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Miliar Rupiah).....	55
Grafik 4.2 Total Panjang Jalan di Indonesia Periode 2015 s.d. 2023 (Km).....	58
Grafik 4.3 Angka Harapan Hidup (Kedua Jenis Kelamin) Menurut Provinsi (Tahun) di Indonesia Periode 2015 s.d. 2023	60
Grafik 4.4 Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam di Indonesia Periode 2015 s.d. 2023	63
Grafik 4.5 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi (Juta US\$) Periode 2015 s.d. 2023	66
Grafik 4.6 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Miliar Rupiah) Periode 2015 s.d. 2023.....	68



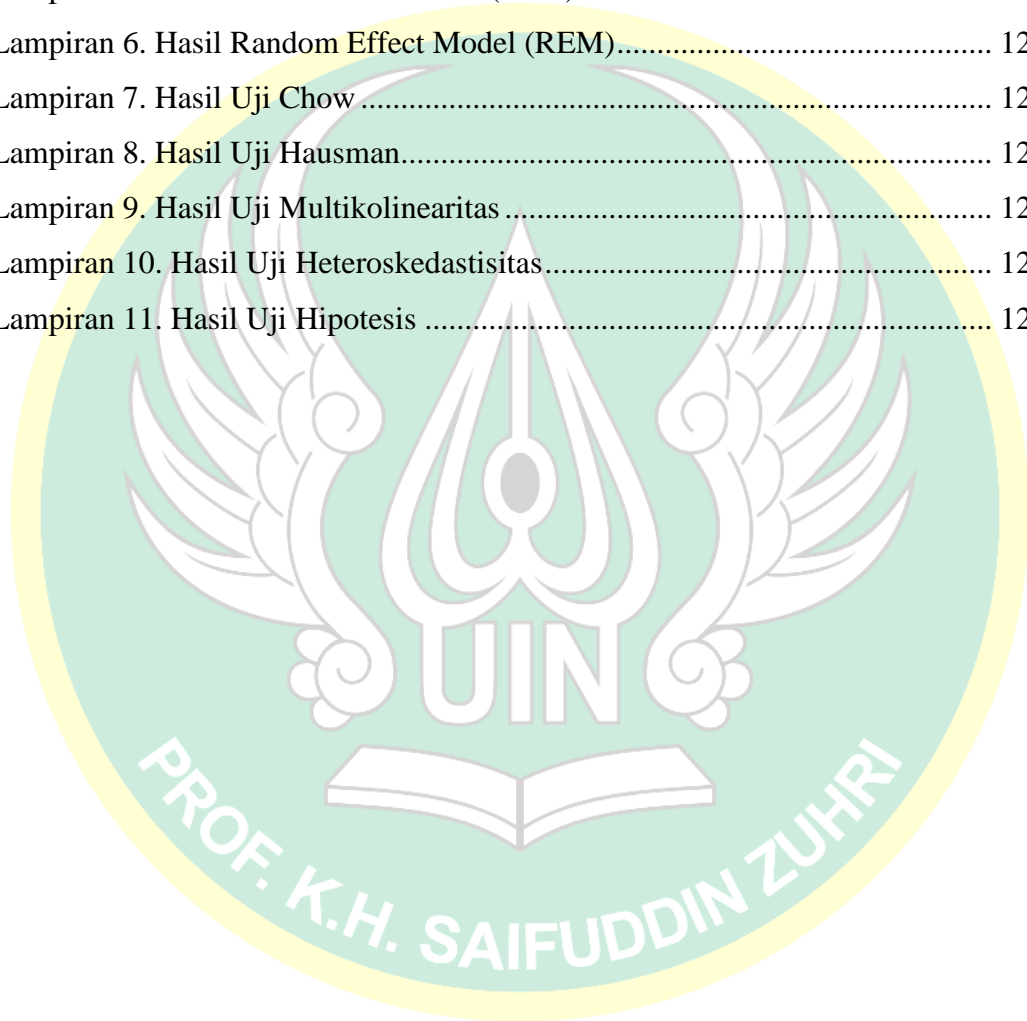
DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB	56
Diagram 4.2 Panjang Jalan Tol Beroperasi (Km)	59
Diagram 4.3 Prevelensi <i>Stunting</i> di Indonesia	61
Diagram 4.4 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (Juta Pengguna).....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian.....	105
Lampiran 2. Tabel t dan F.....	121
Lampiran 3. Statistik Deskriptif.....	123
Lampiran 4. Hasil Common Effect Model (CEM)	124
Lampiran 5. Hasil Fixed Effect Model (FEM)	125
Lampiran 6. Hasil Random Effect Model (REM).....	126
Lampiran 7. Hasil Uji Chow	127
Lampiran 8. Hasil Uji Hausman.....	127
Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinearitas	127
Lampiran 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	128
Lampiran 11. Hasil Uji Hipotesis	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah pulau dan populasi penduduk cukup banyak di dunia. Pada umumnya, negara berkembang memiliki permasalahan ekonomi yang kompleks dan sulit diatasi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, inflasi, bahkan sampai pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata (Rijkiah, 2022). Permasalahan tersebut menjadikan pemerintah harus senantiasa berupaya dalam menjalankan kebijakan yang tepat untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia dapat menjadi negara maju (Sulasih et al., 2023). Proses pembangunan ekonomi melibatkan peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita secara maksimal, yang ditentukan oleh pertumbuhan penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi selalu berkelanjutan dan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh pembangunan ekonomi, yang nantinya akan mendorong proses kemajuan ekonomi (Tari, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting terhadap pengembangan dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai sarana teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk melayani masyarakat dan menunjang struktur jaringan sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial mampu berjalan dengan baik (Angelina & Wahyuni, 2021). Pembangunan infrastruktur merupakan suatu alat penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing demi mendorong lebih banyak kegiatan produksi dan investasi. Namun, infrastruktur juga mampu mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun (Agustin & Hariyani, 2023).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	5,7	5,2	5,2	5,4	5,3	5	5	5,2	5,3
Realisasi	4,88	5,03	5,07	5,17	5,03	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber : (CNBC Indonesia, 2024)

Data Kemenkeu memaparkan bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2015 s.d 2023, hampir seluruh pencapaian pertumbuhan ekonomi selalu gagal mencapai target yang telah ditetapkan oleh APBN. Pada tahun 2015 saat satu tahun penuh pemerintahan Joko Widodo menjabat, pertumbuhan ekonomi masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ditetapkan sebesar 5,7% tetapi realisasinya hanya mencapai angka 4,88%. Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi *covid-19* dapat dimengerti jika target pertumbuhan dan asumsi makro ekonomi tidak terpenuhi. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 5% tetapi realisasinya menyusut dan hanya mencapai -2,07% (CNBC Indonesia, 2024). Pemerintahan Joko Widodo harus merelakan impian mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun. Berdasarkan data statistik BPS, fakta menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2015 s.d. 2023 rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,13% (Mustami, 2023).

Periode pertama pemerintahan Joko Widodo yaitu dengan M. Jusuf Kalla memfokuskan pemerintahan pada pembangunan infrastruktur. Pada masa kampanye pemilu tahun 2014, Presiden Joko Widodo berjanji akan mendongkrak perekonomian Indonesia sebesar 7%. Namun realitanya, realisasi pertumbuhan ekonomi selama masa pemerintahan Joko Widodo hanya mencapai angka 5% saja (Pusparisa, 2019). Pada acara Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Joko Widodo (Kerjo) yang digelar di Istana Negara, 21 Maret 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa selama 5 tahun kedepan pemerintah akan berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai syarat pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas.

Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan antarwilayah dan menstimulasi pembangunan ekonomi tanah air (DPUTR Kabupaten Pati, 2020). Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa proyek pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi sila kelima Pancasila yang menjamin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama.

Masa pemerintahan Joko Widodo selama dua periode diwarnai dengan berbagai peristiwa global yang mengiringi perjalanan ekonomi. Pada masa awal periode kedua, di tahun 2020 Presiden Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin dihadapkan oleh persoalan besar yaitu hadirnya virus *corona* yang memporak-porandakan dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam masa jabatan periode kedua, pemerintahan akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan lebih menerapkan konsep Indonesia-Sentris yaitu pembangunan tidak lagi terfokus hanya pada satu wilayah saja tetapi juga keseluruhan wilayah Indonesia bahkan merata hingga pelosok desa. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pendidikan, menetapkan kebijakan reformasi birokrasi, membuka pintu bagi investor, dan meningkatkan sumber daya manusia dengan menjamin kesehatan para ibu hamil, bayi, dan anak-anak (Yuniar, 2019).

Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015, menjelaskan bahwa infrastruktur sosial-ekonomi antara lain meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, perumahan rakyat, pariwisata, pendidikan, kesehatan, air minum, sarana dan prasarana olahraga, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, infrastruktur kawasan, infrastruktur lembaga permasyarakatan, infrastruktur minyak, gas bumi dan energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, setempat dan persampahan. Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR menyampaikan bahwa infrastruktur memiliki dua peranan penting. Peran pertama, infrastruktur berfungsi sebagai mekanisme produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi seperti jalan, tol, sumber energi, dan bendungan. Peran kedua, infrastruktur berfungsi sebagai penyedia pelayanan dasar seperti perumahan, sanitasi, air untuk minum, dan irigasi. Dampak

pembangunan infrastruktur terutama produktivitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing perekonomian (Hariyanto, 2023).

Hingga tahun 2019, daya saing infrastruktur Indonesia masih belum sekompetitif infrastruktur di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Begitu sengitnya persaingan global dalam perekonomian menjadikan setiap negara harus berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan ekonomi melalui berbagai hal termasuk infrastruktur. Saat ini negara Indonesia masih berada dalam tahap awal menuju merdeka infrastruktur. Merdeka infrastruktur tercapai ketika masyarakat mampu memiliki akses terhadap infrastruktur yang disediakan oleh negara. Pada data *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 yang dirilis oleh *World Economic Forum*, menunjukkan bahwa tingkat daya saing infrastruktur Indonesia menempati posisi level 67,7 dari 100. Pencapaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dari 141 negara yang disurvei dan peringkat 5 di ASEAN (Schwab, 2019). Pada penilaian lain menunjukkan bahwa peringkat daya saing infrastruktur Indonesia turun peringkat menjadi peringkat 40 yang sebelumnya peringkat 32 dalam *IMD World Competitiveness Ranking 2020* (Al-Machmudi, 2020).

Infrastruktur jalan merupakan salah satu jenis infrastruktur yang dinilai sangat penting bagi perekonomian. Apabila kondisi infrastruktur jalan suatu negara buruk, maka akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan yang baik menjadi sebuah elemen penting bagi kelancaran mobilitas arus barang dan jasa (Haryadi et al., 2021). Menurut Yusid Toyib selaku Dirjen Bina Konstruksi PUPR menyampaikan bahwa apabila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah perlu memperhatikan pembangunan dan perbaikan jalur distribusi utama, yaitu jalan. Hal tersebut dikarenakan kualitas jalan merupakan indikator kualitas perekonomian (Kementerian PUPR, 2021). Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Kementerian PUPR khususnya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat bahwa Presiden Joko Widodo telah membangun jalan tol sepanjang 1.848,1 km (CNN Indonesia, 2023).

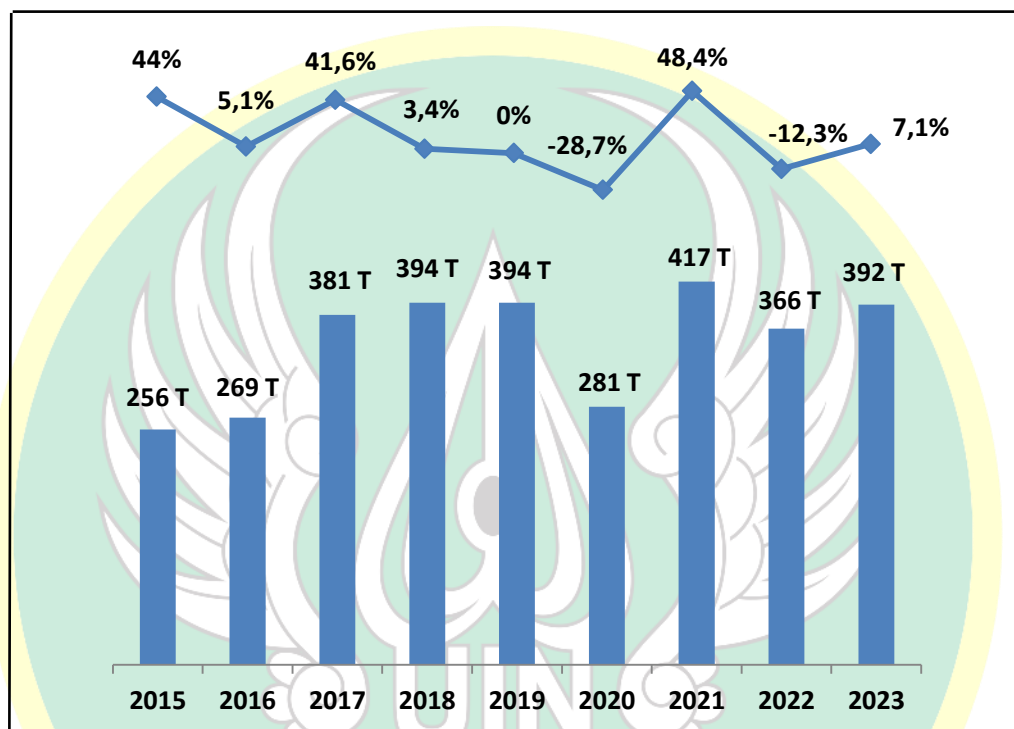
Pemerintah menyadari pentingnya infrastruktur jalan dapat menekan biaya distribusi ke berbagai wilayah. Namun, perlu dipahami juga bahwa pada saat pandemi *covid-19*, kesehatan masyarakat dan para pekerja pembangunan infrastruktur juga tidak dapat diabaikan.

Pandemi *covid-19* yang telah berlangsung lebih dari satu tahun tentu memberikan wawasan dan pembelajaran yang begitu berarti. Pembangunan infrastruktur kesehatan tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur jalan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan yang diberikan. Kesehatan yang baik memegang peranan penting dalam menyediakan pekerja berkualitas untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan kesehatan menjadi fondasi sistem kesehatan masyarakat dan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Pada perekonomian global yang berbasis pengetahuan, kesehatan dipandang sebagai bentuk investasi dan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas pekerja. Pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai di negara dengan tingkat kesehatan yang buruk karena adanya asumsi bahwa seseorang yang sehat akan meningkatkan produktivitas (Aurelya et al., 2022).

Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan bahwa infrastruktur telekomunikasi menjadi infrastruktur penting abad ini, terlebih lagi pada saat pandemi *covid-19*. Pada tahun 2021, internet berkembang pesat menjadi sumber informasi. Menurut Menkominfo, Indonesia memiliki total sembilan infrastruktur telekomunikasi berupa satelit yang memiliki kecepatan minimal 50Mbps (Diskominfo Riau, 2021). Selain itu, media juga telah mengalami revolusi akibat kemajuan telekomunikasi, dimana teknologi media memainkan peran penting dalam penyebaran informasi. Teknologi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membuat hidup masyarakat menjadi lebih nyaman (Juwita dalam Aprianto, 2021). Sayangnya, kehadiran infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih dikatakan belum merata. Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa memberikan perhatian khusus dalam menentukan kebijakan yang tepat bagi infrastruktur telekomunikasi.

Infrastruktur telekomunikasi yang baik menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hartarto, 2023). Widodo Muktiyo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, menyampaikan bahwa baru-baru ini lebih dari separuh desa di Nusantara, atau 85% dari total desa, memiliki akses infrastruktur internet (Amenan, 2022).

Grafik 1.1 Besaran dan Pertumbuhan Anggaran Infrastruktur



Sumber : (Kemenkeu RI, 2022)

Pada grafik 1.1, dapat dilihat selama periode 2015 s.d. 2023 anggaran infrastruktur mencapai Rp 3.167,4 triliun. Hal ini menyebabkan produktivitas dan daya saing meningkat dari sisi peringkat *Logistic Performance Index* (LPI). Posisi peringkat LPI naik 10 tingkat dari 63 menjadi 53 (Rachman, 2024). Anggaran infrastruktur mengalami peningkatan yang signifikan saat pemerintahan Joko Widodo. Peningkatan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dalam membangkitkan perekonomian pascapandemi *covid-19*. Pada grafik 1.1, anggaran infrastruktur Indonesia selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 dan 2022. Besaran anggaran infrastruktur paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dengan persentase sebesar

48,4%. Apabila belanja modal pemerintah semakin besar maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk investasi. Hal ini, pemerintah diharapkan mampu melakukan pembangunan infrastruktur secara konsisten dan merata sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mankiw (2003) pada penelitian Raharja & Lestari (2022), mendefinisikan investasi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal untuk meningkatkan produksi sebagaimana telah ditegaskan dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2007 (Mahriza & Amar, 2019). Proses pembangunan ekonomi tentu memerlukan sumber daya cukup besar, tetapi nyatanya Indonesia memiliki persediaan sumber daya yang masih terbilang sangat terbatas. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya harus ditutupi dengan suntikan modal dan pendanaan dari negara lain (Nehemia & Prasetya, 2023). Tinggi rendahnya pertumbuhan yang dicapai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi dalam bentuk penanaman modal langsung akan berdampak pada peningkatan nilai produksi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru (Aisyah et al., 2022).

Menurut Pramudita (2019), stok modal menjadi sebuah pondasi penting dalam suatu negara untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal yang diberikan langsung dari pihak asing maupun dalam negeri menjadi solusi dalam menjamin ketersediaan sumber daya modal untuk melakukan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penanaman modal asing di Indonesia adalah *joint venture* yang tergolong dalam bentuk usaha tetap. *Joint venture* merupakan perusahaan yang dimiliki oleh dua negara atau lebih. Penanaman modal asing ini bukan termasuk investasi yang dilakukan di bursa saham. Menurut data BKPM, sumber investasi asing terbesar di Indonesia dalam 3 tahun terakhir adalah Singapura sebesar US\$ 10,54 miliar pada tahun 2022 dan US\$ 15,4 miliar pada tahun 2023 (Annur, 2024a). Menurut Wahyuni (2010), sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang

seringkali melalui penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri (Yuliani et al., 2023).

Tabel 1.2 Realisasi Penanaman Modal Tahun 2015 s.d. 2023 (Unit)

Tahun	PMA	PMDN	Total Proyek
2015	17.738	5.100	22.838
2016	25.321	7.511	32.832
2017	26.257	8.838	35.095
2018	21.972	10.815	32.787
2019	30.354	30.451	60.805
2020	56.726	96.623	153.349
2021	27.271	106.002	133.273
2022	32.681	124.582	157.263
2023	70.730	264.615	335.345

Sumber : (BPS, 2024f) dan (BPS, 2024e)

Menurut tabel 1.2, pada tahun 2015 s.d. 2023 pertumbuhan investasi atau penanaman modal di Indonesia selalu mengalami peningkatan secara besar-besaran (Nehemia & Prasetya, 2023). Jika diamati, realisasi penanaman modal dalam negeri selalu mengalami peningkatan sedangkan realisasi penanaman modal asing justru mengalami fluktuatif. Meskipun terjadi pandemi *covid-19* pada tahun 2020, investor asing tetap semangat menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan penanaman modal asing memang sempat tidak stabil, tetapi kembali menggeliat tanpa butuh waktu lama. Jika dilihat dari segi proyek, penanaman modal asing meningkat 87% menjadi 56.726 unit pada tahun 2020 yang sebelumnya sebanyak 30.354 unit. Selain itu, sebagian besar penanaman modal asing masuk ke sektor logam dasar, peralatan, perangkat keras, dan non-rekayasa serta diikuti pertambangan dan industri kimia-farma. Penanaman modal asing di sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar \$4,1 miliar (Rizaty, 2023).

Berbagai kajian empiris telah banyak dilakukan untuk mengeksplorasi dampak infrastruktur dan penanaman modal atau investasi dalam

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Rawung et al, (2022) menyimpulkan bahwa penanaman modal baik asing maupun dalam negeri secara keseluruhan maupun sebagian tetap tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Rawung et al., 2022). Dibandingkan penelitian Yuliani et al, (2023), penanaman modal baik asing maupun dalam negeri terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Yuliani et al., 2023). Ferdian et al, (2022) menjelaskan bahwa infrastruktur jalan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan infrastruktur telekomunikasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ferdian & Satrianto, 2022).

Penelitian tentang pengaruh infrastruktur dan penanaman modal mungkin telah banyak ditemukan. Namun, penelitian ini tetap perlu dilakukan karena penting untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi mengingat dampak yang begitu luas bagi perekonomian negara. Dampak tersebut akan terasa terutama bagi laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang mengalami penurunan setiap tahun dan pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh infrastruktur sosial-ekonomi dan penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari uraian permasalahan tersebut, peneliti menuangkannya dalam judul **“Pengaruh Infrastruktur Sosial-Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang perlu diperhatikan adalah :

1. Apakah infrastruktur jalan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo?
2. Apakah infrastruktur kesehatan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo?
3. Apakah infrastruktur telekomunikasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo?
4. Apakah Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo?
5. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo?
6. Apakah infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui infrastruktur jalan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan

Joko Widodo.

- b. Untuk memahami infrastruktur kesehatan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
- c. Untuk menyelidiki infrastruktur telekomunikasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
- d. Untuk mengkaji Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
- e. Untuk mengetahui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
- f. Untuk memahami infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perluasan pengetahuan ilmiah, pola pikir baru, dan interpretasi teoritis di bidang ekonomi, sehingga memberikan sumber daya dan referensi bagi peneliti masa depan tentang pengaruh infrastruktur sosial-ekonomi dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui dampak infrastruktur sosial-ekonomi, penanaman modal asing maupun dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan memberikan

wawasan mengenai pemikiran sistematis dan kritis yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membenahi dan menentukan arah kebijakan pemerintahan berikutnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu tatanan yang dimaksudkan untuk membantu pembaca dalam memahami isi suatu bacaan. Penelitian ini menggunakan sistem penulisan yang disajikan di bawah ini :

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang sedang dilakukan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang mencakup kajian teori dan kajian pustaka penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III : Merupakan penjelasan tentang beberapa metode beberapa metode penelitian yang perlu diperhatikan seperti jenis penelitian, analisis populasi, ukuran sampel, variabel penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : Merupakan fokus hasil penelitian, merinci data yang dikumpulkan oleh peneliti dan kesimpulan yang diambil dari analisis.

BAB V : Merupakan bagian akhir bab yang mencakup kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Profesor Simon Kuznets (1971), pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi. Peningkatan ini merupakan sebuah respons terhadap kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukan (Manggala, 2020). Kondisi ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan menganalisis data produk domestik regional bruto berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku yang mewakili nilai produk domestik bruto wilayah tersebut. Apabila produk domestik regional bruto suatu wilayah memiliki nilai yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dapat dikatakan baik (Komaro, 2020). Proses pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam menentukan pembangunan daerah karena menyangkut transformasi ekonomi suatu negara secara berkelanjutan menuju tercapainya kondisi ekonomi yang lebih baik (Wahyudi & Zapita, 2022).

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Beberapa ahli yang mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi Klasik sebagai teori untuk menjelaskan ekspansi ekonomi yang disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk. Tokoh-tokoh ekonomi Klasik:

- a) Adam Smith (1776) menyampaikan bahwa perekonomian akan tumbuh jika jumlah penduduk bertambah.
- b) David Ricardo (1817) menyampaikan bahwa jumlah penduduk yang semakin besar akan menurunkan besar upah dan perekonomian akan menjadi stagnan.

c) Robert Malthus (1798) menyampaikan bahwa apabila penduduk berjumlah dua kali lipat daripada produksi pangan, maka krisis pangan atau kelangkaan akan terjadi (Mardiana & Habu, 2020).

2) Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Beberapa pakar yang mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik sebagai penjelasan alternatif atas pesatnya perkembangan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor selain pertumbuhan penduduk, seperti kegiatan wirausaha dan penanaman modal atau investasi. Tokoh-tokoh ekonomi Neo-Klasik:

- a) Harrod-Domar (1947) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika terdapat investasi.
- b) Schumpeter (1930) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan kewirausahaan.
- c) Robert Solow (1956) menyampaikan bahwa modal dan output yang dihasilkan akan semakin meningkat jika tingkat tabungan juga meningkat (Ali, 2022).

3) Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori pertumbuhan baru atau teori endogen (1986) dibangun berdasarkan gagasan bahwa peningkatan inovasi, pengetahuan, dan sumber daya manusia mengarah pada peningkatan produktivitas yang berdampak positif terhadap prospek perekonomian. Secara teoritis, teori pertumbuhan baru menyatakan bahwa keinginan manusia untuk memperoleh keuntungan akan mendorong peningkatan PDB riil per kapita. Teori pertumbuhan baru menyoroti pentingnya kewirausahaan, pengetahuan, inovasi, dan teknologi serta menolak pandangan pertumbuhan eksogen dalam ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi ditentukan oleh faktor eksternal yang tidak mampu dikendalikan (Ganti, 2023). Pertumbuhan baru dan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan bisnis, perekonomian, dan entitas lainnya lebih bergantung pada kekuatan internal dibandingkan kekuatan eksternal (Gajendrakar, 2024).

Teori pertumbuhan endogen pertama kali diciptakan karena kekurangan dan ketidakpuasan terhadap gagasan bahwa faktor eksogen menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara khusus, teori endogen didirikan untuk menyangkal model pertumbuhan eksogen neo-klasik karena teori ini membuat prediksi tentang pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan perubahan teknologi. Teori pertumbuhan endogen menentang gagasan tersebut dengan menempatkan pentingnya peran kemajuan teknologi. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang berasal dari tingkat pertumbuhan output ekonomi per orang, maka pertumbuhan tersebut bergantung pada tingkat produktivitas. Pada gilirannya, produktivitas akan bergantung pada kemajuan perubahan teknologi, yang bergantung pada inovasi dan sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut dianggap sebagai faktor internal perekonomian, bukan faktor eksternal.

Pada penelitian ini, model pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kajian adalah model pertumbuhan Solow (1956), yang juga dikenal sebagai model pertumbuhan eksogen. Model pertumbuhan ekonomi Solow (1956) merupakan perluasan dan pengembangan model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar (1947) yang berfokus pada faktor tenaga kerja dan teknologi (Todaro et al, dalam Latowu, 2023). Keberhasilan ekonomi Harrod-Domar (1947) didasarkan pada pentingnya tingkat tabungan dan investasi yang tinggi. Rendahnya tingkat tabungan dan investasi mengakibatkan kinerja ekonomi buruk sehingga laju pertumbuhan ekonomi akan rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan tabungan dan menyediakan lebih banyak dana investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Sugiarto, 2019). Robert Solow dan Swan (1956) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi seperti jumlah penduduk, teknologi, tenaga kerja, dan akumulasi modal. Pendekatan Solow (1956) memberikan landasan kuat untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada akumulasi modal dan inovasi teknologi (Meiriza et al., 2023).

Berdasarkan persamaan berikut ini, dapat dipahami bahwa model Solow (1956) lebih menekankan pada pentingnya implikasi penanaman modal fisik (Amalia, 2019). Persamaan model Solow sebagai berikut:

$$Y = A K^{\alpha} L^{1-\alpha}$$

Ket : Y = Produk Domestik Bruto

K = Stok modal fisik dan modal manusia

L = Tenaga Kerja

A = Kemajuan Teknologi

α = Elastisitas output terhadap modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kinerja pembangunan suatu negara sehingga diperlukan indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Indikator penting untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu negara dalam jangka waktu tertentu adalah nilai produk domestik bruto suatu wilayah. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah tahunan barang dan jasa yang dihitung menggunakan nilai tukar riil saat ini. Pada umumnya, PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menentukan perubahan dan struktur ekonomi. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga konstan dihitung dari nilai tukar tahunan setiap komoditas untuk menentukan nilai tambah barang dan jasa. PDRB atas harga konstan telah disesuaikan dengan inflasi sehingga mampu memberi gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi dan mampu membandingkan pertumbuhan ekonomi tanpa terpengaruh oleh fluktuasi harga (Kemenkeu RI, 2021). Pada penelitian ini, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel pertumbuhan ekonomi. Tahun 2010 masih relevan digunakan untuk tahun dasar PDB karena kondisi perekonomian Indonesia saat itu relatif stabil dan cara pengukuran aktivitas perekonomian telah sesuai standar internasional *System of National Account (SNA) 2008* (BPS Yogyakarta, 2017).

2. Infrastruktur

Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai prasarana teknis dan fisik yang mendukung jaringan struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat, serta menyediakan fasilitas yang sistematis (Angelina & Wahyuni, 2021). *World bank* mengklasifikasikan infrastruktur menjadi tiga, yaitu infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur administratif. Kehadiran infrastruktur memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi yang dilakukan oleh *World Bank* (1994) menemukan bahwa peningkatan ketersediaan infrastruktur sebanyak 1% saja dapat meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 7%-44% (Hadimuljono, 2019). Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan suatu negara. Apabila suatu negara memiliki infrastruktur yang baik, maka perekonomian di negara tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan pesat (Sugiarto, 2019).

Pada penelitian (Mardiana & Habu, 2020) menerangkan beberapa teori infrastruktur menurut para ahli yaitu :

- a) Robert J. Kodoatie (2005) menjelaskan infrastruktur merupakan fasilitas fisik yang dibangun untuk mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, mulai dari fasilitas transportasi, energi, komunikasi, hingga sanitasi.
- b) Neil S. Grigg (1998) mendefinisikan infrastruktur sebagai sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan, dan fasilitas fisik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun sosial.
- c) Gregory Mankiw (2003) dalam ilmu ekonomi menyoroti peran infrastruktur sebagai modal sosial yang meliputi transportasi umum, sistem pembuangan limbah, jembatan, dan lain-lain. Infrastruktur menurut Mankiw merupakan investasi pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan publik.

a. **Infrastruktur Jalan**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat, termasuk semua komponen jalan dan bangunan pendukung, yang dapat ditemukan di permukaan tanah, dan di atas atau bawah permukaan tanah atau air, kecuali kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kehadiran infrastruktur jalan mampu memberikan peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Infrastruktur jalan dapat diukur menggunakan beberapa indikator, antara lain indikator kualitas dan kuantitas jalan, kapasitas jalan, kondisi permukaan jalan, biaya pemeliharaan, dan pelebaran panjang jalan. Indikator infrastruktur jalan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas, kinerja, dan dampak dari suatu infrastruktur jalan. Pada penelitian ini, panjang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel infrastruktur jalan. Data panjang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota tidak termasuk panjang jalan tol.

b. **Infrastruktur Kesehatan**

Pada UU RI Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang secara mental, sosial, fisik, maupun spiritualnya yang mampu hidup produktif dari segi sosial dan ekonomi. Kesehatan, sebagaimana definisi dari *World Health Organization* (WHO), mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya berfokus pada bebasnya penyakit atau kelemahan fisik saja. Pengembangan kesehatan masyarakat sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur kesehatan. Adanya infrastruktur kesehatan yang memadai mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur kesehatan menggunakan beberapa indikator, antara lain indikator seperti kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan, aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, angka harapan hidup, dan biaya pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.

Indikator infrastruktur kesehatan sangat penting untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pemeliharaan kesehatan suatu wilayah. Pada penelitian ini, angka harapan hidup digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel infrastruktur kesehatan. Pemerintah menggunakan angka harapan hidup sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian status kesehatan. Angka harapan hidup merupakan sebuah tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam bidang kesejahteraan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup mewakili perkiraan usia rata-rata yang dapat dicapai oleh seseorang ketika lahir, berdasarkan kondisi kesehatan dan sosial ekonomi (Faturahman, 2019). Pada umumnya, perhitungan angka harapan hidup diperoleh dari catatan registrasi kematian, kemudian dicatat secara sistematis selama beberapa tahun dan dihitung menggunakan prosedur statistik yang kompleks.

c. **Infrastruktur Telekomunikasi**

Infrastruktur telekomunikasi tidak hanya menjadi salah satu fondasi dan prasyarat terpenting dalam percepatan transformasi digital. Namun, infrastruktur telekomunikasi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi digital (Hartarto, 2023). Teori pertumbuhan ekonomi model Solow (1956) menegaskan bahwa perkembangan teknologi memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara. Selama teknologi masih terus maju, maka tingkat produktivitas akan terus meningkat dan perekonomian akan terus berkembang (Fahira, 2021). Infrastruktur telekomunikasi dapat diukur menggunakan beberapa indikator, antara lain indikator akses layanan, biaya layanan, penggunaan fasilitas telekomunikasi, kapasitas dan kualitas jaringan. Pada penelitian ini, proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel infrastruktur telekomunikasi. Data proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam menggunakan proporsi individu yang memiliki usia lebih dari 5 tahun.

3. Penanaman Modal atau Investasi

Menurut teori investasi jangka panjang, pertumbuhan investasi menghasilkan peningkatan stok modal, yang kemudian mengarah pada peningkatan produktivitas. Teori Neo-Klasik lebih menekankan pada tabungan sebagai sarana investasi. Faktor paling signifikan yang berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah investasi. Semakin cepat peningkatan investasi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, maka semakin cepat pula rata-rata peningkatan stok modal per pekerja (Suripto & Lestari, 2019). Pada teori Neo-Klasik yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Swan, perkembangan modal, tenaga kerja, dan teknologi merupakan beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi (Meiriza et al., 2023). Harrod-Domar mewujudkan perspektif para ekonom awal, menggabungkan konsep Klasik dan Keynesian serta menekankan pentingnya pertumbuhan modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Persepsi pembentukan modal sebagaimana yang dikemukakan oleh Harrod-Domar, merupakan proses meningkatkan kapasitas perekonomian untuk menciptakan barang dan jasa. Harrod-Domar () memusatkan teorinya pada aspek permintaan, modal, dan investasi. Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai melalui investasi atau pembentukan modal. Investasi yang besar akan mendorong perekonomian yang lebih kuat dan stabil (Aloisius & Pangabean, 2023). Teori tabungan dan investasi yang digagaskan oleh Harrod-Domar berkaitan dengan penanaman modal. Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa tingkat tabungan dan investasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang rendah terjadi ketika tingkat tabungan dan investasi juga relatif rendah, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat tabungan dan investasi, semakin kuat pertumbuhan ekonomi. Apabila modal yang dimiliki diinvestasikan, maka idealnya akan menghasilkan pembangunan ekonomi (Raharja & Lestari, 2022).

Pada penelitian ini, realisasi investasi penanaman modal asing digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel penanaman modal asing. Realisasi investasi penanaman modal asing merupakan modal berasal dari luar negeri yang digunakan untuk kegiatan investasi di suatu negara. Sementara variabel penanaman modal dalam negeri diukur menggunakan indikator realisasi investasi penanaman modal dalam negeri. Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri merupakan modal yang berasal dari pihak-pihak yang berdomisili di Indonesia, baik perseorangan, badan usaha swasta milik negara, maupun badan usaha milik negara, yang ditanamkan untuk kegiatan usaha di dalam negeri (UU RI, 2007). Data realisasi penanaman modal dalam dan luar negeri meliputi sektor minyak dan alam, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, penanaman modal yang disetujui oleh otoritas teknis atau sektoral, investasi portofolio atau pasar modal, dan rumah tangga (BPS, 2024g).

B. Landasan Teologis

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perspektif Islam tentang pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekedar peningkatan angka-angka ekonomi semata, melainkan sebuah proses yang melibatkan nilai-nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas tentang pertumbuhan ekonomi dalam istilah modern. Namun, prinsip dan asas yang dikandungnya memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi menurut Islam berlandaskan asas *tauhid*, asas *khalifah*, asas *rububiyah*, dan asas *tazkiyah*. Keempat asas ini menjadi pijakan utama dalam membentuk etika dan moral manusia dalam melakukan aktivitas di bumi. Hal tersebut dikarenakan keempat asas telah mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia, baik material maupun spiritual, sebagai karakteristik perekonomian berbasis syari'ah. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa perspektif Islam tentang pertumbuhan ekonomi mencakup tiga aspek penting yaitu pembangunan fisik, spiritual, dan mental (Gunawan, 2020).

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang sistem perekonomian yang sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : *Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur.*

Ayat di atas menjelaskan tentang anugerah Allah Swt kepada manusia. Allah Swt menempatkan manusia menjadi pemilik dan pengelola di bumi dengan menyediakan sumber kehidupan. Makna QS. Al-A'raf ayat 10 bagi K.H. Miftachul Akhyar selaku pengurus besar NU adalah Islam sangat peduli dengan ekonomi. Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai penjaga atau khalifah untuk memakmurkan bumi. Khalifah merupakan orang yang mempunyai kemampuan membangun, mewujudkan, dan menggali segala sumber yang bermanfaat bagi hamba Allah di muka bumi sehingga kemakmuran dapat tercapai (Triono, 2020).

Berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat telah dilakukan sejak lama, termasuk dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Berikut ini kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin antara lain (Fajriah & Kurniawan, 2022)

1. Khalifah Abu Bakar as-Shidiq

Perhitungan zakat secara akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan sumber pendapatan negara yang kemudian didistribusikan langsung kepada seluruh kaum muslimin tanpa tersisa. Harta baitul mal juga didistribusikan kepada para sahabat baik yang kaya maupun miskin. Pada akhirnya *aggregate demand* dan *supply* mampu meningkatkan pendapatan nasional.

2. Khalifah Umar bin Khattab

Umar bin Khattab mendirikan lembaga keuangan yang dikenal sebagai Baitul Mal dan departemen untuk mendistribusikan harta baitul mal. Departemen-departemen tersebut adalah Departemen Pelayanan Militer,

Departemen Administrasi Kehakiman, Departemen Pengembangan Pendidikan Islam, dan Departemen Jaminan Sosial. Selain itu, Umar bin Khatab juga berupaya dalam mencetak uang, membangun lembaga hisbah, membuat peraturan kepemilikan tanah, dan mengawasi perdagangan.

3. Khalifah Utsman bin Affan

Pembangunan saluran air, pembangunan jalan, pembentukan polisi keamanan perdagangan, pengorganisasian armada angkatan laut, pengaturan kebijakan zakat dan pengendalian harga. Selain itu, Utsman bin Affan juga berupaya dalam peningkatan penerimaan *jizyah* (pajak masyarakat non-muslim) dan *kharaj* (pajak tanah pertanian) untuk memperluas wilayah dan reklamasi tanah.

4. Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pendistribusian uang rakyat secara merata setiap hari Kamis, memiliki konsep pemerintahan yang jelas, dan melakukan reformasi sistem administrasi dan perpajakan. Selain itu, Ali juga mengenakan pajak kepada pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas untuk mengenakan zakat pada bumbu masakan yaitu sayur-sayuran.

Infrastruktur merupakan kumpulan fasilitas dan layanan yang diperlukan dalam mendukung perekonomian dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Jika dibayangkan, sebuah bangunan pasti membutuhkan fondasi yang kokoh, saluran air, listrik, dan akses jalan yang berfungsi dengan baik. Fondasi yang kokoh, saluran air, listrik, dan akses jalan inilah yang disebut dengan infrastruktur. Infrastruktur dalam Islam memiliki makna yang lebih luas dari sekadar bangunan fisik. Ia mencakup segala fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Perspektif Islam, pembangunan infrastruktur bukan hanya sekadar upaya teknis, tetapi juga merupakan kewajiban moral yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Menurut Imam Al-Ghazali, makna dari kemaslahatan ditandai dengan adanya kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan kemaslahatan secara umum bersifat universal bukan hanya bersifat parsial saja sehingga perlu dijaga bersama-sama (Prayoga, 2023).

Secara implisit Islam sangat mendukung pembangunan infrastruktur yang baik dan berkelanjutan seperti firman Allah Swt dalam QS. An-Nahl ayat 15 sebagai berikut :

وَالْفِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : *Dia memancangkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak berguncang bersamamu serta (menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.*

Ayat di atas menjelaskan tentang kekuasaan Allah Swt dalam menciptakan gunung yang kokoh, sungai yang mengalir, dan jalan yang membentang untuk memberikan petunjuk kepada hamba-Nya di muka bumi. Menurut Ibnu Jarir Al-Thabari dan Hamka memaknai hubungan penciptaan sungai dan jalan sebagai sebuah fasilitas untuk memudahkan aktivitas dengan sesama. Adanya kemudahan fasilitas atau infrastruktur yang ada, maka kegiatan perekonomian pun akan senantiasa berjalan dengan lancar. Ibnu Kathir menambahkan pendapat bahwa jalan yang membentang mampu menghubungkan antarwilayah sehingga akan terjalin konektivitas. Secara menyeluruh, penciptaan gunung, sungai, dan jalan dapat dimaknai bahwa manusia memiliki potensi untuk bergerak mengelola bumi dengan berlandaskan kemaslahatan sehingga tercipta kemakmuran (Ghianovan, 2023).

Perlu diingat bahwa dalam mewujudkan kemakmuran di muka bumi maka perlu melakukan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sederhananya, investasi merupakan cara mengembangkan pendapatan tanpa terkena inflasi. Investasi dalam Islam tentu bukan hanya sekadar kegiatan menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga merupakan tindakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Dengan memilih investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seorang muslim dapat memperoleh keuntungan finansial sekaligus menjalankan perintah agama. Prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi antara lain tidak adanya praktik riba, *maisir*, *gharar* dan tentunya halal. Tingkat pengangguran akan berkurang karena investasi meningkatkan stok modal dan menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap tenaga kerja (Dinata & Setyanto, 2024).

Kegiatan investasi dapat ditemukan dalam firman Allah Swt pada QS. Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa investasi yang awalnya dimulai dengan 1 benih berubah menjadi 7 benih dan akhirnya menjadi 700 benih. Hal tersebut seolah-olah menunjukkan dan menganjurkan untuk berinvestasi, dalam hal ini dimaksudkan untuk berinfak. Infak merupakan suatu tindakan mengeluarkan harta dengan cara yang baik untuk kemaslahatan keluarga. Tidak salah, apabila menganggap investasi sebagai salah satu cara memanfaatkan aset keluarga (Marlina & Safitri, 2023).

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka meliputi kajian teoritis, literatur ilmiah, dan referensi yang berkaitan dengan norma-norma budaya yang ditetapkan pada saat penelitian (Sugiyono, 2019). Penelitian (Yuliani et al., 2023), menyimpulkan bahwa pada tahun 2019, 34 provinsi di Indonesia mengalami lonjakan produk domestik regional bruto (PDRB) akibat penanaman modal asing dan dalam negeri. Produk domestik bruto (PDB) suatu wilayah akan meningkat seiring dengan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Penelitian (Sunuputri & Hasmarini, 2023) menyimpulkan bahwa pada tahun 2016-2021, infrastruktur jalan tidak mempengaruhi produk domestik regional bruto di 17 kabupaten/kota Sumatera Selatan sedangkan infrastruktur pendidikan, kesehatan, distribusi listrik, dan penanaman modal dalam negeri memberikan pengaruh yang positif.

Penelitian (Ferdian & Satrianto, 2022), menyimpulkan bahwa secara parsial, infrastruktur jalan mempengaruhi secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan infrastruktur telekomunikasi

mempengaruhi secara positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, infrastruktur listrik, infrastruktur pendidikan dan *Foreign Direct Investment* (FDI) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Angelina & Wahyuni, 2021), menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2015-2019 sangat bergantung pada dampak positif infrastruktur (jalan, listrik, air, kesehatan, dan TIK). Pada tahun 2021, penelitian Wahyuni menunjukkan bahwa adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, dan korelasi tersebut terbukti memiliki pengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan (Mahrizza & Amar B, 2019), menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sangat didukung oleh penanaman modal baik asing maupun dalam negeri, tenaga kerja, dan infrastruktur jalan. Penelitian (Nuritasari, 2013), menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sedangkan secara sebagian, variabel penanaman modal baik asing maupun dalam negeri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berikut adalah tabel referensi dari buku, artikel, jurnal, dan skripsi penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai bahan acuan penelitian:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Yuliani et al., 2023) “Pengaruh PMA dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi Indonesia”.	Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di 34 provinsi Indonesia tahun 2019.	Variabel independen berupa penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.	Penambahan variabel independen berupa infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur telekomunikasi.

2.	<p>(Sunuputri & Hasmarini, 2023)</p> <p>“Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan”.</p>	<p>Infrastruktur pendidikan, kesehatan, distribusi listrik, dan investasi dalam negeri berpengaruh positif sedangkan infrastruktur jalan raya tidak berpengaruh terhadap PDRB di 17 Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2021.</p>	<p>Variabel independen berupa infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, dan investasi dalam negeri.</p>	<p>Penambahan variabel independen berupa infrastruktur telekomunikasi dan penanaman modal asing.</p>
3.	<p>(Ferdian & Satrianto, 2022)</p> <p>“Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.</p>	<p>Infrastruktur jalan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Infrastruktur listrik dan infrastruktur pendidikan serta <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i></p>	<p>Variabel independen yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi dan <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i>.</p>	<p>Penambahan variabel independen yaitu infrastruktur kesehatan, penanaman modal dalam negeri.</p>

		berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.		
4.	(Angelina & Wahyuni, 2021) “Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2015-2019”.	Variabel infrastruktur (jalan, listrik, air, kesehatan, dan TIK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015-2019.	Variabel independen yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur telekomunikasi. Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.	Penambahan variabel independen yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.
5.	(Wahyuni & Hulu, 2021) “Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia tahun 2010-2019”.	Terdapat hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	Variabel independen yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi dan penanaman modal asing. Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.	Penambahan variabel independen yaitu penanaman modal asing.
6.	(Mahriza & Amar B, 2019) “Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Asing, Tenaga Kerja, Infrastruktur	Penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja, dan infrastruktur jalan	Variabel independen yaitu infrastruktur jalan, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam	Penambahan variabel independen yaitu infrastruktur kesehatan dan infrastruktur telekomunikasi.

	terhadap Perekonomian di Provinsi Sumatera Barat”.	berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.	negeri. Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.	
7.	(Nuritasari, 2013) “Pengaruh Infrastruktur, PMDN dan PMA terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia”.	Secara simultan, semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel PMA dan PMDN tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB di Indonesia.	Variabel independen yaitu infrastruktur jalan, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri. Variabel dependen yaitu produk domestik bruto.	Penambahan variabel independen yaitu infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur telekomunikasi.

Sumber : (Data sekunder diolah dari berbagai sumber, 2024)

D. Hipotesis

Hipotesis digunakan untuk menggambarkan suatu rumusan masalah penelitian yang masih dalam tahap penyusunan. Hasil jawaban masih bersifat sementara karena didasarkan pada hipotesis yang masuk akal, bukan informasi faktual (Sugiyono, 2019). Berdasarkan uraian dari kajian pustaka dan kajian teori, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Mahriza & Amar B (2019) menemukan bahwa infrastruktur jalan mempunyai dampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDB) di 10 provinsi di Sumatera pada tahun 2013 s.d. 2019. Hal ini sesuai dengan penelitian Angelina & Wahyuni (2021) dan Brilyawan & Santosa (2021) yang menunjukkan bahwa infrastruktur jalan mempunyai dampak positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Infrastruktur jalan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo

2. Pengaruh Infrastruktur Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Suripto dan Lestari (2019) menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto di provinsi Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Amalia (2019) dan Angelina & Wahyuni (2021) yang menyatakan bahwa infrastruktur kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto per kapita Indonesia. Hasil beberapa penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa penanaman modal asing mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Infrastruktur kesehatan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo

3. Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Angelina & Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia pada tahun 2015 s.d. 2019 sebagian besar didorong oleh infrastruktur telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Ferdian & Satrianto (2022) dan Harsono et al. (2024) yang menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Infrastruktur telekomunikasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo

4. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kurniawati & Islami (2022) mencatat bahwa penanaman modal asing jangka pendek dan panjang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliani et al. (2023) dan Kambono & Marpaung (2020) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi positif oleh investasi asing. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo

5. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Aloisius & Panggabean pada tahun 2023 menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto Kalimantan Barat terkena dampak positif karena adanya penanaman modal dalam negeri. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliani et al. (2023) dan Kurniawati & Islami (2022) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi positif oleh penanaman modal dalam negeri. Beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa investasi dalam negeri bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo

6. Pengaruh Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Kesehatan, Infrastruktur Telekomunikasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Brilyawan dan Santosa (2021) menunjukkan bahwa pembangunan perekonomian Indonesia dipengaruhi secara positif oleh infrastruktur jalan. Pada studi yang dilakukan oleh

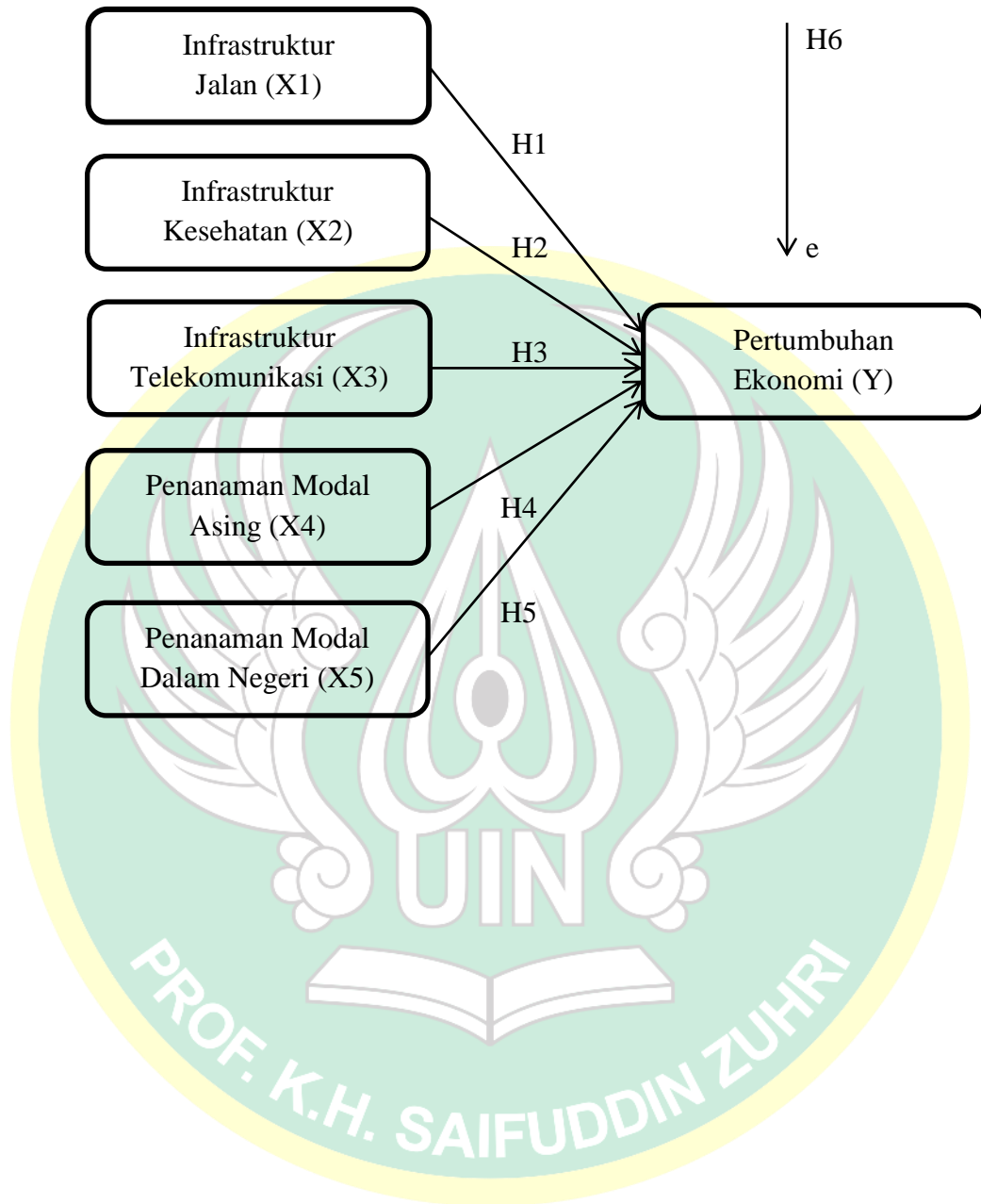
Angelina & Wahyuni (2021), ditemukan bahwa infrastruktur kesehatan Indonesia pada dasarnya mempengaruhi produk domestik regional bruto per kapita. Menurut temuan Harsono et al. (2024) yang sejalan dengan Ferdian & Satrianto (2022), menerangkan bahwa infrastruktur telekomunikasi Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan negara. Penelitian Yuliani et al. (2023) menyoroti dampak positif investasi asing terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, penelitian Kurniawati & Islami (2022) mengungkapkan bahwa perkembangan perekonomian Indonesia dipengaruhi positif oleh penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Pada infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia masa pemerintahan Joko Widodo

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan salah satu kerangka yang dapat diterapkan dalam upaya memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka konseptual biasanya berisi pemikiran mengenai alur-alur penelitian yang dapat menghubungkan antara variabel yang diamati dengan konsep. Pada umumnya, proses menganalisis kerangka ini melibatkan pendekatan ilmiah dan korelasi antar variabel. Berikut kerangka konseptual yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pengaruh infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo sesuai dengan uraian hipotesis di atas adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berdasarkan data sekunder. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivisme* dan statistika, digunakan sebagai alat pengujian untuk mengukur data yang digunakan dalam penelitian berupa angka-angka. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak (Sugiyono, 2019).

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan kategori luas yang mencakup subjek atau objek dengan karakteristik dan kuantitas yang diidentifikasi peneliti dan diambil kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 38 provinsi. Sejak tahun 2022, provinsi di Indonesia mengalami pemekaran 4 provinsi yang sebelumnya hanya sebanyak 34 provinsi (Lestari, 2023).

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan suatu bagian dari kuantitas dan karakteristik yang ada pada populasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan ditentukan oleh peneliti dengan memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Sampel sesuai dan bersifat sama dengan sample yang lain
2. Provinsi berdiri sebelum tahun 2015, memiliki kelengkapan data, dan data telah dipublikasikan
3. Semua provinsi memiliki data dengan jumlah tahun yang sama

Berdasarkan pertimbangan di atas, data sebagian anggota populasi yaitu sebanyak 34 provinsi pada periode 2015 s.d. 2023 menjadi sampel dalam penelitian ini. Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan tidak menjadi sampel penelitian karena adanya keterbatasan data statistik.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas, diartikan sebagai variabel yang mempengaruhi, menyebabkan perubahan, atau mengakibatkan terbentuknya variabel dependen (Sugiyono, 2019). Infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dijadikan variabel independen dalam penelitian ini.

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat, diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Sugiyono, 2019). Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dependen penelitian ini.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi suatu negara yang mengalami peningkatan dalam memproduksi barang dan jasa pada jangka waktu tertentu. Sederhananya, pertumbuhan ekonomi berarti suatu negara mengalami peningkatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik regional bruto dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya (BPS Kabupaten Blora, 2021). Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut provinsi dalam satuan miliar rupiah pada periode 2015 s.d. 2023.

b. Infrastruktur Jalan

Panjang jalan mengacu pada total jarak suatu ruas jalan, tanpa memandang kondisi fisiknya (baik, sedang, rusak, atau rusak berat) (Peraturan Pemerintah RI, 2006). Infrastruktur jalan dalam penelitian ini dihitung dari data jumlah panjang jalan menurut provinsi dan tingkat kewenangan pemerintah baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam satuan kilometer pada periode 2015 s.d. 2023.

c. Infrastruktur Kesehatan

Angka harapan hidup merupakan perkiraan usia rata-rata yang dapat dicapai seseorang mampu bertahan hidup berdasarkan data kematian saat ini (BPS Kabupaten Mempawah, 2023). Infrastruktur kesehatan dalam penelitian ini dihitung dari data angka harapan hidup (kedua jenis kelamin) menurut provinsi dengan satuan tahun pada periode 2015 s.d. 2023.

d. Infrastruktur Telekomunikasi

Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam merupakan perbandingan individu yang memiliki telepon genggam dengan populasi penduduk pada tahun berjalan (BPS Kota Balikpapan, 2024). Infrastruktur telekomunikasi dalam penelitian ini dihitung dari data proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam menurut provinsi dengan satuan persen pada periode 2015 s.d. 2023.

e. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing merupakan kegiatan warga negara asing atau badan usaha asing menginvestasikan dana atau asetnya untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Sederhananya, penanaman modal asing merupakan investasi yang berasal dari luar negeri untuk mengembangkan usahanya di dalam negeri (UU RI, 2007). Penanaman modal asing dalam penelitian ini dihitung dari data realisasi investasi penanaman modal asing menurut provinsi dengan satuan US\$ pada periode 2015 s.d. 2023.

f. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri merupakan suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam negeri baik berupa perorangan maupun badan usaha untuk mengembangkan usahanya di tanah air (UU RI, 2007). Penanaman modal dalam negeri pada penelitian ini dihitung dari data realisasi investasi penanaman modal dalam negeri menurut provinsi dengan satuan miliar rupiah pada periode 2015 s.d. 2023.

D. Pengumpulan Data Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka dan metode dokumentasi. Tinjauan pustaka merupakan suatu metode untuk mengkaji suatu tulisan atau literatur dalam ruang lingkup masalah penelitian. Sedangkan metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data sekunder mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh pihak-pihak yang berwenang (Patrimurti et al., 2020).

2. Sumber Data

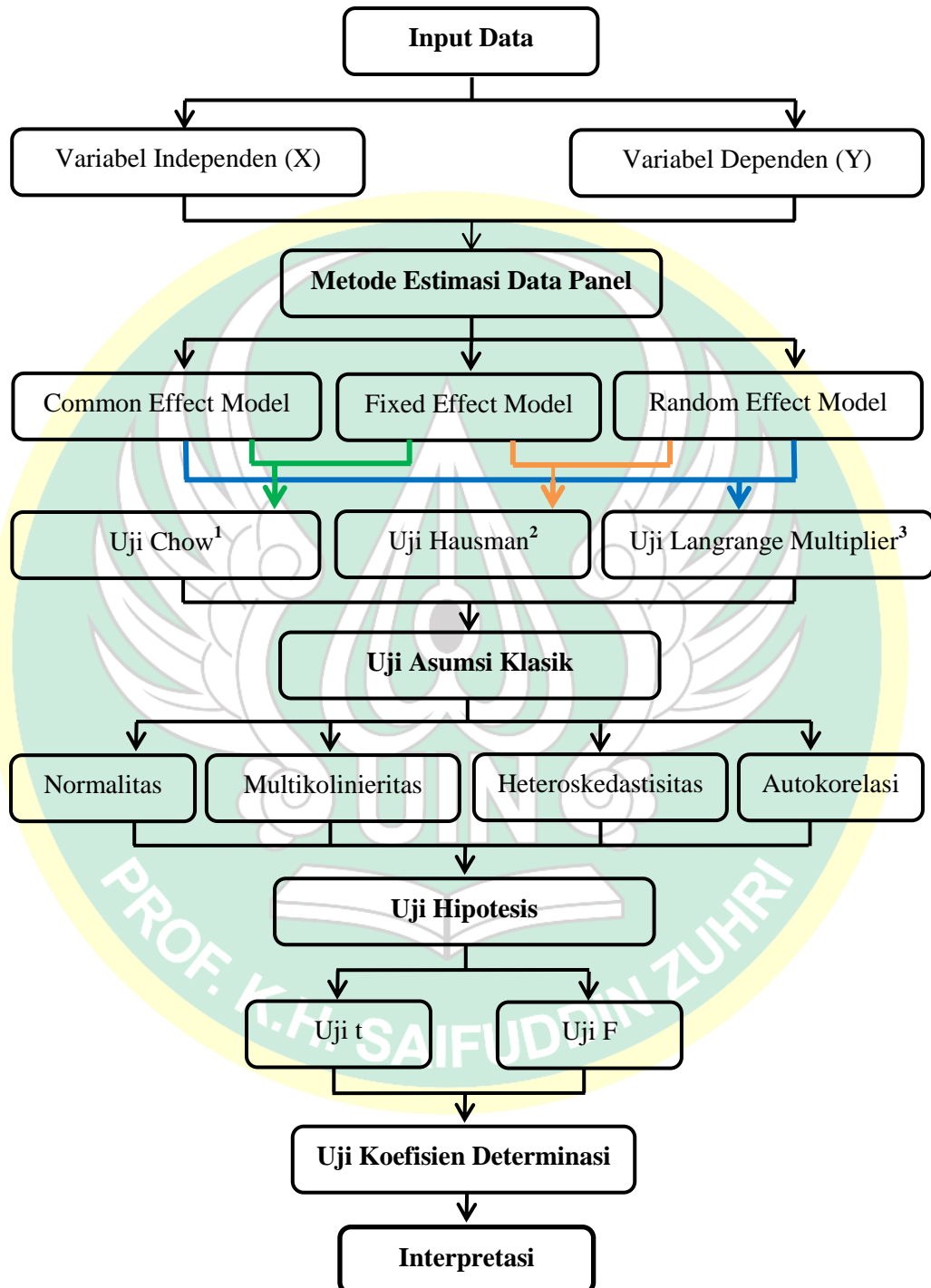
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, data panjang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, data angka harapan hidup (kedua jenis kelamin), data proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, realisasi investasi penanaman modal asing, dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri menurut provinsi di Indonesia. Semua data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) baik secara publikasi online maupun buku tahunan.

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian

	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Satuan
Y	Pertumbuhan Ekonomi	PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010	Miliar Rupiah
X	1. Infrastruktur Jalan	Panjang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Km
	2. Infrastruktur Kesehatan	Angka harapan hidup (kedua jenis kelamin)	Tahun
	3. Infrastruktur Telekomunikasi	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen
	4. Penanaman Modal Asing (PMA)	Realisasi investasi penanaman modal asing	US\$
	5. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri	Miliar Rupiah

E. Teknik Analisis Data

Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan aplikasi *Eviews*. Penelitian ini menggunakan aplikasi *Eviews* karena kemampuannya dalam menyelesaikan data *time series*, data *cross section*, atau data panel sekaligus. Data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan data *cross section* yang digunakan untuk menghasilkan data panel, dan diperoleh dengan memeriksa sekelompok objek dalam periode yang bervariasi (Firdaus, 2020). Aplikasi *Eviews* juga tergolong mudah untuk digunakan dan dipahami, hanya perlu sekali klik maka hasil akan langsung terlihat. Hasil output juga mudah untuk dipindah atau ditransfer ke *Microsoft Word*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model persamaan :

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon$$

- Ket : Y_{it} : Pertumbuhan ekonomi
 a : Konstanta
 β_1, \dots, β_5 : Koefisien
 X_{1it} : Infrastruktur Jalan
 X_{2it} : Infrastruktur Kesehatan
 X_{3it} : Infrastruktur Telekomunikasi
 X_{4it} : Penanaman Modal Asing (PMA)
 X_{5it} : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
 i : 1, 2, ... (data *cross section* : 34 Provinsi di Indonesia)
 t : 2015, 2016, ... (data *time series* : Tahun 2015-2023)
 ε : Error

1. Pemilihan Model Regresi

Regresi data panel merupakan salah satu teknik regresi linier yang menggabungkan data *cross section* dengan data *time series*. Data panel dalam penelitian ini meliputi data 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2023. Model regresi dipilih dari tiga jenis estimasi yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Tiga jenis estimasi tersebut tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada buku karya Priyatno (2022) yang

berjudul “Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS & Analisis Regresi Data Panel Dengan *Eviews*” dijelaskan bahwa pemilihan model regresi data panel dapat dipilih dengan menggunakan beberapa pengujian yaitu uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *langrange multiplier*. Pengujian tersebut dapat dijelaskan dengan detail sebagai berikut:

a. Uji Chow

Pengujian digunakan untuk menentukan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat dalam memproses data. Berikut ini kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan:

- 1) Apabila nilai probabilitas pada *cross section* $F \leq 0,05$ maka model yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model*
- 2) Apabila nilai probabilitas pada *cross section* $F > 0,05$ maka model yang lebih baik adalah *Common Effect Model*

b. Uji Husman

Pengujian digunakan untuk menentukan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat dalam memproses data. Berikut ini kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan:

- 1) Apabila nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka model yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model*
- 2) Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang lebih baik adalah *Random Effect Model*

c. Uji Langrange Multiplier

Pengujian digunakan untuk menentukan *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat dalam memproses data. Berikut ini kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan:

- 1) Apabila nilai signifikansi pada *both* $\leq 0,05$ maka model yang lebih baik adalah *Random Effect Model*
- 2) Apabila nilai signifikansi pada *both* $> 0,05$ maka model yang lebih baik adalah *Common Effect Model*

2. Pengujian Asumsi Klasik

Setelah model regresi telah dipilih maka langkah selanjutnya adalah memastikan model telah memenuhi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dengan uji asumsi klasik. Pada buku yang berjudul “Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis” karya Basuki (2021), uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji *Normalitas* merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui keteraturan residu. Model regresi yang baik memiliki nilai residu terdistribusi normal. Berikut ini kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan:

- 1) Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka distribusi bersifat normal
- 2) Apabila nilai *Jarque-Bera* \leq nilai *Chi Square* maka nilai residual terdistribusi bersifat normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji *Multikolinearitas* merupakan suatu kondisi ketika terjadi hubungan linear yang sempurna atau hampir linier antar variabel independen dalam model regresi. Apabila terjadi *multikolinearitas* dalam model regresi maka akan mengakibatkan sulit memperoleh pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan yaitu apabila nilai VIF variabel independen ≤ 10 atau semua nilai korelasi variabel independen $\leq 0,85$ maka tidak terjadi *multikolinearitas*.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* merupakan suatu kondisi ketika varian dari residual seluruh observasi dalam suatu model regresi tidak sama. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan Uji *Glejser*. Uji *Glejser* merupakan regresi nilai absolut dari residual oleh variabel independen dengan ketentuan apabila nilai *probability Chi Square* (2) pada $Obs * R\text{-squared} \geq 0,05$ artinya model regresi tidak terdapat masalah *heteroskedastisitas*.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan suatu kondisi pada model regresi ketika residual periode sekarang dengan periode sebelumnya berkorelasi. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat masalah autokorelasi. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu menggunakan Uji LM dengan *Metode Breusch Godfrey Serial Correlation*. Ketentuannya adalah apabila nilai probabilitas *Chi Square* pada $Obs * R\text{-squared} \geq 0,05$ artinya model regresi tidak terdapat masalah *autokorelasi*.

Menurut Gujarati (2003) pada buku Basuki (2021), pengujian asumsi klasik pada pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) yaitu *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* tidak perlu melakukan semua pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik pada pendekatan OLS hanya melakukan uji *multikolinieritas* dan uji *heteroskedastisitas* saja. Sedangkan pengujian asumsi klasik dengan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) atau model *Random Effect Model* memiliki kelebihan pada kemampuannya dalam melewati uji *heteroskedastisitas*. Dengan kata lain, model *Random Effect Model* hanya perlu melakukan uji *multikolinieritas*. Berikut penjelasan uji asumsi klasik menurut Gujarati:

- a. Uji *normalitas* pada dasarnya bukanlah syarat dari *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), dan beberapa pihak berpendapat bahwa persyaratan ini tidak perlu dipenuhi.
- b. Uji *multikolinieritas* dilakukan ketika menggunakan beberapa variabel independen dalam regresi linier. Jika hanya terdapat satu variabel independen maka pasti tidak terjadi *multikolinieritas*.
- c. Uji *heteroskedastisitas* pada umumnya terjadi pada data *cross section*. Dalam hal ini, data panel lebih mirip dengan karakteristik data *cross section* dibandingkan *time series*.
- d. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series*. Jika data *non time series* (*cross section* atau panel) melakukan uji *autokorelasi* maka akan sia-sia dan tidak berarti.

3. Pengujian Koefisien Determinasi

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah mengukur nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai uji koefisien determinasi menunjukkan berapa besar persentase kemampuan model regresi menjelaskan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Berikut ini kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan:

- 1) Apabila $R^2 = 0$ maka variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen (infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri) secara simultan.
- 2) Apabila $R^2 = 1$ maka variabel independen (infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri) dapat menjelaskan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) secara simultan.

4. Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan pengujian sebagai berikut (Priyatno, 2022):

a. Uji t (uji secara parsial)

- 1) Menentukan H_0 atau H_a

H_{01} : Infrastruktur jalan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

H_{a1} : Infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

H_{02} : Infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

H_{a2} : Infrastruktur kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

H_{03} : Infrastruktur telekomunikasi tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

H_{a3} : Infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

H_{04} : Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

H_{a4} : Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

H_{05} : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

H_{a5} : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

- 2) Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai probabilitas 0,05
 H_0 diterima apabila nilai probabilitas $> 0,05$ (tidak berpengaruh)
 H_a diterima apabila nilai probabilitas $\leq 0,05$ (berpengaruh)
- 3) Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai t-statistik
 H_0 diterima apabila nilai t-statistik $\leq t$ tabel (tidak berpengaruh)
 H_a diterima apabila nilai t-statistik $> t$ tabel (berpengaruh)
- 4) Menentukan nilai t tabel
 Nilai t tabel dapat dilihat pada lampiran 2 dengan menentukan nilai df terlebih dahulu berdasarkan rumus $df = n - k - 1$ dengan n adalah sampel penelitian dan k adalah jumlah variabel independen.
- 5) Membandingkan nilai t-statistik dan t tabel kemudian ditarik kesimpulan (lihat t tabel pada lampiran 2).

b. Uji F (uji secara simultan)

- 1) Menentukan H_0 atau H_a

H_0 : Infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

Ha : Infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo

- 2) Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai probabilitas 0,05
H0 diterima apabila nilai probabilitas $> 0,05$ (tidak berpengaruh)
Ha diterima apabila nilai probabilitas $\leq 0,05$ (berpengaruh)
- 3) Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai F-statistik
H0 diterima apabila nilai F-statistik $\leq F$ tabel (tidak berpengaruh)
Ha diterima apabila nilai F-statistik $> F$ tabel (berpengaruh)
- 4) Menentukan nilai F tabel
Nilai F tabel dapat dilihat pada lampiran 2 dengan menentukan nilai df terlebih dahulu berdasarkan rumus df (k ; n-k) dengan n adalah sampel penelitian dan k adalah jumlah variabel independen.
- 5) Membandingkan nilai F-statistik dan F tabel kemudian ditarik kesimpulan (lihat F tabel pada lampiran 2).

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara dan terletak di garis khatulistiwa antara 6"LU - 11"LU, 95"BT - 141"BT dan garis lintang 0" LU. Iklim Indonesia termasuk dalam kategori iklim tropis karena posisinya berada pada garis lurus. Iklim tropis tentu memiliki ciri khas tersendiri diantaranya cuaca hangat, curah hujan tinggi, tekanan udara rendah, dan keragaman hayati yang tinggi. Geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Dengan letak geografisnya yang sangat luas, Indonesia memiliki tiga zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT.

Badan Informasi Geospasial (BIG) memperkirakan luas wilayah Indonesia adalah 5.180 juta km² dengan luas wilayah daratan dan perairan seluas 1.905 juta km² dan 3.257 juta km² (Hasanah, 2020). Adanya jumlah wilayah yang cukup luas, sehingga Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.001 terdiri dari pulau kecil hingga pulau besar. Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 4.520 pulau dengan persentase luas wilayah sebesar 16,53% (BPS, 2023). Banyaknya jumlah pulau yang dimiliki Indonesia, populasi penduduk Indonesia mencapai 279,04 juta jiwa dan menempati posisi ke-4 penduduk terbanyak di dunia (Fadhlurrahman, 2024).

Pada tahun 2015, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Berdasarkan UU RI Nomor 14-16 Tahun 2022 tanggal 25 Juli, Indonesia mengalami pemekaran provinsi menjadi 37 provinsi. Provinsi baru yaitu provinsi Papua Tengah, provinsi Papua Selatan, dan provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, pada akhir tahun 2022, berdasarkan UU RI Nomor 29 Tahun 2022 tanggal 8 Desember, Indonesia kembali mengalami pemekaran menjadi 38 provinsi yaitu penambahan provinsi Papua Barat Daya (BPS, 2024g). Penelitian ini tidak dilakukan pada provinsi baru yaitu provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan karena adanya keterbatasan data. Berikut ini, 38 provinsi yang berada di Indonesia:

Tabel 4.1 Provinsi-Provinsi di Indonesia

1. Aceh	14. DI Yogyakarta	27. Sulawesi Selatan
2. Sumatera Utara	15. Jawa Timur	28. Sulawesi Tenggara
3. Sumatera Barat	16. Banten	29. Gorontalo
4. Riau	17. Bali	30. Sulawesi Barat
5. Jambi	18. Nusa Tenggara Barat	31. Maluku
6. Sumatera Selatan	19. Nusa Tenggara Timur	32. Maluku Utara
7. Bengkulu	20. Kalimantan Barat	33. Papua Barat
8. Lampung	21. Kalimantan Tengah	34. Papua Barat Daya
9. Kep. Bangka Belitung	22. Kalimantan Selatan	35. Papua
10. Kep. Riau	23. Kalimantan Timur	36. Papua Selatan
11. DKI Jakarta	24. Kalimantan Utara	37. Papua Tengah
12. Jawa Barat	25. Sulawesi Utara	38. Papua Pegunungan
13. Jawa Tengah	26. Sulawesi Tengah	

Sumber : (BPS, 2024g)

B. Deskripsi Pemerintahan Joko Widodo

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan tindakan terstruktur untuk memperbaiki suatu kondisi melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal sehingga dapat tercapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Indonesia memiliki tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan pembangunan nasional tentunya harus didukung oleh rencana pembangunan yang matang untuk memperlancar terwujudnya cita-cita nasional. Rencana pembangunan Indonesia dibagi menjadi tiga bidang yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana pembangunan jangka menengah periode 2015 s.d. 2019 merupakan bagian ketiga dari empat rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla merupakan rencana pembangunan nasional untuk mencapai daya saing ekonomi yang berbasis pada keunggulan sumber daya alam, terus meningkatkan kualitas kemampuan teknologi dan sumber daya manusia (Bappenas, 2014).

Implementasi RPJMN periode 2015 s.d. 2019 menghadapi banyak tantangan perekonomian global seperti krisis utang Yunani, era *commodity*

boom berakhir, *rebalancing* perekonomian oleh Tiongkok, dan kebijakan Amerika Serikat tentang *proteksionisme* perdagangan yang tidak pasti. Tentu hal tersebut mengakibatkan pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan global tahun 2008 akan berjalan lambat. Meskipun terjadi berbagai peristiwa perekonomian global, sepanjang periode 2015 s.d. 2019 perekonomian domestik Indonesia mampu tumbuh dengan rata-rata sebesar 5%. Rata-rata perekonomian negara berkembang di dunia sebesar 4,4%, sedangkan persentase perekonomian Indonesia lebih tinggi 0,6% per tahun. Keberhasilan ini tercapai karena pembangunan infrastruktur, efisiensi logistik, promosi pariwisata, peningkatan persaingan industri, perbaikan iklim investasi, dan penguatan daya beli masyarakat (Bappenas, 2019).

Pada periode 2015 s.d. 2019, selain tantangan perekonomian global, Indonesia juga menghadapi masalah dan tantangan pokok perekonomian nasional diantaranya pertama, ketersediaan infrastruktur yang masih belum merata. Padahal, infrastruktur merupakan sebuah peluang dalam meningkatkan investasi dan menurunkan biaya logistik. Kedua, sektor pengolahan industri masih tergolong lambat sehingga perlu adanya penguatan struktural ekonomi. Ketiga, tingkat pemanfaatan dan pengembangan teknologi masih cukup rendah sehingga biaya produksi menjadi tinggi, kualitas dan kuantitas produk sangat terbatas, serta daya saing menjadi rendah. Keempat, adanya peraturan yang masih kontradiksi dan tumpang tindih. Kelima, pilihan pendanaan pembangunan terbatas. Hal ini disebabkan upaya pengembangan sumber pendapatan yang belum optimal. Meski begitu, masih banyak alokasi anggaran yang dihabiskan tidak tepat sasaran dan tidak produktif. Mengeksplorasi sumber pendapatan dan merancang belanja pembangunan secara efektif merupakan tantangan yang harus diatasi (Bappenas, 2014).

Sejak tahun 2015, subsidi energi dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif seperti infrastruktur dan kesehatan. Infrastruktur meningkat sebesar 158,4% dan kesehatan meningkat sebesar 96,3%. Program utama dari kesehatan adalah program ibu hamil dan menyusui, distribusi faskes, pencegahan *stunting*, dan program jaminan kesehatan nasional. Sedangkan

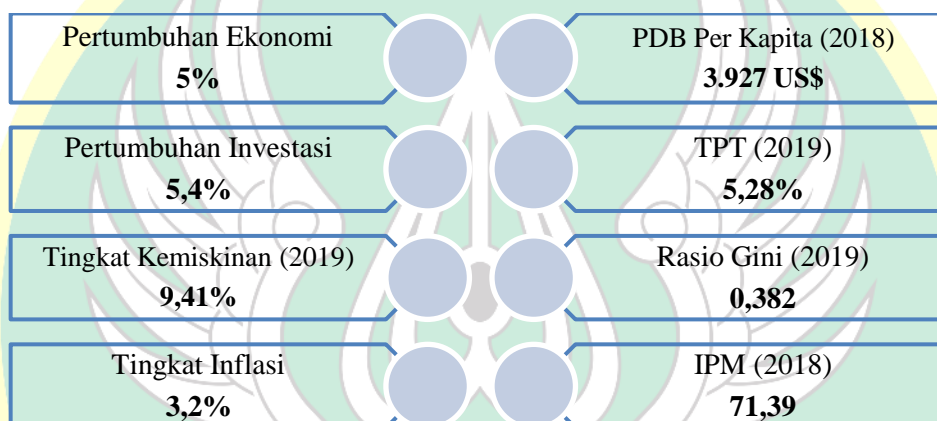
program utama infrastruktur adalah pembangunan dan preservasi jalan, telekomunikasi, jalur KAI, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Dikutip dari data Kemenkominfo, untuk telekomunikasi, panjang jaringan pada tahun 2015-2019 bagian barat, tengah, dan timur Indonesia masing-masing adalah 2.275 km, 2.995 km, dan 6.878 km (Kantor Staf Presiden RI, 2019). Selain itu, pemerintah memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital yang melahirkan perusahaan bisnis lokal seperti gojek, tokopedia, bukalapak, dan traveloka dengan nilai valuasi miliaran US\$. Semakin baik transformasi digital yang dilakukan perusahaan maka tingkat efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan akan semakin meningkat (Raharja et al., 2023).

Pada saat ini, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* (AI)) mengalami perkembangan pesat bahkan menjadi isu hangat di kancah Internasional. *Global AI Index 2023* menunjukkan bahwa kemampuan AI Indonesia berada di peringkat ke-46 dari 62 negara (Sari & Elvira, 2023). Indonesia menjadi negara dengan penyumbang kunjungan ke aplikasi AI terbesar ke-3 secara global, yaitu 1,4 miliar kunjungan. Kominfo menyiapkan strategi dalam mendukung perkembangan AI di Indonesia dengan cara memperkuat kualitas SDM, mengembangkan talenta digital cakap AI, memfasilitasi infrastruktur, dan menyusun regulasi (Muhammad, 2024). Selain mendukung perkembangan AI, pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan dalam investasi seperti memberikan kemudahan dengan menyederhanakan proses perizinan sehingga daya tarik investor semakin meningkat. Sejak tahun 2017, iklim investasi di Indonesia berhasil naik level. Lembaga internasional ternama yaitu *Moody's*, *Fitch*, dan *Standard & Poor's* mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat layak investasi.

Sepanjang periode 2015 s.d. 2019, Indonesia memiliki nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sektor industri seperti manufaktur, pertanian, jasa, dan transportasi mendorong tingkat pertumbuhan perekonomian yang relatif tinggi. Industri manufaktur dan pertanian mampu tumbuh sebesar 4,2% dan 3,7% pertahun. Neraca pembayaran juga masih relatif kuat, dengan melihat cadangan devisa meningkat dari US\$ 111,9 miliar

pada tahun 2014 menjadi US\$ 129,2 miliar pada tahun 2019. Selain itu, upaya menjaga stabilitas makro ekonomi juga harus terus dilakukan. Hal ini terlihat pada tingkat inflasi dan nilai tukar, peningkatan cadangan devisa, serta defisit transaksi berjalan yang masih aman. Dari sisi fiskal, kebijakan tetap fokus pada mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian, dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang berada di bawah 30% PDB dan defisit fiskal yang masih di bawah 3% PDB (Bappenas, 2019). Berikut grafik pencapaian sasaran pembangunan periode 2015 s.d. 2019:

Gambar 4.1 Capaian Sasaran Pembangunan Periode 2015 s.d. 2019

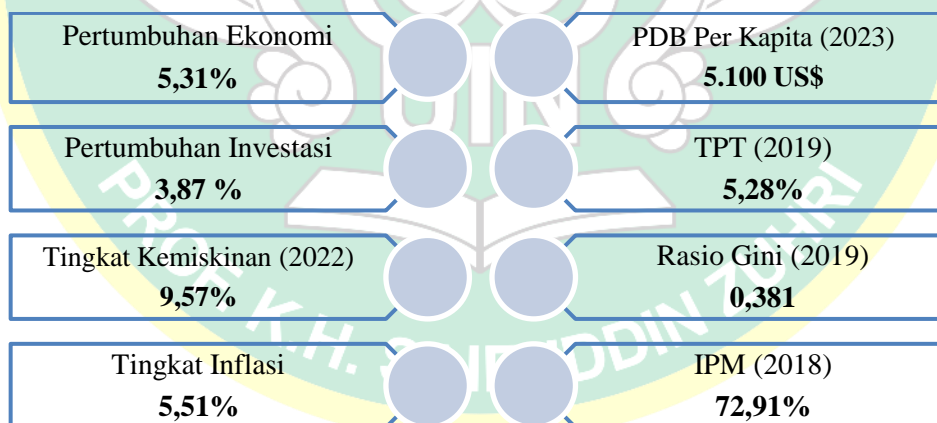


Sumber : (Bappenas, 2019)

Pada periode kedua tahun 2020 s.d. 2024, kehadiran Joko Widodo semakin kuat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Indikator SDGs menjadi bagian yang saling bertaut dengan tujuh agenda pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, fokus utama transformasi pembangunan ekonomi pada tahun 2045 adalah peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. RPJMN periode 2020 s.d. 2024 ditetapkan pada masa pemerintahan Joko Widodo kedua sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020. Berdasarkan arahan Presiden, terdapat lima strategi pelaksanaan visi Indonesia 2045 dan misi Nawacita yaitu membangun sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, memprioritaskan investasi, melakukan transformasi ekonomi dengan meningkatkan daya saing Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global diperkirakan stagnan dan melambat masing-masing sebesar 3,5% dan 3,7% per tahun pada periode 2020 s.d. 2024. Pasca krisis ekonomi tahun 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% per tahun. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di kisaran 5% selama empat tahun terakhir. Pada level pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas akibat lemahnya implementasi reformasi struktural. Proses produktivitas tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berkualitas, baik secara fisik maupun mental, berdampak pada peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa. Sebaliknya, sumber daya manusia yang buruk kualitasnya akan menghambat kemampuan bersaing, terutama di era digital. Kendala lain yang perlu diatasi antara lain buruknya kualitas penerimaan dan belanja pajak, serta infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi konektivitas.

Gambar 4.2 Capaian Sasaran Pembangunan Periode 2020 s.d. 2023



Sumber : (Alatas, 2023)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Suharso Monoalpa memaparkan capaian tujuan pembangunan nasional tahun 2020-2024 secara umum mengalami pencapaian yang baik. Berdasarkan indikator tersebut, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,31% pada tahun 2022 dari target RPJMN sebesar 6,2-6,5% pada tahun 2024. Tingkat investasi

juga meningkat sebesar 3,87% dari target sebesar 6,6-7%. Pada tahun 2022, laju inflasi sebesar 18,3% dari target sebesar 21% pada tahun 2024. Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari target sebesar 6-7% pada tahun 2024 menjadi 9,57% pada tahun 2022.. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berkisar 5,86% dari target sebesar 3,6-4,3%. Rasio gini sebesar 0,381 poin dari target 0,360-0,374 poin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,91% dari nilai target sebesar 25,54%. Berdasarkan hasil evaluasi sementara periode RPJMN tahun 2020-2024, secara umum menunjukkan hasil baik. Namun demikian, keberhasilan pembangunan yang masih di bawah target tahun 2024 masih memerlukan perhatian khusus (Alatas, 2023).

Tabel 4.2 Fokus Pembangunan Masa Pemerintahan Joko Widodo

No.	Fokus Pembangunan	
	RPJMN 2015-2019	RPJMN 2020-2024
1	Pembangunan SDM	Pembangunan SDM
2	Pembangunan infrastruktur	Pembangunan infrastruktur
3	Deregulasi ekonomi	Penyederhanaan regulasi
4	-	Penyederhanaan birokrasi
5	-	Transformasi ekonomi

Sumber : (Kemenkeu, 2024).

Pada RPJMN periode 2020 s.d. 2024, fokus pembangunan nasional lebih disempurnakan lagi dengan menambahkan penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Salah satu bentuk upaya penyederhanaan regulasi yaitu adanya kebijakan *omnibus law*. Secara singkat, *omnibus law* dapat diartikan menyederhanakan banyak aturan hukum yang berbeda menjadi satu aturan hukum tunggal seperti UU Cipta Kerja yang menggabungkan aturan hukum tentang ketenagakerjaan, perizinan berusaha, dan investasi ke dalam satu undang-undang. Penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur, menyelenggarakan *e-government*, dan melakukan reformasi birokrasi pelayanan publik. Tujuan penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk memberikan dukungan kegiatan investasi, menyederhanakan eselonisasi, dan memangkas prosedur birokrasi yang panjang. Pada

penyusunan rencana pembangunan nasional, pemerintah tentu telah mempertimbangkan beberapa hal seperti lingkungan, isu-isu strategis, batasan pembangunan, dan proyek prioritas strategis (Kemenkeu, 2024).

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada lingkungan dan isu-isu strategis semata. Cakupan kebijakan pembangunan berkelanjutan tentu lebih luas, seperti kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, sebagian besar target pembangunan berkelanjutan telah tercermin dalam Nawacita. Target Nawacita diantaranya pengentasan kemiskinan, kemudahan akses kesehatan dan pendidikan, akses energi, serta pembangunan infrastruktur untuk kemandirian ekonomi (Bappeda, 2019). Nawacita jilid II berbeda dengan Nawacita jilid I. Pada Nawacita jilid II, Presiden Joko Widodo lebih menekankan pembangunan untuk meningkatkan sisi sumber daya manusia, sebagai kelanjutan dari Nawacita I yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo memperkenalkan tiga kartu baru sebagai kelanjutan dari program Nawacita jilid II yaitu kartu prakerja, KIP kuliah, dan kartu sembako (Soekarno, 2019).

Program pertama adalah kartu prakerja yang diperkenalkan untuk melengkapi kebijakan perluasan infrastruktur secara besar-besaran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan memastikan tenaga kerja lebih berkualitas. Program kedua, KIP Kuliah, merupakan pelengkap Kartu Indonesia Pintar karena aksesnya terbatas pada jenjang sekolah menengah atas. KIP Kuliah kemudian disempurnakan pada tahun 2021 menjadi KIP Kuliah Merdeka. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses kesempatan belajar bagi masyarakat secara merata dan bermutu bagi kelompok ekonomi kurang mampu atau tidak mampu. Program ketiga adalah kartu sembako yang diluncurkan sebagai pelengkap Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengembangan program Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat dan meningkatkan perlindungan masyarakat agar memiliki akses terhadap pangan yang bergizi.

Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, Indonesia konsisten menjalankan misi besar membangun Indonesia dari timur hingga barat, dimulai dari daerah 3T (daerah tertinggal dan terpencil) dan daerah perbatasan. Pencapaian signifikan diraih sejumlah mega proyek infrastruktur, antara lain pembangunan megaprojek Ibu Kota Nusantara (IKN), penambahan ruas jalan tol sepanjang 2.143 km, pembangunan 27 bandara baru, 295 pelabuhan besar dan kecil. Terdapat 229 bendungan yang beroperasi di 18 wilayah provinsi, sistem irigasi baru di lahan seluas 1,3 juta hektar, dan membangun 39 jalur tol laut dengan 1.070 kapal perintis yang singgah di 115 pelabuhan. Selain itu, selama 10 tahun Indonesia telah menyediakan transportasi modern seperti MRT, LRT, Jakarta-Bandung Express (*Whoosh*), dan membangun jalur kereta api baru dengan total panjang 1.683,44 km, sukses membangun jalur kereta api pertama di Pulau Sulawesi. Keberhasilan pembangunan 65.235 unit rumah dan merenovasi serta memperbaiki 1.770 institusi pendidikan.

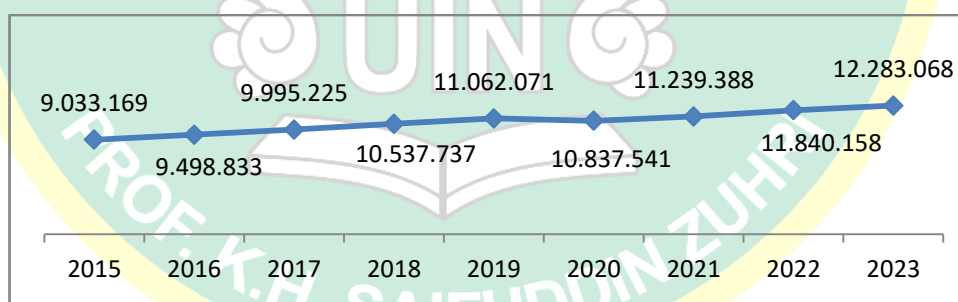
Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan menjadikan lalu lintas perekonomian di Indonesia lebih lancar dan merata. Pembangunan masa pemerintahan Joko Widodo bukan hanya terfokuskan di wilayah Jawa dan Sumatera saja, melainkan mulai menyebar ke wilayah Kalimantan, NTT, Bali, dan Sulawesi. Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mendorong masuknya investasi pada sektor konstruksi, perumahan, dan transportasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat total realisasi investasi 2014-2023 sebesar Rp 8.198,42 triliun. Pembangunan infrastruktur yang masif berhasil membuahkan hasil pencapaian daya saing Indonesia yang meningkat dari peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada tahun 2024 (Cakti, 2024). Sayangnya, pertumbuhan ekonomi masih stagnan di kisaran 5% dan masih belum mencapai target 7% sesuai janji Presiden Joko Widodo. Selain itu, masih ada target yang belum tercapai seperti tingkat kemiskinan, asumsi dasar APBN, dan hutang negara yang bertambah signifikan.

C. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi prioritas utama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan nilai tambah dari kegiatan perekonomian dan kebutuhan hidup masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai proses berkelanjutan dalam mengubah situasi perekonomian suatu negara dan meningkatkan kualitasnya. Suatu negara dapat dikatakan berkembang secara ekonomi apabila kegiatan perekonomian yang dilakukan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi memulai proses pembangunan ekonomi dan sebaliknya, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan peningkatan aktivitas perekonomian melalui produk domestik bruto tingkat nasional dan daerah, yang dinyatakan dalam harga konstan dan harga berlaku.

Grafik 4.1 PDB ADHK Tahun 2010 (Miliar Rupiah)

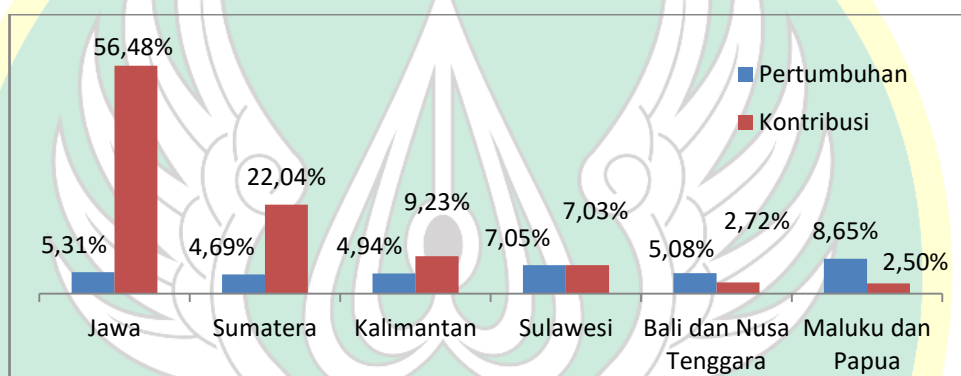


Sumber : (BPS, 2024a)

Data BPS melaporkan bahwa pada tahun 2022 besar PDB Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan PDB sebelum pandemi *covid-19*, baik atas harga berlaku maupun harga konstan. Namun, pada tahun 2019-2021 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2019, sebelum pandemi *covid-19*, PDB Indonesia mencapai Rp 11.062.071 miliar dan

mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% dari PDB sebelumnya yaitu Rp 10.537.737 miliar. Namun, sayangnya pada tahun 2020 pandemi *covid-19* mulai menyerang Indonesia sehingga laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Selama pandemi *covid-19* banyak aktivitas perekonomian mengalami kemerosotan seperti aktivitas konstruksi, industri pengolahan, dan pertambangan. Adanya kebijakan *new normal*, kondisi perekonomian pada tahun 2021 mulai membaik terbukti dari laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan sebesar 3,69% dan PDB sebesar Rp 11.239.388 miliar.

Diagram 4.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Pada Tahun 2022



Sumber : (Santika, 2023)

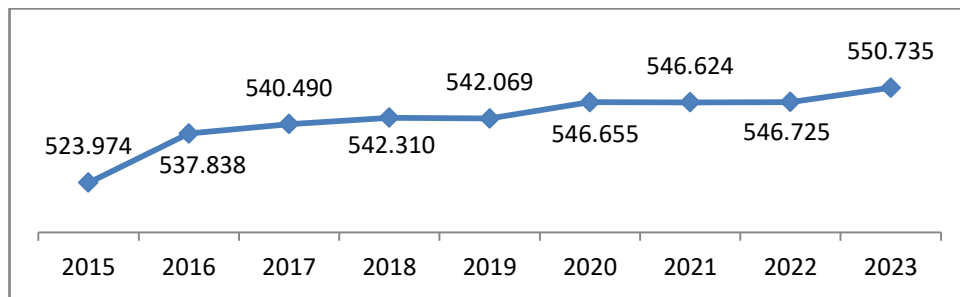
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto menyimpulkan bahwa pada tahun 2022 merupakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang masa pemerintahan Joko Widodo (BPKP, 2023). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan produksi rumah tangga (4,93%), peningkatan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB (3,87%), serta peningkatan ekspor dan impor (16,28% dan 14,75%) (Uly, 2023). Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari pertumbuhan dan kontribusi dari setiap daerah. Pada tahun 2022, kontribusi Pulau Jawa dan Sumatera menjadi daerah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia sebesar 56,48% (c-to-c) dan 22,04%. Jika dilihat dari pertumbuhannya, Pulau Jawa dan Sumatera hanya sebesar 5,31% dan 4,69%. Maluku dan Papua memang memiliki

pertumbuhan tertinggi yaitu 8,65%, tetapi Maluku dan Papua justru berkontribusi paling rendah yaitu hanya 2,50% (Santika, 2023).

Data BPS menjelaskan bahwa pada tahun 2015-2023 besar rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,13%. Jika dilihat, hasil ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada era sebelumnya yaitu tahun 2004-2014 sebesar 5,74% (CNBC Indonesia, 2023). Pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo berkisar antara 4,8% hingga 5,3%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kondisi tidak normal ketika Indonesia dilanda pandemi *covid-19* sehingga membalikkan banyak pencapaian pembangunan yang telah diraih. Kondisi ini tentu menghambat pergerakan perekonomian global sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi jatuh di titik minus dan mengalami pemulihan pada tahun 2021. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,70% pada tahun 2021, pencapaian ini melebihi tahun 2020 yang pertumbuhannya berkontraksi sebesar 2,07% (BPS, 2021).

2. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat lokal karena mobilisasi perekonomian nasional Indonesia saat ini terfokus pada jaringan jalan. Infrastruktur jalan juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan sebuah peluang potensial bagi pengembangan usaha masyarakat. Pada umumnya, pendistribusian barang dan jasa didominasi oleh transportasi darat. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Adanya pengaruh besar jalur darat terhadap perekonomian nasional maka pemerintah harus senantiasa berupaya dalam memperhatikan kualitas dan kuantitas jalan yang ada di Indonesia. Berdasarkan rencana strategis Kementerian PUPR, pada tahun 2015 s.d. 2023 besar dana untuk menyelenggarakan jalan mencapai Rp 489,31 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan jalan tol, peningkatan kapasitas jalan, preservasi jalan dan jembatan (Maesaroh, 2023).

Grafik 4.2 Panjang Jalan di Indonesia Periode 2015 s.d. 2023 (Km)

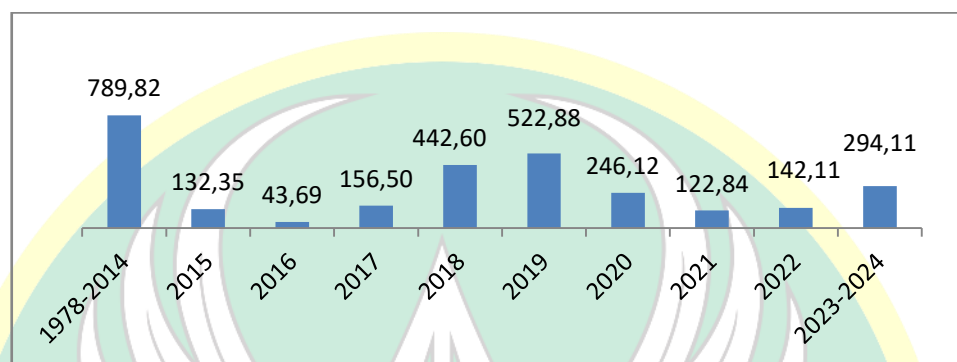
Sumber : (BPS, 2024g)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa panjang jalan di Indonesia mengalami peningkatan dalam 8 tahun terakhir, tahun 2015 s.d. 2023. Berdasarkan data terupdate dari BPS, panjang jalan di Indonesia mencapai 550.735 km pada tahun 2023. Nilai ini meningkat sekitar 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 546.725 km. Kemudian pada tahun 2021, panjang jalan Indonesia yaitu 546.624 km, dilanjut pada tahun 2020 mencapai 546.655 km dan tahun 2019 mencapai 542.069 km. Panjang jalan tahun 2017 dan tahun 2018 juga meningkat mencapai 540.490 km dan 542.310 km. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa panjang jalan di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Jika diamati, grafik data BPS di atas menunjukkan selama tahun 2015 s.d. 2023 panjang jalan di Indonesia mengalami peningkatan sepanjang 26.761 km. Panjang jalan yang awalnya tahun 2015 sebesar 523.974 km menjadi 550.735 km pada tahun 2023 (BPS, 2024g).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, konsep pembangunan Indonesia bertransformasi dari Jawa-Sentris menjadi Indonesia-Sentris. Indonesia-Sentris merupakan konsep pembangunan yang tidak hanya fokus di satu wilayah saja melainkan merata hingga pelosok wilayah Indonesia. Dari segi pembangunan infrastruktur jalan, salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia-Sentris adalah pembangunan jalan tol Trans-Sumatra, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia menyampaikan bahwa pencapaian pembangunan infrastruktur masa pemerintahan Joko Widodo

yaitu penambahan jalan tol sepanjang 1.938 km dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 km (Damayanti, 2024). Adanya penambahan jalan tol dan jalan non-tol akan menghubungkan antardaerah, antarprovinsi, antarpulau, hingga ke wilayah terpencil sehingga menekan biaya transportasi, biaya logistik distribusi pangan, dan lainnya.

Diagram 4.2 Panjang Jalan Tol Beroperasi (Km)



Sumber : (Nugraha, 2024)

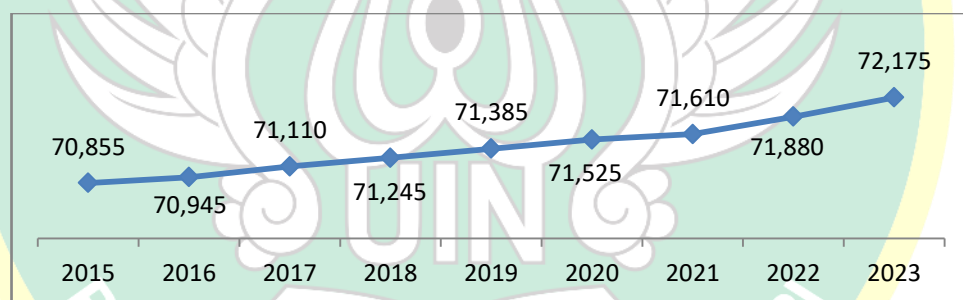
Pembangunan jalan tol dimulai sejak tahun 1978 pada masa pemerintahan Soeharto. Dikutip dari data Kementerian PUPR, panjang jalan sebelum masa pemerintahan Joko Widodo yaitu tahun 1978 s.d. 2014 adalah sepanjang 789,82 km. Selama 10 tahun terakhir, panjang jalan tol mengalami peningkatan yang signifikan. Pada periode pertama Presiden Joko Widodo tahun 2015 s.d. 2019, panjang jalan tol beroperasi yaitu sepanjang 1.298,02 km. Hingga Juni 2024, pembangunan jalan tol beroperasi adalah sepanjang 2.893,02 km. Panjang jalan tol beroperasi sejak masa pemerintahan Joko Widodo mencapai 2.103,2 km. Jika diamati, sebesar 72% panjang jalan tol beroperasi di Indonesia dibangun pada masa pemerintahan Joko Widodo (Nugraha, 2024). Hal ini menjadi bukti bahwa masa pemerintahan Joko Widodo berkomitmen tinggi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, baik jalan tol maupun jalan non-tol meskipun pandemi *covid-19* sedang melanda.

3. Infrastruktur Kesehatan

Secara umum, angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja suatu pemerintah dalam meningkatkan tingkat

kesejahteraan khususnya kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tolak ukur perkiraan usia seseorang bertahan hidup sejak lahir. Apabila angka harapan hidup masyarakat rendah, upaya untuk mendorong pemberdayaan kesehatan masyarakat harus terus dilakukan. Pemberdayaan kesehatan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan, kebersihan lingkungan, nutrisi dan kalori yang tepat, juga mencakup program pengentasan kemiskinan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan angka harapan hidup (Felangi & Yasa, 2021). Perkiraan angka harapan hidup dan jumlah penduduk tiap negara diperoleh dari data sensus. Contoh Indonesia menggunakan data sensus tahun 2020 sebagai acuan. Perkiraan angka harapan hidup seseorang memperhatikan perubahan angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk (BPS, 2024g).

Grafik 4.3 Angka Harapan Hidup (Kedua Jenis Kelamin) Menurut Provinsi (Tahun) di Indonesia Periode 2015 s.d. 2023

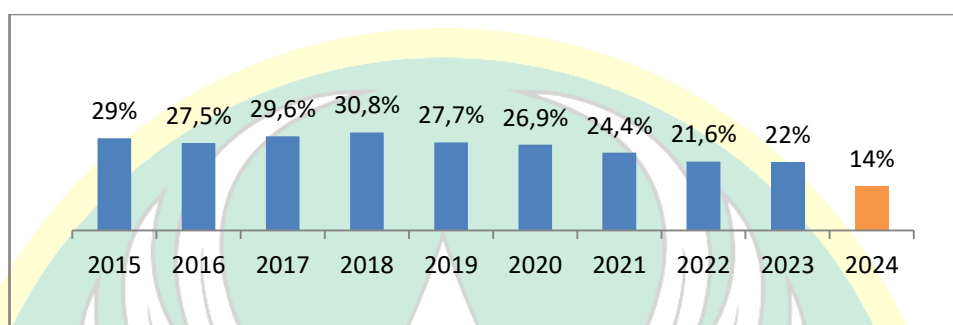


Sumber : (BPS, 2024b)

Pada tahun 2023, perempuan di Indonesia memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, angka harapan hidup (kedua jenis kelamin) tahun 2023 tetap lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup pada tahun 2022 (Santika, 2024). Selama masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2015-2023, angka harapan hidup (kedua jenis kelamin) di Indonesia meningkat sekitar 1,86% dengan angka semula 70,855 tahun menjadi 72,175 tahun pada tahun 2023. Namun, angka harapan hidup Indonesia masih tergolong relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Padahal semakin tinggi angka harapan hidup suatu negara maka peluang warga negara tersebut untuk

berumur panjang semakin baik. Menurut data PBB, pada tahun 2023 Singapura memiliki rata-rata angka harapan hidup tertinggi di Asia Tenggara sebesar 84,3 tahun. Sementara angka harapan hidup negara lain di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kurang dari 75 tahun dengan Myanmar di posisi terakhir sebesar 67,5 tahun (Kameke, 2024).

Diagram 4.3 Prevelensi *Stunting* di Indonesia



Sumber : (Kemenkes BKPK, 2022)

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2023 angka *stunting* di Indonesia hanya turun sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya. Angka *stunting* yang masih tinggi menjadi masalah serius yang akan membahayakan generasi bangsa. Saat ini, Indonesia masih menduduki peringkat 130 dari 199 negara dalam IPM. Oleh karena itu, dalam RPJMN Presiden Joko Widodo menargetkan angka *stunting* dapat diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024 (Handayani, 2023). Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan program jaminan kesehatan (JKN) kepada masyarakat di bawah lembaga BPJS kesehatan. Sejak tahun 2024, sistem kelas dalam BPJS kesehatan dihapus dan diganti dengan sistem rawat inap standar (KRIS) agar kualitas pelayanan meningkat dan pelayanan kesehatan merata. Berdasarkan jumlah peserta JKN yang diselenggarakan BPJS kesehatan, pada tahun 2023 melonjak pesat menjadi 267,3 juta jiwa atau 95,75% dari jumlah penduduk (Novrizaldi, 2024).

Selain itu, Budi Gunadi selaku Menteri Kesehatan juga melakukan transformasi pada bidang kesehatan antara lain (Rokom, 2022):

1. Layanan rujukan. Menyediakan akses dan standar layanan untuk penyakit kematian tertinggi yaitu jantung, kanker, dan stroke.

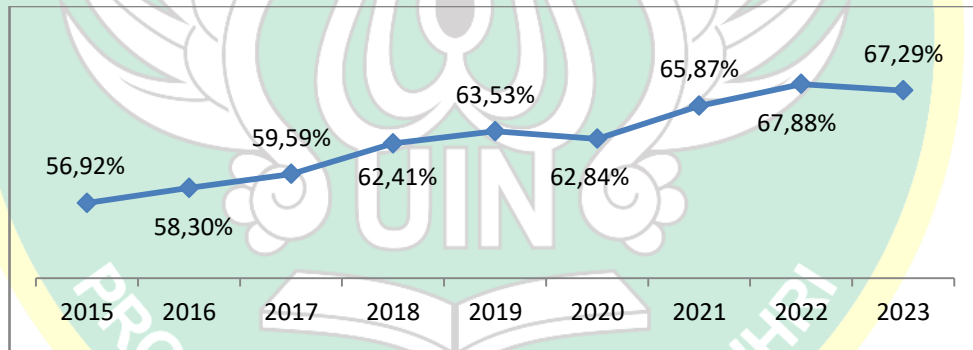
2. Layanan primer. Mereformasi laboratorium kesehatan masyarakat, melakukan revitalisasi posyandu agar lebih formal (tidak hanya melayani ibu dan anak tetapi juga remaja, dewasa, dan lansia), dan menata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan.
 3. Ketahanan kesehatan. Memproduksi vaksin *diagnostik* dan *terapeutik* minimal 50% di dalam negeri.
 4. Pembiayaan kesehatan. Melakukan transparansi dan perhitungan yang bagus seperti menyediakan *annual health account* untuk melapor.
 5. SDM kesehatan. Kebijakan *academic health system* yaitu mengintegrasikan penelitian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Presiden Joko Widodo meningkatkan dokter spesialis yang hanya 0,47 per 1.000 penduduk atau peringkat 9 di ASEAN.
 6. Teknologi kesehatan. Kebijakan aplikasi peduli lindungi, bioteknologi, dan melakukan rekam medis secara digital.
- 4. Infrastruktur Telekomunikasi**

Telekomunikasi merupakan tindakan dalam menyiarkan, mengirim, dan atau menerima sebuah informasi yang berbentuk kode, gambar, tulisan, bunyi, dan suara melalui sistem radio, optik, kawat, dan sistem elektromagnetik lain dengan memanfaatkan sinyal (BPS, 2024g). Telekomunikasi berperan dalam melancarkan pertukaran informasi setiap individu dari jarak jauh sehingga memungkinkan komunikasi, informasi, dan kolaborasi yang lebih efektif dan efisien. Teknologi yang populer dimasyarakat dalam bidang telekomunikasi salah satunya adalah telepon genggam atau telepon seluler. Berbagai kemajuan teknologi telah diperkenalkan, termasuk *smartphone* atau telepon yang lebih fleksibel dan memiliki fitur-fitur canggih. Pemanfaatan teknologi sangat penting dalam upaya menunjang aktivitas perekonomian seperti meningkatkan nilai efisiensi kerja, memberi peluang akses secara inklusif, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis teknologi.

Kementerian Kominfo melakukan beberapa upaya percepatan pemerataan jaringan internet antara lain palapa ring dan *base transceiver*

station (BTS) di wilayah 3T, serta akses internet pada layanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan pos lintas batas negara. Masih berkaitan dengan akses internet, pada masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah melakukan program pembangunan pusat data nasional, *farming refarming* spektrum frekuensi, dan penyediaan akses internet 3G, 4G, dan 5G. Indonesia hanya memiliki cakupan sinyal 4G sebesar 49,33% dari total daratan Indonesia yang berarti 12.548 desa masih belum terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan target pada tahun 2024 berhasil membangun jaringan 4G di daerah yang belum terjangkau dan meluncurkan satelit Satria-1 (HTS) berkapasitas 150 Gbps untuk 150 ribu titik layanan publik seluruh Indonesia. Satria-1 menjadi satelit terbesar di Asia dan ke-5 di dunia. Hingga tahun 2030, Indonesia membutuhkan kapasitas satelit sebesar 1 TB (1.000 GB) per *second* (Effendi, 2022).

Grafik 4.4 Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam di Indonesia Periode 2015 s.d. 2023

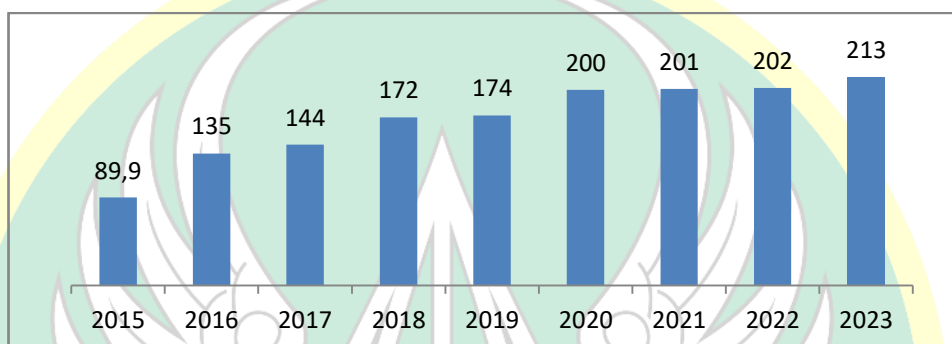


Sumber : (BPS, 2024c)

Selama dekade terakhir, kemajuan telepon genggam dan fitur-fitur canggih termasuk konektivitas internet, kemampuan kamera, dan pelayanan pesan telah mengalami peningkatan yang pesat. Berdasarkan laporan BPS, pada tahun 2023 persentase terendah proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam didominasi oleh provinsi-provinsi bagian timur Indonesia. Papua menjadi salah satu provinsi dengan persentase terendah proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam secara nasional. Proporsi individu yang menguasai/memiliki

telepon genggam pada tahun 2023 di Papua hanya sebesar 37,95% dari total penduduk. Pencapaian tersebut kalah jauh dibandingkan dengan persentase provinsi lain. Selama tahun 2015-2023, proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam meningkat sekitar 10,37% dengan persentase tahun 2015 sebesar 56,92% menjadi 67,29% pada tahun 2023. Penggunaan telepon genggam yang meningkat tentu akan membutuhkan akses jaringan internet yang tinggi, terlebih lagi saat pandemi *covid-19*.

Diagram 4.4 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (Juta Pengguna)



Sumber : (Annur, 2023b)

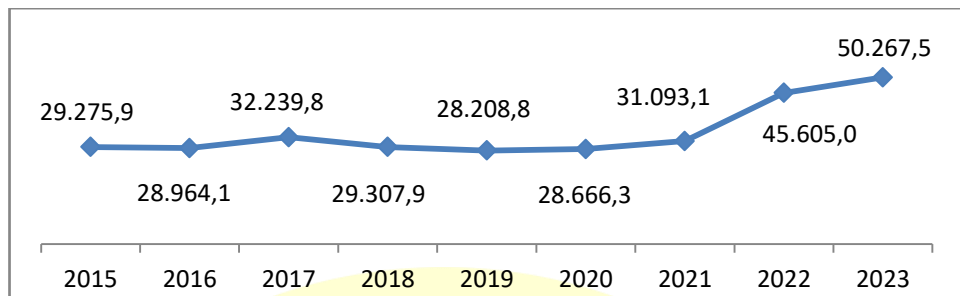
Berdasarkan laporan *We Are Social*, pada Januari 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia akan mencapai 213 juta atau 77% dari total penduduk. *We Are Social* juga melaporkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah pengguna telepon genggam (Annur, 2023b). Pada tahun 2023, sebesar 80% penduduk perkotaan menggunakan internet, sedangkan penduduk di pedesaan hanya sebesar 52% saja. Padahal menurut *International Telecommunication Union (ITU)*, besar kontribusi teknologi digital dalam pencapaian agenda 2030 dan 17 pembangunan SDGs adalah sebesar 70% (Kominfo, 2024). Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa berupaya meningkatkan teknologi dan mengatasi kesenjangan digital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, Presiden Joko Widodo berhasil mendirikan *Indonesia Digital Test House (IDTH)* terbesar dan terlengkap di ASEAN. Pembangunan IDTH diharapkan mampu mendorong penguatan industri digital, menjadi produsen digitalisasi, dan meningkatkan pemasok lokal.

5. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing merupakan suatu bentuk penanaman modal yang diarahkan oleh negara ke negara lain dengan tujuan mencapai hasil produktivitas yang lebih tinggi. Modal tersebut diharapkan mampu meningkatkan output dan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal asing merupakan salah satu pilihan strategis dalam mengatasi permasalahan nasional yang memerlukan dana dengan jumlah besar untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat pandemi *covid-19* melanda dunia, perdagangan dan investasi global mengalami tekanan yang besar. Perdagangan diprediksi jatuh sebesar 13-32% dan penanaman modal asing diperkirakan terpuruk sebesar 30-40%. Pada akhirnya, rantai nilai global ditata ulang untuk mengurangi ketergantungan terhadap China. Kondisi ini dapat menguntungkan negara ASEAN, tetapi Indonesia relatif kurang menarik bagi investor asing dibandingkan negara tetangga. *World Bank* menyoroti bahwa salah satu kendala utama bagi investor asing di Indonesia adalah rumitnya kondisi peraturan yang ada.

Peraturan menteri dan daerah yang banyak dan kerap kali bertentangan akan menyusahakan para investor asing sehingga mereka tidak tertarik untuk berinvestasi. Pemerintah kemudian berupaya dalam menyederhanakan peraturan yang ada dengan menciptakan RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan iklim investasi serta mengantisipasi perekonomian global yang tidak pasti (Patunru & Surianta, 2020). Menurut laporan investasi dunia oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), Asia Tenggara memiliki nilai investasi asing langsung (FDI) sebesar US\$ 222,56 miliar pada tahun 2022. Nilai ini meningkat sebesar 4,58% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Indonesia menjadi negara peraih investasi asing terbesar kedua di Asia Tenggara dengan nilai investasi langsung sebesar US\$ 21,96 miliar. Posisi Indonesia berada di bawah negara Singapura dengan nilai investasi asing langsung mencapai US\$ 141,21 miliar (Annur, 2023a).

Grafik 4.5 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi (Juta US\$) Periode 2015 s.d. 2023



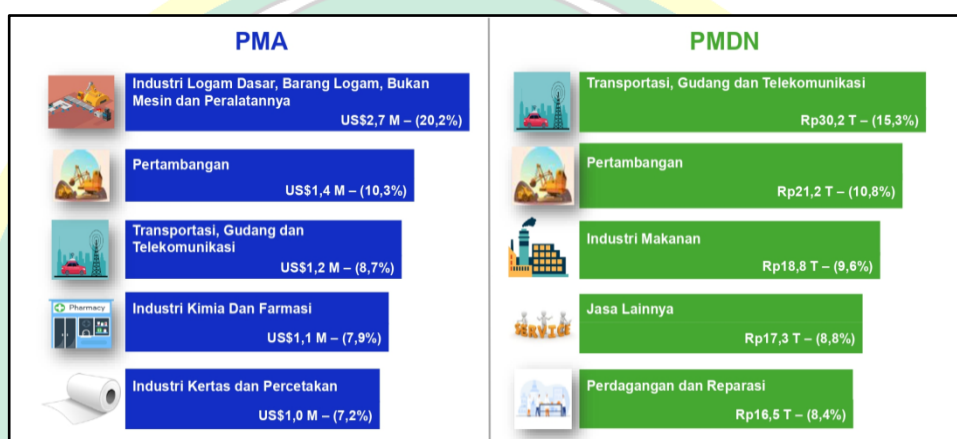
Sumber : (BPS, 2024f)

Pada grafik 4.5, selama 2015 s.d. 2023, realisasi penanaman modal asing di Indonesia mengalami fluktuasi. Hal ini tentu dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, stabilisasi sosial politik, sektor pembiayaan, dan kondisi infrastruktur dasar. Pada tahun 2022, penanaman modal asing di Indonesia mengalami kenaikan tertinggi sebesar 14.511,9 juta US\$. Sebelum tahun 2022, penanaman modal asing di Indonesia mengalami grafik naik turun dengan tahun 2017 dan tahun 2021 mengalami kenaikan. Hingga pada Maret 2024, Menteri Investasi menyampaikan bahwa penanaman modal asing sebesar 50,9% dari seluruh realisasi investasi. Padahal, kondisi perekonomian dunia sedang tidak pasti tetapi Indonesia masih tetap berhasil menajaga penanaman modal asing dengan baik bahkan tumbuh sebesar 15,5% (Sukarta, 2024). Selama masa Pemerintahan Joko Widodo periode 2015 s.d. 2023, realisasi penanaman modal asing Indonesia meningkat sekitar 71% dengan angka semula 29.275,9 juta US\$ menjadi 50.267,5 juta US\$ pada tahun 2023.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa kinerja investasi cukup menggiurkan. Pada tahun 2024, total realisasi investasi triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 428,4 triliun dengan penanaman modal asing terealisasi sebesar Rp 217,3 triliun atau meningkat sebesar 6,3% dari tahun 2023. Saat ini, investor asing mulai menanamkan modalnya ke daerah luar Pulau Jawa. Jawa Barat menjadi provinsi penerima penanaman modal terbanyak sebesar US\$ 2,5 miliar dengan persentase pertumbuhan sebesar 17,5%. Kemudian disusul

dengan provinsi Sulawesi Tengah di posisi kedua dan DKI Jakarta di posisi ketiga (Elena, 2024). Sementara itu, investasi asing mayoritas mengalir pada bidang industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar US\$ 2,7 miliar. Kemudian sektor pertambangan sebesar US\$ 1,4 miliar, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar US\$ 1,2 miliar, sektor industri kimia dan farmasi sebesar US\$ 1,1 miliar, serta sektor infudtri kertas dan percetakan sebesar US\$ 1 miliar.

Gambar 4.3 Peringkat Subsektor Realisasi Triwulan I 2024



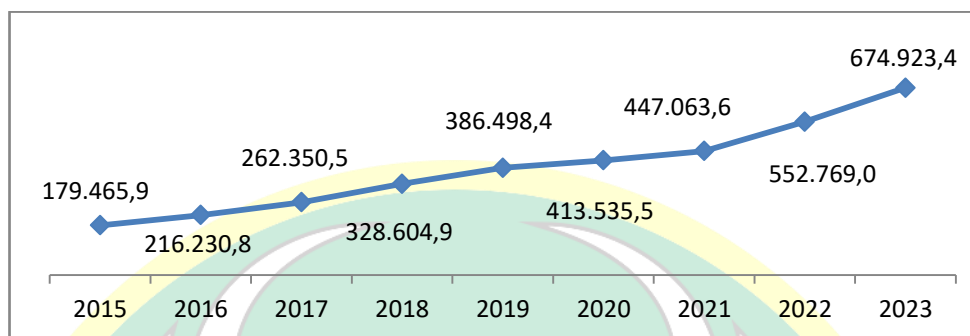
Sumber : (Sukarta, 2024)

6. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri merupakan suatu keadaan menanamkan modal yang dilakukan investor dalam negeri untuk melakukan usaha di dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri menjadi alternatif penting dalam memberikan sumber dana untuk mengelola pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat berupaya meningkatkan penanaman modal dalam negeri dengan langkah-langkah strategis seperti menarik investor di berbagai bidang, menyederhanakan perizinan, menambah kemudahan berinvestasi, memperkenalkan kebijakan dengan berbagai insentif untuk penanaman modal dalam negeri seperti insentif pajak dan pembebasan bea masuk, sehingga dengan langkah strategis yang dilakukan maka sumber dana yang dihasilkan akan lebih besar. Penanaman modal dalam negeri tidak hanya berperan sebagai alternatif sumber dana negara, tetapi juga berperan dalam membuka

kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat, meminimalisir devisa negara, dan mengembangkan industri dalam negeri.

Grafik 4.6 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Miliar Rupiah) Periode 2015 s.d. 2023



Sumber : (BPS, 2024d)

Pada grafik 4.6, penanaman modal dalam negeri sejak tahun 2015 selalu mengalami peningkatan dan berhasil melampaui target pemerintah. Pada tahun 2015, realisasi penanaman modal dalam negeri berhasil melampaui 102,1% dari target pemerintah sebesar Rp 175,8 triliun dengan realisasi sebesar Rp 179.465,9 triliun. Sedangkan pada tahun 2016, realisasi penanaman modal dalam negeri melebihi 103,8% dari target pemerintah sebesar Rp 208,4 triliun atau berhasil terealisasi yaitu sebesar Rp 216.230,8 triliun. Demikian pula pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi *covid-19*, realisasi investasi tetap mampu melampaui target pemerintah. Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada tahun 2020 sebesar Rp 817,2 triliun, dan berhasil tercapai sekitar 10,1% dari target pemerintah Rp 826,3 triliun. Investasi tersebut terdiri dari PMA dan PMDN dengan persentase masing-masing 48,9% dan 50,1%. Realisasi PMA maupun PMDN terbilang cukup seimbang jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (Finaka, 2021).

Pencapaian lain juga dirasakan pada saat pandemi *covid-19* yaitu investasi di Indonesia tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan merata di luar Pulau Jawa. Berdasarkan data BKPM, pada tahun 2019 dan 2020 investasi Pulau Jawa sekitar 53,7% dan 49,5% sementara luar Pulau Jawa meningkat sekitar 46,3% menjadi 50,5% (Kominfo, 2021).

Pemerataan ini merupakan sebuah tanda bahwa investor PMA dan PMDN tidak lagi mempertimbangkan Pulau Jawa sebagai satu-satunya pilihan alternatif dalam menanamkan modal. Hingga tahun 2023, realisasi investasi menurut BKPM tetap konsisten melampaui target pemerintah. Sepanjang tahun 2023, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1.418,9 triliun dengan Rp 674,9 triliun merupakan bagian dari PMDN. Bagian PMDN sekitar 47,6% dari total investasi atau meningkat sekitar 22,1% dari tahun sebelumnya (Annur, 2024b). Selama periode 2015 s.d. 2023, realisasi PMDN meningkat sekitar 276% dengan realisasi semula sebesar Rp 179.465,9 triliun menjadi Rp 674.923,4 triliun pada tahun 2023.

Gambar 4.4 Peringkat Provinsi Realisasi Tertinggi Triwulan II 2024



Sumber : (Elena, 2024)

Realisasi dari penanaman modal dalam negeri sebesar 49,1% dari pencapaian realisasi kuartal I tahun 2024. Penanaman modal dalam negeri tumbuh sebesar 8,7% secara kuartalan dan sebesar 29,7% secara tahunan dengan realisasi Rp 197,1 triliun. Menurut Menteri Investasi, pencapaian realisasi investasi di Indonesia per triwulan I tahun 2024 berhasil mencapai 24,3% dari target Presiden Joko Widodo sebesar Rp 1.650 triliun (Sukarta, 2024). DKI Jakarta menjadi provinsi penerima penanaman modal terbanyak sebesar Rp 34,1 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 16,1%. Kemudian disusul dengan provinsi Jawa Barat di posisi kedua sebesar Rp 25,6 triliun dan Jawa Timur di posisi ketiga sebesar Rp 24,1 triliun (Elena, 2024). Pada masa pemerintah Joko Widodo,

pembangunan nasional mulai menyebar ke provinsi Luar Jawa sehingga pembangunan merata dan pertumbuhan benar akan terjadi. Sementara itu, investasi dalam negeri mayoritas mengalir pada bidang transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar US\$ 2,7 miliar (Sukarta, 2024).

D. Analisis Data Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu kegiatan yang melibatkan penggabungan data mentah dalam jumlah besar sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan. Pada umumnya statistik deskriptif digunakan dalam penelitian untuk menunjukkan karakteristik variabel penelitian yang utama dan membantu memahami karakteristik sekumpulan data dengan memberikan gambaran singkat tentang sampel dan ukuran data.

Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif

Hasil	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
Mean	314.794,7	15.880,10	69,91649	62,37242	988,4993	11.303,92
Median	134.359,5	13.136,00	69,97000	62,85000	417,1000	4.969,500
Max	2.050.466	42.763,00	75,21500	82,47000	8.283,700	95.202,10
Min	20.380,00	3.183,000	64,27000	32,04000	2,000000	0,000000
Std Dev.	447.450,1	10.003,01	2,571192	9,225158	1.438,529	16.326,44
Obs.	306	306	306	306	306	306

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

Statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai *observatio*s dari 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2015-2023 adalahh 306. Jika diamati, nilai rata-rata PDRB Indonesia adalah Rp 314.794,7 miliar dengan nilai tengah sebesar Rp 134.359,5 miliar. Nilai maksimum PDRB Indonesia dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2.050.466 miliar pada tahun 2023 sedangkan nilai minimum PDRB Indonesia dicapai oleh Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 20.380 miliar pada tahun 2015. Jika diamati dari standar deviasinya sebesar Rp 447.450,1 miliar, nilai rata-rata Rp 314.794,7 miliar ternyata lebih rendah dibandingkan standar deviasi

yang berarti terdapat penyimpangan data yang relatif besar terhadap PDRB Indonesia. Semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menggambarkan perekonomian di wilayah tersebut baik.

Pada infrastruktur jalan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai rata-rata panjang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebesar 15.880,10 km. Nilai tengah dari panjang jalan di Indonesia adalah sebesar 13.136 km. Provinsi Jawa Timur memiliki panjang jalan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 42.763 km dan Provinsi Kalimantan Utara memiliki panjang jalan terpendek sebesar 3.183 km pada tahun 2017. Dilihat dari standar deviasinya, nilai rata-rata panjang jalan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai standar deviasi sebesar 10.003,01 km. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan data yang relatif kecil terhadap panjang jalan di Indonesia. Tingginya jumlah panjang jalan akan memberikan kemudahan dalam mengakses wilayah dan berpengaruh terhadap perekonomian wilayah tersebut.

Pada infrastruktur kesehatan, angka harapan hidup (kedua jenis kelamin) di Indonesia memiliki nilai rata-rata sebesar 69,91649% dan nilai tengah sebesar 69,97%. Pada tahun 2023, Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi tertinggi yang memiliki angka harapan hidup (kedua jenis kelamin) sebesar 75,215%. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi terendah yang memiliki angka harapan hidup (kedua jenis kelamin) sebesar 64,27% pada tahun 2015. Ditinjau dari standar deviasinya yaitu sebesar 2,571192% yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, berarti terdapat penyimpangan data yang relatif kecil terhadap angka harapan hidup (kedua jenis kelamin) di Indonesia. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu negara maka pendapatan nasional dan keberhasilan pembangunan kesehatan negara tersebut semakin tinggi.

Pada infrastruktur telekomunikasi, nilai rata-rata individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Indonesia adalah 62,37242% dengan nilai tengah sebesar 62,85%. Proporsi individu yang

menguasai/memiliki telepon genggam tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 sebesar 82,47% dan yang memiliki proporsi terendah adalah Provinsi Papua sebesar 32,04% pada tahun 2015. Jika diamati dari standar deviasinya sebesar 9,225158%, nilai rata-rata 62,37242% ternyata lebih tinggi dibandingkan standar deviasi yang berarti terdapat penyimpangan data yang relatif kecil terhadap individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Semakin tinggi proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dalam suatu wilayah maka menggambar semakin berkembangnya teknologi di wilayah tersebut. Nantinya kualitas jaringan juga akan meningkat seiring pertambahan proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Pada penanaman modal asing menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai rata-rata realisasi penanaman modal asing sebesar 988,4993 juta US\$. Nilai tengah dari realisasi penanaman modal asing di Indonesia adalah sebesar 417,1 juta US\$. Provinsi Jawa Barat memiliki realisasi penanaman modal asing tertinggi pada tahun 2023 sebesar 8.283,7 juta US\$ dan Provinsi Sulawesi Barat memiliki realisasi penanaman modal asing terendah sebesar 2 juta US\$ pada tahun 2015. Dilihat dari standar deviasinya, nilai rata-rata penanaman modal asing memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai standar deviasi sebesar 1.438,529 juta US\$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan data yang relatif besar terhadap realisasi penanaman modal asing di Indonesia. Investasi yang meningkat akan meningkatkan penanaman modal, yang pada gilirannya akan meningkatkan faktor produksi dan meningkatkan peroduktivitas tenaga kerja.

Pada penanaman modal dalam negeri, realisasi penanaman modal dalam negeri di Indonesia memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 11.303,92 miliar dan nilai tengah sebesar Rp 4.969,5 miliar. Pada tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi yang memiliki realisasi penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 95.202,10 miliar. Sedangkan Provinsi Maluku menjadi provinsi terendah yang memiliki realisasi

penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 0 miliar pada tahun 2015. Ditinjau dari standar deviasinya yaitu sebesar Rp 16.326,44 miliar yang berarti lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Hal tersebut berarti terdapat ketimpangan penyimpangan data yang relatif besar terhadap realisasi penanaman modal dalam negeri di Indonesia. Semakin tinggi investasi di suatu wilayah maka akan memperlancar perekonomian di wilayah tersebut, begitu pula sebaliknya.

2. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi data panel didasarkan pada asumsi klasik peneliti dan pemenuhan kriteria pengolahan data statistik yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Model regresi terbaik dipilih dari tiga jenis estimasi yaitu *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.4 Hasil Uji Model Data Panel

	CEM	FEM	REM
R-squared	0,836580	0,994943	0,589350
Adjusted R-squared	0,833856	0,994223	0,582506
F-statistic	307,1517	1.382,382	86,10991
Prob (F-statistic)	0,000000	0,000000	0,000000

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

a. Uji Chow

Uji *Chow* merupakan salah satu pengujian untuk menentukan pilihan estimasi terbaik dalam memproses data antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation : FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	253,369066	(33.267)	0,0000
Cross-section Chi-square	1063,515275	33	0,0000

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

Pada tabel 4.5, nilai distribusi statistik *Cross-section Chi-square* adalah 1063,515275 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Jika dilihat, nilai probabilitas pada *Cross-section F* ternyata lebih kecil dari 0,05 yaitu ($0,0000 < 0,05$) yang berarti model regresi data panel terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Uji Hausman

Uji *Hausman* merupakan salah satu pengujian untuk menentukan pilihan estimasi terbaik dalam memproses data antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation : REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	225,899882	5	0,0000

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

Pada tabel 4.6, nilai distribusi statistik Cross-section random adalah 225,899882 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Jika dilihat, nilai probabilitas ternyata lebih kecil dari 0,05 yaitu ($0,0000 < 0,05$) berarti model regresi data panel terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

c. Uji Langrange Multiplier

Uji *Langrange Multiplier* merupakan salah satu pengujian untuk menentukan pilihan estimasi terbaik dalam memproses data antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pengujian ini sudah tidak perlu lagi dilakukan karena telah melewati uji *chow* dan uji *hausman* yang hasilnya tetap *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih sebagai model terbaik.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* merupakan salah satu pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk memeriksa terdapat korelasi atau tidak antara masing-masing variabel independen yang lebih dari satu. Regresi yang

baik tentunya tidak ditemukan adanya *multikolinearitas*. Apabila model regresi mengalami masalah *multikolinearitas*, maka akan sulit untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji *multikolinearitas* pada penelitian ini dideteksi melalui nilai korelasi masing-masing variabel independen (Basuki, 2021).

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
Infra Jalan	1,000000	0,104607	-0,205761	0,210108	0,365024
Infra Kes	0,104607	1,000000	0,664744	0,304859	0,472159
Infra Telkom	-0,205761	0,664744	1,000000	0,171646	0,348526
PMA	0,210108	0,304859	0,171646	1,000000	0,676474
PMDN	0,365024	0,472159	0,348526	0,676474	1,000000

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

Pada tabel 4.7, semua nilai korelasi setiap variabel independen lebih kecil dari 0,85 yang berarti model regresi terbebas dari masalah *multikolinearitas*.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* merupakan salah satu pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk memeriksa nilai residu seluruh observasi terdistribusi secara merata atau tidak (Priyatno, 2022).

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-390.407,2	301.345,4	-1,295547	0,1963
Infra Jalan	-0,530499	1,125354	-0,471407	0,6377
Infra Kes	6.748,623	4.629,188	1,457842	0,1461
Infra Telekom	-858,8655	498,0245	-1,724545	0,0858
PMA	2,631668	1,635083	1,609501	0,1087
PMDN	-0,2636691	0,154915	-1,702169	0,0899

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

Pada tabel 4.8, nilai probabilitas pada semua variabel independen ternyata lebih besar dari 0,05 yang berarti model regresi terbebas dari masalah *heteroskedastisitas*.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji t (uji secara parsial) merupakan salah satu pengujian hipotesis yang digunakan untuk memeriksa secara individu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dapat menggunakan uji probabilitas 0,05 atau uji t-statistik. Pengambilan keputusan dengan uji t-statistik membutuhkan perhitungan df untuk menentukan t tabel. Adapun perhitungan df yaitu:

$$df = n - k - 1$$

$$df = 34 - 5 - 1$$

$$df = 29$$

Ket : n = sampel penelitian

k = jumlah variabel independen

Nilai df sebesar 29 yang berarti nilai t tabel adalah 2,04523

Tabel 4.9 Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-267.776,0	571.925,6	-0,468201	0,6400
Infra Jalan	6,351514	2,135817	2,973810	0,0032
Infra Kes	5.782,185	8.785,770	0,658131	0,5110
Infra Telekom	242,9472	945,2044	0,257031	0,7974
PMA	7,014926	3,103237	2,260519	0,0246
PMDN	4,896575	0,294014	16,65424	0,0000

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

Pada tabel 4.9 menunjukkan hasil estimasi uji t (uji secara parsial) berupa nilai probabilitas *t-statistic* dari setiap variabel independen. Hasil estimasi dapat dijelaskan secara detail mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent adalah sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur jalan memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,0032 < 0,05$) dengan nilai t-statistik lebih besar dari t tabel ($2,973810 > 2,04523$). Nilai koefisiensi bernilai positif sebesar 6,351514 yang berarti infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
- 2) Infrastruktur kesehatan memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,5110 > 0,05$) dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t tabel ($0,658131 < 2,04523$). Nilai koefisiensi bernilai positif sebesar 5782,185 yang berarti infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
- 3) Infrastruktur telekomunikasi memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,7974 > 0,05$) dengan nilai t-statistik yaitu lebih kecil dari t tabel ($0,257031 < 2,04523$). Nilai koefisiensi bernilai positif sebesar 242,9472 yang berarti infrastruktur telekomunikasi tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
- 4) Penanaman modal asing memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,0246 < 0,05$) dengan nilai t-statistik lebih besar dari t tabel ($2,260519 > 2,04523$). Nilai koefisiensi bernilai positif sebesar 7,014926 yang berarti penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
- 5) Penanaman modal dalam negeri memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), nilai t-statistik yaitu lebih besar dari t tabel ($16,65424 > 2,04523$). Nilai koefisiensi bernilai positif sebesar 4,896575 yang berarti penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

b. Uji F (Uji Secara Simultan)

Uji F (uji secara simultan) merupakan salah satu pengujian hipotesis yang digunakan untuk memeriksa secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dapat menggunakan uji probabilitas 0,05 atau uji F-statistik. Pengambilan keputusan dengan uji F-statistik membutuhkan perhitungan df untuk menentukan F tabel. Adapun perhitungan df adalah:

$$\begin{aligned}\text{Nilai F-tabel} &= \text{df} (k ; n-k) \\ &= \text{df} (5 ; 34-5) \\ &= \text{df} 5 ; 29 = 2,55\end{aligned}$$

Tabel 4.10 Hasil Uji F

F-statistic	1.382,382
Prob (F-Statistic)	0,000000

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

Pada tabel di atas, nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000. Jika dilihat, nilai probabilitas F-statistik ternyata lebih kecil dari 0,05 ($0,000000 < 0,05$). Nilai F-statistik sebesar 1.382,382 lebih besar dari nilai F tabel 2,55 ($1.382,382 > 2,55$) yang berarti secara simultan infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

5. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan salah satu pengujian yang digunakan untuk memeriksa proporsi tingkat kemahiran variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen secara simultan.

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,994943
Adjusted R-squared	0,994223

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

Pada tabel di atas, nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,994223. Hal tersebut menjelaskan bahwa 99% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi.

E. Hasil dan Interpretasi

Pada analisis pemilihan model regresi telah dilakukan beberapa uji estimasi seperti uji *chow* dan uji *hausman*. Hasil dari pengujian terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik untuk memproses data. Berikut hasil estimasi regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan software *Eviews 12*:

Tabel 4.12 Hasil Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-267.776,0	571.925,6	-0,468201	0,6400
Infra Jalan	6,351514	2,135817	2,973810	0,0032
Infra Kes	5.782,185	8.785,770	0,658131	0,5110
Infra Telkom	242,9472	945,2044	0,257031	0,7974
PMA	7,014926	3,103237	2,260519	0,0246
PMDN	4,896575	0,294014	16,65424	0,0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0,994943	Mean dependent var	314.794,7	
Adjusted R-squared	0,994223	S. D. dependent var	447.450,1	
S. E. of regression	34.008,52	Akaike info criterion	23,82518	
Sum squared resid	3,09E+11	Schwarz criterion	24,29975	
Log likelihood	-3.606,252	Hannan-Quinn criter	24,01497	
F-statistic	1.382,382	Durbin-Watson stat	0,785538	
Prob (F-statistic)	0,000000			

Sumber : (Data sekunder diolah, 2024)

Berdasarkan hasil estimasi di atas, persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$PE = -267.776 + 6,351514 \text{ Infra Jalan} + 5.782,185 \text{ Infra Kes} + 242,9472 \text{ Infra Telkom} + 7,014926 \text{ PMA} + 4,896575 \text{ PMDN} + \varepsilon$$

Ket :	PE	:	Pertumbuhan ekonomi
	Infra Jalan	:	Infrastruktur Jalan
	Infra Kes	:	Infrastruktur Kesehatan
	Infra Telkom	:	Infrastruktur Telekomunikasi
	PMA	:	Penanaman Modal Asing (PMA)
	PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
	ε	:	Error

Interpretasi hasil estimasi regresi data panel dapat dijelaskan secara detail dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur jalan secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Hasil pengujian sesuai hipotesis peneliti tentang infrastruktur jalan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada hasil pengujian, nilai koefisien infrastruktur jalan sebesar 6,351514. Artinya, pada setiap kenaikan sebesar 1% infrastruktur jalan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,351514% dengan anggapan variabel lain dianggap konstan. Jalan merupakan infrastruktur penting dalam memperlancar transportasi darat. Infrastruktur jalan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi transaksi perekonomian di suatu wilayah. Apabila suatu wilayah mengalami keterbatasan jalan, maka akan menghambat arus barang dan jasa serta menghambat proses produksi berjalan cepat. Mengingat PDB merupakan ukuran nilai barang dan jasa yang diproduksi, sehingga setiap penurunan produksi dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 8 tahun terakhir secara kualitas dan kuantitas infrastruktur vital termasuk jalan mengalami peningkatan. Adanya peningkatan kualitas dan

kuantitas jalan baik jalan tol maupun jalan non-tol mampu meningkatkan konektivitas wilayah sehingga menurunkan biaya transportasi dan logistik. Selama 10 tahun terakhir, pada tahun 2023 pemerintahan Joko Widodo berhasil menekan biaya logistik menjadi 14% dari 24% (Thenniarti, 2024). Biaya logistik yang semakin rendah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan memperluas jangkauan bisnis bahkan ke daerah terpencil sekalipun. Penurunan biaya logistik menjadi peluang dalam meningkatkan daya saing produk di tengah perkembangan bisnis yang begitu pesat. Selain menurunkan biaya logistik, adanya kualitas dan kuantitas jalan yang meningkat juga akan mengurangi waktu tempuh perjalanan sehingga lebih cepat dan mudah. Perjalanan yang sebelumnya mungkin 5-6 jam, kini mampu ditempuh selama 1-3 jam saja.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Angelina & Wahyuni (2021), Brilyawan & Santosa (2021), dan Kusumawati & Purmiyati (2020) yang juga mengungkapkan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan dengan kualitas dan kuantitas yang baik mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas jalan, sehingga mobilitas barang dan jasa akan lebih mudah dan efisien. Pemanfaatan jalan juga mampu menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas. Hal ini tentu akan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi yang nantinya akan mendorong pembangunan ekonomi. Di sisi lain, jalan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan jalan merupakan landasan terpenting bagi pembangunan daerah terutama di daerah terpencil dan daerah terisolasi.

2. Pengaruh Infrastruktur Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Hasil pengujian tidak sesuai hipotesis peneliti tentang infrastruktur kesehatan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini, kesehatan digambarkan sebagai kualitas

sumber daya manusia. Kesehatan yang baik berperan penting dalam menyediakan SDM yang berkualitas untuk membangun perekonomian. Pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai di negara dengan tingkat kesehatan yang buruk, karena orang dengan kesehatan yang baik diyakini akan lebih produktif. Angka harapan hidup merupakan indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila hal ini tidak diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, maka masyarakat yang memiliki angka harapan hidup tinggi justru menambah beban ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan layanan kesehatan akan lebih banyak, adanya tunjangan pensiun, jaminan sosial, dan kebutuhan lainnya.

Meskipun seseorang memiliki kesehatan yang baik dan umur panjang, jika tidak dibekali dengan keterampilan dan keahlian maka potensi produktivitas yang dimiliki sulit dioptimalkan. Seseorang dengan kesehatan yang baik merupakan modal utama untuk produktivitas, faktanya tingkat pengangguran di kalangan usia produktif masih cukup tinggi. Kemnaker mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia memiliki jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,9 juta jiwa. Mayoritas pengangguran berada di usia 20-24 tahun (2,39 juta jiwa), usia 25-29 tahun (1,21 juta jiwa), dan usia 15-19 tahun (1,12 juta jiwa). Sementara pengangguran usia lansia justru memiliki jumlah yang lebih sedikit (Muhammad, 2023). Pada tahun 2023, sebesar 53,93% penduduk usia lansia di Indonesia masih bekerja (Pratiwi, 2024). Oleh karena itu, menyeimbangkan kesehatan dan pengembangan keahlian serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi lansia yang mau dan bisa bekerja perlu dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Pada tahun 2020 virus *covid-19* mulai masuk ke Indonesia, sehingga separuh pemerintahan Joko Widodo terkena dampak pandemi tersebut. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi pandemi yang sedang berlangsung. Pada akhirnya, Indonesia berhasil mengendalikan pandemi *covid-19* bahkan masuk kategori negara yang melakukan vaksinasi terbanyak di dunia dengan memberikan 432 juta

dosis vaksin (BPMI Setpres, 2022). Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada masalah *stunting* yang relatif tinggi. Masalah *stunting* yang tinggi menggambarkan kualitas SDM di Indonesia masih tergolong rendah. Pada dasarnya, *stunting* sangat berkaitan dengan kecerdasan, kemampuan belajar, keterbelakangan mental, kinerja kognitif otak, bahkan metabolisme anak. Hal ini tentunya akan menghambat tumbuh kembang anak dan menurunkan nilai produktivitas. Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2022 angka *stunting* berhasil turun dari 24,4% menjadi 21,6% dan 21,5% pada tahun 2023 (Handayani, 2023).

Laporan dari Lembaga Riset Swiss yaitu IMD juga mengungkapkan bahwa tingkat daya saing SDM Indonesia menempati posisi ke-47 dari 64 negara (Ahdiat, 2024b). Posisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat daya saing SDM Indonesia masih perlu diperhatikan sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. SDM dengan produktivitas dan inovasi terbatas akan menghasilkan output per pekerja yang lebih rendah dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Angka harapan hidup yang tinggi memang merupakan indikator penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan produktivitas. Upaya peningkatan produktivitas memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kualitas lingkungan kerja. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Amalia (2019), Supto & Lestari (2019) dan Angelina & Wahyuni (2021) yang mengungkapkan bahwa infrastruktur kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur telekomunikasi tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Hasil pengujian tidak sesuai hipotesis peneliti tentang infrastruktur telekomunikasi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini, telekomunikasi digambarkan sebagai

kemampuan literasi digital masyarakat dalam menggunakan telepon genggam. Dikutip dari CNBC Indonesia, tingkat literasi digital di Indonesia hanya mencapai 62%. Angka tersebut masih tergolong rendah di ASEAN yaitu rata-rata 70% (Anam, 2023). Literasi digital yang rendah merupakan pintu terbuka bagi berbagai ancaman siber. Apabila keterampilan pemanfaatan teknologi masih rendah, maka akan menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan siber. Kejahatan siber berpotensi dalam merusak data dan informasi penting dan menghambat aktivitas perekonomian, infrastruktur, bahkan stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi digital juga perlu diperhatikan.

Dikutip dari Kominfo, pada tahun 2023 kejahatan siber meningkat menjadi 70% dari 40% pada tahun 2019. Semakin canggih teknologi dan semakin luas akses jaringan internet, maka kejahatan siber juga akan semakin beragam dan kompleks. Mayoritas individu masih menggunakan teknologi hanya untuk bermain *game* dan *scroll* media sosial. Padahal penggunaan teknologi untuk aplikasi produktif seperti *e-commerce*, *e-government*, dan pembelajaran *online* akan lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. *E-commerce* merupakan mekanisme bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen secara elektronik melalui transaksi, pelayanan, dan informasi (Raharja et al., 2022). Menurut Kemendag, pada tahun 2023, populasi UMKM yang menggunakan *e-commerce* hanya sebesar 33,6% saja dari 65 juta UMKM yaitu sekitar 22 juta (INDEF, 2024). Padahal UMKM memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB. Pada tahun 2021, kontribusi UMKM mencapai 61,07% atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun (Kamsidah, 2022).

Pada saat ini, teknologi seperti kecerdasan buatan (Ai) dan *internet of things* (IoT) semakin berkembang pesat. Perkembangan Ai dan IoT yang tidak digunakan secara bijak dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, seperti mempengaruhi sektor ekonomi, serangan IoT, kebocoran data, menggiring dan menyulut opini publik, serta memicu kasus *plagiarisme*. Pada tahun 2023, APJII menduga terdapat kebocoran

data pribadi dari pihak swasta termasuk 34 juta penduduk terkait paspor. Pada tahun yang sama, data sekitar 337 juta penduduk yang tersimpan di Dukcapil diduga bocor dan data tersebut dijual di *Breach Forums* (Csirt, 2024). Bahkan Indonesia menjadi negara dengan kebocoran data terbesar ke-8 di dunia dengan estimasi 94,22 akun bocor selama tahun 2020 s.d. 2024 (Ahdiat, 2024a). Adanya kebocoran data tentu akan mengakibatkan kerugian ekonomi dan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan keamanan data dan mendorong SDM yang cakap digital.

Jika diamati, beberapa penggunaan teknologi juga masih sebatas untuk gaya hidup dan gengsi semata. Masih banyak orang yang berlomba-lomba memiliki telepon bermerek tanpa memanfaatkan secara optimal fitur-fitur yang lebih canggih. Meskipun tingkat pengguna telepon genggam yang tinggi kerap kali dipandang sebagai indikator kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya masih ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, apabila jaringan internet tidak stabil dan jangkauan kurang luas tentu akan menghambat penggunaan teknologi secara optimal. Kedua, apabila sebagian besar pengguna hanya menggunakan telepon genggam untuk keperluan dasar seperti telepon dan pesan *chat*, maka potensi peningkatan produktivitas dan inovasi akan terbatas. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Angelina & Wahyuni (2021), Ferdian & Satrianto (2022), dan Harsono et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Hasil pengujian sesuai hipotesis peneliti dan teori tentang penanaman modal atau investasi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada hasil pengujian, nilai koefisien penanaman modal asing sebesar 7,014926. Artinya, pada setiap kenaikan sebesar 1% penanaman modal asing akan

menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,014926% dengan anggapan variabel lain dianggap konstan. Penanaman modal asing memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penanaman modal asing dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan manfaat penanaman modal asing dan meminimalkan dampak negatifnya. Selain itu, perusahaan domestik juga perlu mempersiapkan diri untuk bersaing dengan perusahaan asing dan memanfaatkan peluang yang ada.

Penanaman modal atau investasi dalam jangka panjang mampu meningkatkan sumber daya manusia yang dihasilkan dari faktor produksi yaitu tenaga kerja. Dengan demikian tenaga kerja akan melimpah dan nantinya akan memudahkan setiap industri dalam mencari pekerja. Namun, pertimbangan kualitas tenaga kerja juga penting untuk diperhatikan. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pendidikan pelatihan kerja sehingga keahlian dan keterampilan dapat meningkat. Adanya penanaman modal asing yang masuk akan menciptakan lapangan kerja baru yang nantinya juga akan memicu pertumbuhan sektor lain, seperti sektor pendukung yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja. Perusahaan asing seringkali membawa teknologi yang lebih maju, yang menuntut tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih tinggi. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, investasi asing dapat menjadi katalisator bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Yuliani et al., (2023), Kurniawati & Islami (2022), dan Kambono & Marpaung (2020) yang juga mengungkapkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila penanaman modal asing di suatu negara meningkat dari tahun ke tahun, maka hal tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi negara tersebut begitu pula sebaliknya. Sejak tahun 2017, Indonesia telah

naik level sehingga dikategorikan sebagai negara dengan peringkat layak investasi oleh lembaga internasional ternama yaitu *Moody's*, *Fitch*, dan *Standard & Poor's*. Biasanya, masuknya penanaman modal asing sering mengalami *trade-off* politik atau pertimbangan politik yang kompleks. Kondisi ini nantinya akan merugikan masyarakat luas dan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan kebijakan yang saling bertentangan untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih optimal.

5. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Hasil pengujian sesuai hipotesis peneliti dan teori Harrod-Domar (1947) dan Solow-Swan (1956) tentang investasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada hasil pengujian, nilai koefisien penanaman modal dalam negeri sebesar 4,896575. Artinya, pada setiap kenaikan sebesar 1% penanaman modal dalam negeri akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,896575% dengan anggapan variabel lain dianggap konstan. Pada teori ini, investasi atau penanaman modal berperan dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal dalam negeri termasuk investasi yang dibiayai oleh masyarakat Indonesia yang aktif secara ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai penanaman modal dalam negeri maka semakin tinggi pula nilai pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, besar kecilnya PMDN suatu wilayah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Pemerintah terus berupaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha baik secara nasional maupun daerah seperti menyederhanakan proses perizinan yang terus menerus dilakukan sehingga daya tarik investor semakin meningkat. Total realisasi investasi dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan. Peningkatan modal dan tenaga kerja menjadi dua faktor kunci dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika modal (dalam bentuk mesin, teknologi, atau infrastruktur) bertemu dengan tenaga kerja yang berkualitas, produktivitas akan meningkat secara signifikan. Ini berarti, dengan jumlah input yang sama, output yang dihasilkan akan lebih besar. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, peningkatan kualitas tenaga kerja harus menjadi prioritas utama. Dengan investasi yang tepat dalam pendidikan, pelatihan, dan inovasi, negara berkembang dapat mengatasi tantangan dan meraih potensi penuh dari sumber daya manusia yang dimilikinya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Yuliani et al (2023), Aloisius & Panggabean (2023) dan Kurniawati & Islami (2022) yang juga mengungkapkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal dalam negeri dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan output dan mengembangkan usaha. Penanaman modal atau investasi pada sektor-sektor produktif seperti manufaktur, kesehatan, teknologi, pertanian, dan infrastruktur akan memberikan dampak yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penentuan lokasi investasi juga harus dipertimbangkan karena investasi yang terdistribusi secara merata di berbagai daerah akan memberikan dampak yang lebih luas pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan lingkungan investasi yang mendukung untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal dalam negeri.

6. Pengaruh Simultan Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Kesehatan, Infrastruktur Telekomunikasi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

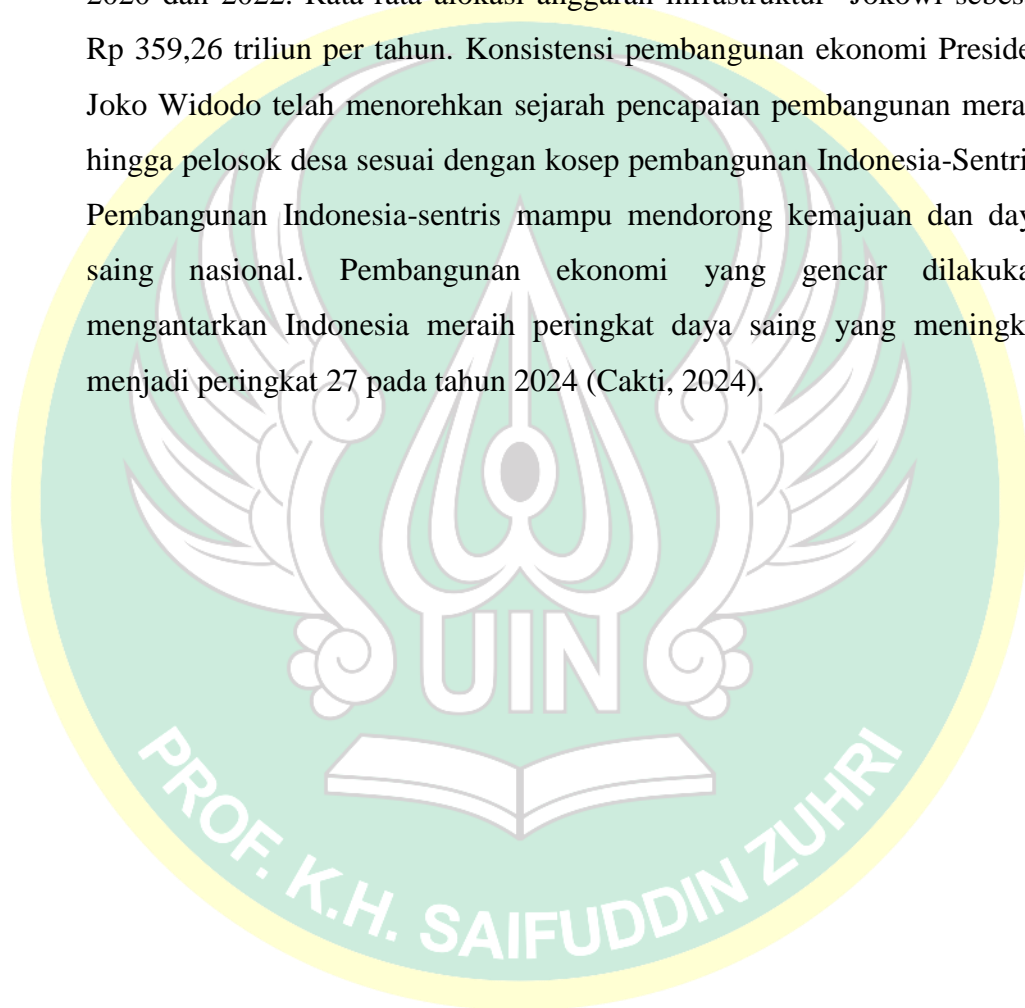
Pada penelitian ini, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur telekomunikasi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko

Widodo. Namun, secara simultan semua variabel independen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena terdapat kontribusi dari variabel independen lainnya yaitu infrastruktur jalan, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Angelina & Wahyuni (2021), ditemukan bahwa infrastruktur (jalan, listrik, air, dan kesehatan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Yuliani et al. (2023) yang menyoroti perekonomian Indonesia dipengaruhi positif oleh penanaman modal asing dan dalam negeri. Selain itu, penelitian Kurniawati & Islami (2022) juga menjelaskan bahwa penanaman modal asing dan dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pembangunan nasional menitikberatkan pembangunan infrastruktur dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo telah gencar melakukan pembangunan infrastruktur sehingga membutuhkan dorongan sumber dana investasi yang cukup besar. Selama periode 2015 s.d. 2023 proyek strategis nasional berhasil diselesaikan sebanyak 173 PSN dengan nilai sekitar Rp 1.442 triliun. Hingga tahun 2024, masih ada sejumlah proyek yang ditargetkan selesai. Pembangunan proyek strategis nasional telah tersebar di beberapa wilayah antara lain 10 PSN di Maluku dan Papua, 16 PSN di Kalimantan, 25 PSN di Sumatra, 17 PSN di Sulawesi, 50 PSN di Jawa, 15 PSN di Bali dan Nusa Tenggara, serta 4 PSN di tingkat nasional (Waluyo, 2023). Capaian pembangunan PSN yang luar biasa tentu saja didukung oleh kemudahan dalam penataan ruang, pembebasan lahan, jaminan nasional, dan penghapusan hambatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.

Pembangunan infrastruktur dan investasi saling berkesinambungan dalam mendorong perekonomian. Kemajuan sektor industri tentunya menjadi salah satu hal yang akan membantu meningkatkan arus investasi masuk ke Indonesia. Pendapatan investasi selama 10 tahun masa

pemerintahan Joko Widodo yaitu mencapai Rp 9.117,4 triliun (Harianto, 2024). Capaian tersebut merupakan salah satu pencapaian penting yang mencerminkan pertumbuhan investasi di Indonesia meningkat. Selama dekade terakhir, anggaran infrastruktur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan alokasi anggaran infrastruktur hanya terjadi dua kali pada masa Presiden Joko Widodo, yaitu anggaran pada tahun 2020 dan 2022. Rata-rata alokasi anggaran infrastruktur Jokowi sebesar Rp 359,26 triliun per tahun. Konsistensi pembangunan ekonomi Presiden Joko Widodo telah menorehkan sejarah pencapaian pembangunan merata hingga pelosok desa sesuai dengan konsep pembangunan Indonesia-Sentris. Pembangunan Indonesia-sentris mampu mendorong kemajuan dan daya saing nasional. Pembangunan ekonomi yang gencar dilakukan mengantarkan Indonesia meraih peringkat daya saing yang meningkat menjadi peringkat 27 pada tahun 2024 (Cakti, 2024).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan mengenai pengaruh infrastruktur sosial-ekonomi, penanaman modal asing (PMA), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2015 s.d. 2023, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Infrastruktur jalan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
2. Infrastruktur kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
3. Infrastruktur telekomunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
4. Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
6. Infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur telekomunikasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengaruh infrastruktur sosial-ekonomi, penanaman modal asing (PMA), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa

pemerintahan Joko Widodo periode 2015 s.d. 2023, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara Empiris

Bagi pemerintah berikutnya diharapkan mampu meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia dalam menyongsong visi Indonesia emas 2045. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus lebih difokuskan pada program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut di antaranya fokus pada program pendidikan, kesehatan, pelatihan, juga dari sisi ketahanan pangan dan energi. Selain itu, peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia juga perlu dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang didorong dengan sumber daya manusia yang memiliki kreativitas dan ketrampilan yang tinggi.

2. Secara Teoritis

Pada penelitian berikutnya, diharapkan mampu meneliti dengan meninjau bahwa sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan indikator yang lebih kompleks seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dari berbagai sektor. Selain itu, peneliti berikutnya juga diharapkan mampu menambah variabel pembangunan infrastruktur dari segi administrasi, bukan hanya pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Ahdiat, A. (2024a). *Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar*. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/c5473708a4f8dc/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>
- Ahdiat, A. (2024b). *Ini Perkembangan Daya Saing SDM Indonesia 5 Tahun Terakhir*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/26/ini-perkembangan-daya-saing-sdm-indonesia-5-tahun-terakhir>
- Aisyah, S., Hasid, Z., & Effendi, A. S. (2022). Pengaruh Investasi Sektor Swasta, Pertumbuhan Ekonomi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(01).
- Al-Machmudi M. Iqbal. (2020). *Peringkat daya Saing Indonesia Turun ke Posisi 40*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/328988/peringkat-daya-saing-indonesia-turun-ke-posisi-40>
- Alatas, M. B. I. (2023). *Sasaran makro pembangunan paruh waktu RPJMN 2020-2024 meningkat*. <https://www.antaranews.com/berita/3474006/sasaran-makro-pembangunan-paruh-waktu-rpjm-2020-2024-meningkat>
- Ali. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Teori-Teori Pendukungnya/Ekonomi Kelas 11*. <https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-pertumbuhan-ekonomi-dan-teori-teori-pendukungnya>
- Aloisius, & Panggabean, M. (2023). Pengaruh PAD, PMDN dan Anggaran Pendidikan terhadap PDRB dan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *MSDJ : Manajemen Sustainable Development Jurnal*, 5(2).
- Amalia, D. (2019). *Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2017)*.
- Amenan, A. & E. N. (2022). *Selain Tol, Jokowi Bangun Infrastruktur Telekomunikasi dan Energi*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/983037/selain-tol-jokowi-bangun-infrastruktur-telekomunikasi-dan-energi>
- Anam, K. (2023). *Paling Rendah di ASEAN, Tingkat Literasi Digital RI Cuma 62%*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214171553-37-413790/paling-rendah-di-asean-tingkat-literasi-digital-ri-cuma-62>
- Angelina, D., & Wahyuni, K. T. (2021). *Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2015-2019*. 733–742.
- Annur, C. M. (2023a). *Indonesia Jadi Negara Tujuan Investasi Asing Terbesar ke-2 di ASEAN*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/07/indonesia-jadi-negara-tujuan-investasi-asing-terbesar-ke-2-di-asean>

- Annur, C. M. (2023b). *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>
- Annur, C. M. (2024a). *Bukan China, Ini Negara Investor Terbesar di Indonesia pada 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/29/bukan-china-ini-negara-investor-terbesar-di-indonesia-pada-2023>
- Annur, C. M. (2024b). *Lampaui Target, Realisasi Investasi 2023 Capai Rp1.418 Triliun*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/24/lampaui-target-realisasi-investasi-2023-capai-rp1418-triliun>
- Aprianto, N. E. K. (2021). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis. *International Journal Administration, Business and Organization (IJABO)* |, 2(1), 1–7. <https://ijabo.a3i.or.id>
- Aurelya, T., Nurhayati, N., & Purba, S. F. (2022). Pengaruh Kondisi Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 83–92. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.752>
- Bappeda. (2019). *Konsep Nawacita dan Pembangunan yang Berkelanjutan*. <https://bappeda.belitung.go.id/konsep-nawacita-dan-pembangunan-yang-berkelanjutan/>
- Bappenas. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*.
- Bappenas. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Menggunakan Eviews) (Pertama)*. Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta.
- BPKP. (2023). *Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen*. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/40655/40684/Ekonomi-Indonesia-Tahun-2022-Tumbuh-531-Persen->
- BPMI Setpres. (2022). *Presiden Jokowi: Indonesia Mampu Hadapi Pandemi dan Krisis Global*. Presiden RI. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-indonesia-mampu-hadapi-pandemi-dan-krisis-global/>
- BPS. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- BPS. (2024a). *[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2022-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjKxIzI=-seri-2010--laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010--menurut-provinsi.html>
- BPS. (2024b). *Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun), 2022-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NT>

AxIzI=/angka-harapan-hidup--ahh--menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin--tahun-.html

- BPS. (2024c). *Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIyMSMy/proporsi-individu-yang-menguasai-memiliki-telepon-genggam-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2024d). *Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Investasi) (Milyar Rupiah), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzkzIzI=/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi--investasi---milyar-rupiah-.html>
- BPS. (2024e). *Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Proyek) (Unit), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzk0IzI=/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi--proyek---unit-.html> BPS
- BPS. (2024f). *Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi (Juta US\$), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg0MCMY/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2024g). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Blora. (2021). *Pandemi Dan Pertumbuhan Ekonomi 2020*. <https://blorakab.bps.go.id/id/news/2021/02/15/118/pandemi-dan-pertumbuhan-ekonomi-2020.html>
- BPS Kabupaten Mempawah. (2023). *Angka Harapan Hidup (Jiwa), 2022*. <https://mempawahkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/angka-harapan-hidup.html>
- BPS Kota Balikpapan. (2024). *Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telpon Genggam*. <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/proporsi-individu-yang-menguasai-memiliki-telpon-genggam>
- BPS Yogyakarta. (2017). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. CV. Lunar Media Sejahtera.
- Brilyawan, K., & Santosa, P. B. (2021). Pengaruh Infrastruktur Sosial dan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), 1–10.
- Cakti, A. (2024). *Capaian Pemerintahan Presiden Jokowi dalam Infrastruktur Dasar*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/4265423/capaian-pemerintahan-presiden-jokowi-dalam-infrastruktur-dasar>
- CNBC Indonesia. (2023). *Kantong Orang RI Makmur Era SBY atau Jokowi, Ini Datanya!* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230607145221-128-443872/kantong-orang-ri-makmur-era-sby-atau-jokowi-ini-datanya>
- CNBC Indonesia. (2024). *Semua Target Ekonomi Jokowi 2023 Nyaris Meleset*,

- Ini Datanya!* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240102162643-128-502142/semua-target-ekonomi-jokowi-2023-nyaris-meleset-ini-datanya>
- CNN Indonesia. (2023). *7 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Bangun Hampir 2.000 KM Jalan Tol*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230328201101-92-930516/7-tahun-jadi-presiden-jokowi-bangun-hampir-2000-km-jalan-tol>
- Csirt. (2024). *Marak Kasus Kebocoran Data, Teknologi Perlindungan Data Mutlak Diperlukan*. <https://naval-csirt.tnial.mil.id/marak-kasus-kebocoran-data-teknologi-perlindungan-data-mutlak-diperlukan/>
- Damayanti, A. (2024). *Capaian Pembangunan 10 Tahun Jokowi: 1.938 Km Tol-4.574 Km Jalan Nasional*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7422196/capaian-pembangunan-10-tahun-jokowi-1-938-km-tol-4-574-km-jalan-nasional>
- Dinata, A. S., & Setyanto, A. R. (2024). Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 220–229. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142>
- Diskominfo Riau. (2021). *Langkah Progresif Kominfo Tuntaskan Infrastruktur TIK*. <https://diskominfotik.riau.go.id/2021/01/29/langkah-progresif-kominfo-tuntaskan-infrastruktur-tik/>
- DPUTR Kabupaten Pati. (2020). *Alasan Pemerintah Jokowi-JK Fokus Bangun Infrastruktur*. <https://dputr.patikab.go.id/berita/detail/alasan-pemerintah-joko-wjk-fokus-bangun-infrastruktur>
- Effendi, S. A. (2022). Realisasi Pembangunan Infrastruktur TIK Serta Potensi dan Tantangannya. *Politik Dan Keamanan Budget Issue Brief*, 02(2775–7978).
- Elena, M. (2024). *5 Provinsi yang Catatkan Realisasi Investasi Tertinggi pada Kuartal II/2024*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240729/9/1786318/5-provinsi-yang-catatkan-realisis-investasi-tertinggi-pada-kuartal-ii2024>
- Fadhlurrahman. (2024). *Daftar Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia Februari 2024*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/daftar-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-februari-2024>
- Fahira, A. D. (2021). Analisis Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Wilayah Asia Tenggara). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1–11.
- Fajriah, R. N., & Kurniawan, R. R. (2022). Perkembangan Kebijakan Ekonomi Islam Masa Khulafah Rasyidin. *Jurnal Al-Ibar*, 1, 15.
- Faturahman, F. (2019). Angka Harapan Hidup Sebagai Intervening Anggaran Kesehatan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.269>
- Felangi, R. P., & Yasa, I. G. W. M. (2021). Analisis Beberapa Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Angka Harapan Hidup Di Kabupaten/Kota Provinsi

- Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(4), 1447–1477.
- Ferdian, F., & Satrianto, A. (2022). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Foreign Direct Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 73–93.
- Finaka, A. W. (2021). *Meski Pandemi, Target Investasi Terlampaui*. <https://www.indonesiabaik.id/videografis/meski-pandemi-target-investasi-terlampaui>
- Gajendrakar, P. (2024). *New Growth Theory*. WallStreetMojo. <https://www.wallstreetmojo.com/new-growth-theory/>
- Ganti, A. (2023). *Exogenous Growth: Definition, Economic Theory, Vs. Endogenous*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/e/exogenous-growth.asp>
- Ghianovan, J. (2023). Furgensi Infrastruktur Dalam Surat An-Nahl Ayat 15 Menurut Ibn Jarir Al-Tabari Dan Hamka. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 3(1), 56–65. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18330>
- Hadimuljono, M. B. (2019). *Infrastruktur Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Mengangkat Daya Saing Negeri* (1st ed.). PT Kompas Media Nusantara.
- Handayani, S. (2023). Selamatkan Generasi Bangsa Dari Bahaya Stunting. *Journal of Midwifery Science and Women's Health*, 3(2), 87–92. <https://doi.org/10.36082/jmswh.v3i2.1082>
- Harianto, M. (2024). *Realisasi Investasi Capai Rp9.117,4 Triliun Selama 10 Tahun Era Jokowi*. <https://www.antaraneews.com/berita/4398837/realisasi-investasi-capai-rp91174-triliun-selama-10-tahun-era-jokowi>
- Hariyanto. (2023). *Menteri Basuki: Infrastruktur Jadi Penentu Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa*. <https://www.industry.co.id/read/124115/menteri-basuki-infrastruktur-jadi-penentu-untuk-meningkatkan-daya-saing-bangsa>
- Harsono, I., Sutanto, H., Rois, I., Fadliyanti, L., & Mulawiani, B. S. W. (2024). Kontribusi Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Ganec Swara*, 18(1), 196–208. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.750>
- Hartarto, A. (2023). *Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*. 1–104.
- Haryadi, W., Wahyudi, M., Samawa, U., Besar, S., Info, A., & History, A. (2021). *Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan raya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten sumbawa. 2013*, 260–267.
- Hasanah, F. T. (2020). Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan Di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 20(13).
- INDEF. (2024). *Peran Platform Digital terhadap Pengembangan UMKM di*

Indonesia. 10–40.

- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). *Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* Elyzabet Indrawati Marpaung. 12(1), 137–145. <http://journal.maranatha.edu>
- Kameke, L. Von. (2024). *Life expectancy at birth in Southeast Asia in 2023, by country*. <https://www.statista.com/statistics/591345/life-expectancy-at-birth-in-south-east-asia/>
- Kamsidah. (2022). *Optimalkan Potensi UMKM terhadap PDB Indonesia melalui Lelang UMKM*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15395/Optimalkan-Potensi-UMKM-terhadap-PDB-Indonesia-melalui-Lelang-UMKM.html>
- Kantor Staf Presiden RI. (2019). *Lima Tahun Maju Bersama - Capaian Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla*. https://ksp.go.id/wp-content/uploads/2019/10/141019_Laporan-5-Tahun-Jokowi-JK_small-1.pdf
- Kemenkes BKPK. (2022). *Buku Saku: Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2021*.
- Kemenkeu RI. (2021). *Hubungan Realisasi Pokok Lelang Terhadap Indikator Pergerakan Ekonomi Gross Domestic Product (GDP)*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/13867/Hubungan-Realisasi-Pokok-Lelang-Terhadap-Indikator-Pergerakan-Ekonomi-Gross-Domestic-Product-GDP.html>
- Kemenkeu RI. (2022). *Upaya Peningkatan Daya Saing Indonesia Melalui Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/14826/Upaya-Peningkatan-Daya-Saing-Indonesia-Melalui-Pembangunan-Infrastruktur-Berkelanjutan.html>
- Kementerian PUPR. (2021). *Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952*.
- Komaro, C. D. (2020). *Analisis Pengaruh Infrastruktur, PMA, dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2011-2018*. Universitas Sebelas Maret.
- Kominfo. (2021). *Realisasi Investasi PMDN dan PMA Triwulan IV 2020*.
- Kominfo. (2024). *Menkominfo Dorong APT Tingkatkan Transformasi Digital Inklusif*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/58065/siaran-pers-no-479hmkominfo082024-tentang-menkominfo-dorong-apt-tingkatkan-transformasi-digital-inklusif/0/siaran_pers
- Kusumawati, N. T. I., & Purmiyati, A. (2020). The Influences of Economic and Social Infrastructure on the Economic Growth in Eastern Indonesia. *International Journal of Management (IJM)*, 11(6), 1957–1962. <http://iaeme.com/Home/journal/IJM1957editor@iaeme.com>
<http://iaeme.com>
<http://iaeme.com/Home/journal/IJM1958>
<http://iaeme.com>

- Latowu, A. P. (2023). *Analisis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Analisis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Lestari, H. P. (2023). *Jumlah Provinsi di Indonesia Bertambah Jadi 38, Ini Daerah yang Mengalami Pemekaran*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230411/79/1645637/jumlah-provinsi-di-indonesia-bertambah-jadi-38-ini-daerah-yang-mengalami-pemekaran>
- Lusi Kurniawati, D., & Sari Islami, F. (2022). Analisis Pengaruh PMA, PMDN dan Ekspor Migas-Nonmigas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis, Dan Keuangan*, 2(13–28). <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Maesaroh. (2023). *Berkuasa 9 Tahun, Jokowi Bangun 70% Tol di Indonesia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230815204758-4-463293/berkuasa-9-tahun-jokowi-bangun-70-tol-di-indonesia>
- Mahriza, T., & Amar B, S. (2019). Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Asing, Tenaga Kerja Dan Infrastruktur Terhadap Perekonomian Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 691. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7697>
- Manggala, G. D. (2020). Analisis Perkembangan dan Proyeksi Perekonomian Indonesia dari Tahun 2014-2020 Setelah Adanya Pandemi Corona. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JESBIS) Vol. 02 No. 01*.
- Mardiana, A., & Habu, A. J. (2020). *Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten gorontalo utara*. 1, 135–148.
- Marlina, L., & Safitri, N. (2023). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.47281/fas.v4i1.125>
- Meiriza, M. S., Marpaung, D. T., Limbong, N., & Tarigan, S. W. B. (2023). Analisis Ekonomi Neo Klasik Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Robert Solow Dan Trevor Swan. *Ekonodinamika Jurnal Ekonomi Dinamis*, 5(4).
- Muhammad, N. (2023). *Mayoritas Pengangguran Indonesia Berusia 20-an Tahun*. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/ketenagakerjaan/statistik/401cd02ef97a823/mayoritas-pengangguran-indonesia-berusia-20-an-tahun>
- Muhammad, N. (2024). *Indonesia, Penyumbang Kunjungan Aplikasi AI Terbanyak ke-3 di Dunia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/indonesia-penyumbang-kunjungan-aplikasi-ai-terbanyak-ke-3-di-dunia>
- Mustami, A. A. (2023). *Perekonomian Indonesia Melambat di Masa Jokowi*. <https://insight.kontan.co.id/news/perekonomian-indonesia-melambat-di-masa-jokowi>
- Nehemia, S. D., & Prasetya, F. (2023). Analisis Pengaruh Penanaman Modal

Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 26–37.

- Novrizaldi. (2024). *Satu Dekade Pembangunan Jaminan Sosial Nasional di Indonesia*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/satu-dekade-pembangunan-jaminan-sosial-nasional-di-indonesia>
- Nugraha, F. (2024). *Jalan Tol Indonesia Mencapai 2.893,02 Km dengan 72% Dibangun pada Era Jokowi*. <https://penjuru.co.id/jalan-tol-indonesia-mencapai-2-89302-km-dengan-72-dibangun-pada-era-jokowi/#>
- Nuritasari, F. (2013). Pengaruh Infrastruktur, PMDN dan PMA Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 456–467.
- Patrimurti, Rianti, & Septiani. (2020). Analisis Pengaruh PMA, PMDN, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah. *Jurnal Ekombis*, 6(2).
- Patunru, A., & Surianta, A. (2020). *Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Pasca Covid-19 Melalui Penyederhanaan Kerangka Kerja Peraturan Indonesia*. 4, 1–9.
- Peraturan Pemerintah RI. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49132/pp-no-34-tahun-2006>
- Peraturan Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161962/pp-no-42-tahun-2021>
- Peraturan Presiden RI. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41764/perpres-no-38-tahun-2015>
- Peraturan Presiden RI. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>
- Pratiwi, F. S. (2024). *Data Persentase Penduduk Lansia Bekerja di Indonesia pada 2023*.
- Prayoga, Y. (2023). *Membangun Infrastruktur Demi Kemaslahatan Umat*. <https://lampung.nu.or.id/opini/membangun-infrastruktur-demi-kemaslahatan-umat-QnTxd>
- Priyatno, D. (2022). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS & Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews* (A. Prabawati (Ed.); Pertama). Cahaya Harapan.
- Purim, Kharisman, H., & Krismanti, Tri, W. (2021). Kontribusi Pembangunan

- Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2019*, 603–612.
- Pusparisa, Y. (2019). *Periode Pertama, Jokowi Gagal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/08/periode-pertama-jokowi-gagal-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi>
- Rachman, A. (2024). *Sri Mulyani Buka-bukaan Capaian Kerja Jokowi dalam 10 Tahun*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240604162003-4-543775/sri-mulyani-buka-bukaan-capaian-kerja-jokowi-dalam-10-tahun>
- Raharja, M. C., Hawa, S. D., & Rianto, S. (2023). Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Keberlanjutan Bisnis UMKM Batik Banyumas Melalui Kinerja Pemasaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Peradaban (JSITP)*, 4(1), 40–44.
- Raharja, M. C., & Lestari, U. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 86–101. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.86-101>
- Raharja, M. C., Rahmatul, H. L., Anisa, D. N., & Widiyawati, E. (2022). Strategi Pemasaran Digital Dalam Mempertahankan Bisnis Knalpot NDK Exhaust Masa Pandemi Covid-19. *Unistek*, 9(2), 106–114. <https://doi.org/10.33592/unistek.v9i2.2361>
- Rawung, A., Lopian, A. L. C. P., & Siwu, H. F. D. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Penanaman Modal Asing (Pma) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2), 14–25.
- Rijkiah, A. F. (2022). *Dampak Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) Pada Pendapatan Pedagang Di Jalan Komisaris Bambang Suprpto-Jenderal Soedirman Purwokerto*. UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Rizaty, M. A. (2023). *Realisasi Investasi Asing ke Indonesia Melonjak 44,2% pada 2022*. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/realisasi-investasi-asing-ke-indonesia-melonjak-442-pada-2022>
- Rokom. (2022). *Deretan Transformasi Kesehatan oleh Menkes Budi. SehatNegeriku*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220531/5640005/deretan-transformasi-kesehatan-oleh-menkes-budi/>
- Santika, E. F. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB 2022, Daerah Mana Penyumbang Terbesar?* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/pertumbuhan-ekonomi-dan-kontribusi-pdrb-2022-daerah-mana-penyumbang-terbesar>
- Santika, E. F. (2024). *Angka Harapan Hidup Perempuan Indonesia Lebih Tinggi dari Laki-laki*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/29/angka-harapan-hidup-perempuan-indonesia-lebih-tinggi-dari-laki-laki>

- Sari, L. N., & Elvira, Y. (2023). *Kerja Sama Internasional untuk Mendukung Pemanfaatan dan Pengembangan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia*. <https://setkab.go.id/kerja-sama-internasional-untuk-mendukung-pemanfaatan-dan-pengembangan-artificial-intelligence-ai-di-indonesia/>
- Schwab, K. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. World Economic Forum. Swiss.
- Soekarno, R. J. (2019). *Program Nawacita Jilid II Jokowi Soal Penguatan SDM Diapresiasi*. <https://Beritajatim.Com/>. <https://beritajatim.com/program-nawacita-jilid-ii-jokowi-soal-penguatan-sdm-diapresiasi>
- Sugiarto, E. C. (2019). *Investasi dan Indonesia Maju*. https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju
- Sugiarto, T. & W. T. S. (2019). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. Alfabeta.
- Sukarta, R. (2024). *Penanaman Modal Asing (PMA) Tumbuh 15,5%*. Investor.Id. <https://investor.id/macroecconomy/360327/penanaman-modal-asing-pma-tumbuh-155>
- Sulasih, S., Novandari, W., & Findianingsih, A. (2023). Dampak Pengangguran, Pendidikan dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 2014-2020. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29240/disclosure.v3i1.6522>
- Sunuputri, G. A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 577. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.694>
- Suripto, & Lestari, E. D. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap PDRB Di Provinsi Indonesia. *Wahana*, 22(1).
- Tari, K. S. (2020). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Deskriptif Pelebaran Jalan Di Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*.
- Thenniarti, D. (2024). *Jokowi: Pembangunan Indonesia Sentris Turunkan Biaya Logistik hingga 14 Persen di 2023*. InfoPublik. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/861498/jokowi-pembangunan-indonesia-sentris-turunkan-biaya-logistik-hingga-14-persen-di-2023>
- Triono, A. L. (2020). *Rais Aam PBNU Jelaskan Prinsip Ekonomi dalam Al-Qur'an*. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/rais-aam-pbnu-jelaskan-prinsip-ekonomi-dalam-al-qur-an-XwSwa>
- Uly, Y. A. (2023). *Rincian Pertumbuhan Ekonomi di Era Jokowi, 2022 Tertinggi*. <https://nasional.kontan.co.id/news/rincian-pertumbuhan-ekonomi-di-era-jokowi-2022-tertinggi>

- UU RI. (2007). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- UU RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- UU RI. (2022a). *Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232726/uu-no-29-tahun-2022>
- UU RI. (2022b). *UU RI Nomor 14 Tahun 2022 dan UU RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi di Papua*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217796/uu-no-14-tahun-2022/>
- Wahyudi, H., & Zapita, J. (2022). Efek Infrastruktur Jalan, Listrik, PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri) bagi Pertumbuhan PDRB di Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitasb (Jastaka)*, 1(2), 139–149. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1420>
- Waluyo, D. (2023). *Capaian Sewindu Proyek Strategis Nasional*. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7800/capaian-sewindu-proyek-strategis-nasional?lang=1>
- Yuliani, N. M., Faudi, A. B., & Helmi, S. G. Y. (2023). Pengaruh PMA dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 6(2), 43–50.
- Yuniar, R. W. (2019). *Tantangan Ekonomi Jokowi 2019-2024: Dari Investor Henggang, Daya Saing “Lemah”, Hingga Utang Yang Membengkak*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50097558>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Data Penelitian

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
ACEH	2015	112.666	23.824	69,54	51,50	21,2	4.192,4
ACEH	2016	116.374	22.810	69,57	52,97	134,5	2.456,1
ACEH	2017	121.241	24.019	69,59	54,20	23,2	782,8
ACEH	2018	126.824	23.915	69,70	59,05	71,2	970,0
ACEH	2019	132.070	23.897	69,92	57,75	137,5	3.606,9
ACEH	2020	131.581	23.632	69,98	59,60	51,1	8.241,1
ACEH	2021	135.274	23.650	70,01	61,20	203,3	7.904,7
ACEH	2022	140.972	23.660	70,21	62,65	127,6	4.424,2
ACEH	2023	146.932	23.660	70,39	62,87	248,6	8.883,3
SUMATERA UTARA	2015	440.956	40.528	68,34	52,87	1.246,1	4.287,4
SUMATERA UTARA	2016	463.775	40.773	68,39	54,28	1.014,7	4.864,2
SUMATERA UTARA	2017	487.531	39.543	68,39	55,50	1.514,9	11.683,6
SUMATERA UTARA	2018	512.763	39.114	68,63	59,45	1.227,6	8.371,8
SUMATERA UTARA	2019	539.514	40.388	69,00	60,66	379,5	19.749,0
SUMATERA UTARA	2020	533.746	40.956	69,15	59,56	974,8	18.189,5
SUMATERA UTARA	2021	547.652	40.739	69,28	65,05	580,4	18.484,5
SUMATERA UTARA	2022	573.529	40.765	69,63	67,71	1.316,1	22.789,2
SUMATERA UTARA	2023	602.236	40.979	70,03	67,42	1.181,3	21.574,0

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
SUMATERA BARAT	2015	140.719	23.598	68,70	57,04	57,1	1.552,5
SUMATERA BARAT	2016	148.134	23.434	68,78	57,94	79,3	3.795,6
SUMATERA BARAT	2017	155.984	22.556	68,82	59,44	194,4	1.517,0
SUMATERA BARAT	2018	163.996	22.388	69,05	62,83	180,8	2.309,4
SUMATERA BARAT	2019	172.206	22.351	69,36	62,62	157,1	3.026,6
SUMATERA BARAT	2020	169.427	22.351	69,52	61,83	125,6	3.106,2
SUMATERA BARAT	2021	175.000	22.649	69,64	65,34	67,0	4.183,7
SUMATERA BARAT	2022	182.629	20.999	69,94	68,24	95,6	2.559,8
SUMATERA BARAT	2023	191.071	22.602	70,24	67,78	120,7	4.488,2
RIAU	2015	448.992	26.842	70,98	62,10	653,4	9.943,0
RIAU	2016	458.769	27.040	71,00	62,98	869,1	6.613,7
RIAU	2017	470.984	24.992	71,02	63,64	1.061,1	10.829,8
RIAU	2018	482.065	24.497	71,22	67,74	1.032,9	9.056,4
RIAU	2019	495.607	24.320	71,53	67,29	1.034,0	26.292,2
RIAU	2020	489.996	24.115	71,65	66,35	1.078,0	34.117,8
RIAU	2021	506.472	24.293	71,72	70,57	1.921,4	24.997,8
RIAU	2022	529.533	24.206	71,97	73,47	2.748,7	43.062,0
RIAU	2023	551.828	24.206	72,29	72,40	2.042,3	48.243,3
JAMBI	2015	125.037	13.886	70,61	58,68	107,7	3.540,2
JAMBI	2016	130.501	13.731	70,66	58,49	61,0	3.884,4

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
JAMBI	2017	136.502	13.027	70,71	60,08	76,8	3.006,6
JAMBI	2018	142.902	13.092	70,85	64,29	101,9	2.876,5
JAMBI	2019	149.111	13.126	71,04	64,75	54,6	4.437,4
JAMBI	2020	148.354	13.131	71,17	64,06	27,0	3.511,7
JAMBI	2021	153.851	13.141	71,26	67,32	50,9	6.204,2
JAMBI	2022	161.730	13.202	71,53	69,64	39,2	8.882,7
JAMBI	2023	169.269	13.353	71,82	69,23	45,1	8.939,0
SUMATERA SELATAN	2015	254.045	18.260	69,19	53,66	645,8	10.944,1
SUMATERA SELATAN	2016	266.857	18.821	69,22	56,48	2.793,5	8.534,1
SUMATERA SELATAN	2017	281.571	19.233	69,23	57,01	1.182,9	8.200,2
SUMATERA SELATAN	2018	298.484	18.989	69,46	61,12	1.078,6	9.519,8
SUMATERA SELATAN	2019	315.465	19.175	69,71	60,70	736,5	16.921,1
SUMATERA SELATAN	2020	315.129	19.606	69,93	60,68	1.543,9	15.824,5
SUMATERA SELATAN	2021	326.405	19.606	70,03	64,53	1.259,7	16.266,9
SUMATERA SELATAN	2022	343.460	19.587	70,34	66,25	1.226,3	23.526,0
SUMATERA SELATAN	2023	360.911	19.838	70,71	66,23	1.478,6	25.602,4
BENGGKULU	2015	38.066	9.230	68,54	55,86	20,6	553,9
BENGGKULU	2016	40.077	9.237	68,56	55,84	55,7	949,1
BENGGKULU	2017	42.074	9.196	68,58	58,30	138,7	296,5
BENGGKULU	2018	44.164	9.327	68,83	60,31	136,6	4.902,8

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
BENGKULU	2019	46.345	9.239	69,21	61,18	144,8	5.458,1
BENGKULU	2020	46.338	9.239	69,37	60,19	192,3	5.399,2
BENGKULU	2021	47.854	9.191	69,47	64,34	23,7	4.923,5
BENGKULU	2022	49.916	9.228	69,71	66,81	52,2	6.957,3
BENGKULU	2023	52.041	9.228	69,97	66,49	76,1	7.218,7
LAMPUNG	2015	199.537	17.603	69,94	52,73	257,7	1.102,3
LAMPUNG	2016	209.794	21.162	69,97	55,07	85,7	6.031,8
LAMPUNG	2017	220.626	21.044	69,98	56,44	120,6	7.014,8
LAMPUNG	2018	232.166	20.759	70,21	59,81	132,3	12.314,7
LAMPUNG	2019	244.378	20.759	70,56	61,54	155,2	2.428,9
LAMPUNG	2020	240.320	20.759	70,70	59,03	498,4	7.120,5
LAMPUNG	2021	246.966	20.759	70,78	63,83	173,8	10.513,2
LAMPUNG	2022	257.534	20.765	71,02	66,08	247,8	5.809,2
LAMPUNG	2023	269.241	20.677	71,30	65,00	220,6	7.625,8
KEP. BANGKA BELITUNG	2015	45.962	5.525	69,93	61,81	82,7	1.023,7
KEP. BANGKA BELITUNG	2016	47.848	5.433	69,97	62,12	52,7	2.202,0
KEP. BANGKA BELITUNG	2017	49.985	5.485	69,99	63,43	153,1	1.734,7
KEP. BANGKA BELITUNG	2018	52.208	5.536	70,22	68,41	46,3	3.112,9
KEP. BANGKA BELITUNG	2019	53.942	5.418	70,55	67,77	88,7	2.915,2
KEP. BANGKA BELITUNG	2020	52.706	5.418	70,68	66,61	48,4	1.863,8

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
KEP. BANGKA BELITUNG	2021	55.370	5.783	70,78	68,22	44,7	3.677,4
KEP. BANGKA BELITUNG	2022	57.805	5.891	71,02	73,16	129,7	6.309,0
KEP. BANGKA BELITUNG	2023	60.338	5.891	71,28	71,43	72,5	7.961,4
KEP. RIAU	2015	155.131	5.338	69,46	74,17	640,4	612,1
KEP. RIAU	2016	162.853	5.552	69,49	73,77	519,1	492,5
KEP. RIAU	2017	166.082	5.686	69,50	73,35	1.031,5	1.398,0
KEP. RIAU	2018	173.499	5.686	69,66	74,11	831,3	4.386,0
KEP. RIAU	2019	181.878	5.686	69,83	76,39	1.363,4	5.656,4
KEP. RIAU	2020	174.959	5.686	69,99	74,33	1.649,4	14.249,0
KEP. RIAU	2021	180.952	5.686	70,16	81,83	1.043,7	9.768,7
KEP. RIAU	2022	190.164	5.688	70,53	79,88	934,0	4.817,4
KEP. RIAU	2023	200.044	5.688	70,97	80,37	764,1	8.856,6
DKI JAKARTA	2015	1.454.564	7.094	72,48	76,93	3.619,4	15.512,7
DKI JAKARTA	2016	1.539.917	7.094	72,57	75,78	3.398,2	12.216,9
DKI JAKARTA	2017	1.635.359	6.732	72,60	76,99	4.595,0	47.262,3
DKI JAKARTA	2018	1.735.208	6.732	72,72	76,16	4.857,7	49.097,4
DKI JAKARTA	2019	1.836.241	6.485	72,82	78,42	4.123,0	62.094,8
DKI JAKARTA	2020	1.792.291	6.485	72,95	77,57	3.613,3	42.954,7
DKI JAKARTA	2021	1.856.001	6.485	73,06	67,83	3.330,6	54.708,2
DKI JAKARTA	2022	1.953.489	6.485	73,34	82,27	3.744,1	89.223,6

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
DKI JAKARTA	2023	2.050.466	6.485	73,75	82,47	4.830,0	95.202,1
JAWA BARAT	2015	1.207.232	26.274	72,45	59,50	5.738,7	26.272,9
JAWA BARAT	2016	1.275.619	26.533	72,48	60,99	5.470,9	30.360,2
JAWA BARAT	2017	1.343.662	26.980	72,50	62,55	5.142,9	38.390,6
JAWA BARAT	2018	1.419.624	27.545	72,69	65,01	5.573,5	42.278,2
JAWA BARAT	2019	1.490.960	27.617	72,92	66,24	5.881,0	49.284,2
JAWA BARAT	2020	1.453.381	28.218	73,15	64,83	4.793,7	51.400,5
JAWA BARAT	2021	1.507.746	28.178	73,38	62,76	5.217,7	59.948,5
JAWA BARAT	2022	1.589.985	28.393	73,63	70,37	6.534,5	80.808,3
JAWA BARAT	2023	1.669.417	29.756	74,10	68,87	8.283,7	88.012,9
JAWA TENGAH	2015	806.765	27.545	74,00	54,97	850,4	15.410,7
JAWA TENGAH	2016	849.099	31.180	74,05	56,41	1.030,8	24.070,4
JAWA TENGAH	2017	893.750	30.394	74,09	57,62	2.372,5	19.866,0
JAWA TENGAH	2018	941.091	30.607	74,19	60,47	2.372,7	27.474,9
JAWA TENGAH	2019	991.517	30.667	74,25	61,66	2.723,2	18.654,7
JAWA TENGAH	2020	965.227	30.667	74,41	60,87	1.363,6	30.606,1
JAWA TENGAH	2021	997.321	30.544	74,52	62,76	1.465,9	31.311,2
JAWA TENGAH	2022	1.050.278	30.819	74,62	65,15	2.362,0	24.992,3
JAWA TENGAH	2023	1.102.563	31.678	74,79	64,74	1.563,7	32.987,2
DI YOGYAKARTA	2015	83.474	3.874	74,72	64,79	89,1	362,4

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
DI YOGYAKARTA	2016	87.686	3.776	74,73	64,57	19,6	948,6
DI YOGYAKARTA	2017	92.300	4.377	74,76	65,73	36,5	294,6
DI YOGYAKARTA	2018	98.024	4.370	74,84	68,32	81,3	6.131,7
DI YOGYAKARTA	2019	104.485	4.361	74,95	67,66	14,6	6.298,8
DI YOGYAKARTA	2020	101.699	4.361	75,03	67,62	9,7	2.683,4
DI YOGYAKARTA	2021	107.373	4.338	75,08	69,81	21,8	2.761,3
DI YOGYAKARTA	2022	112.901	4.449	75,11	70,37	113,9	2.275,0
DI YOGYAKARTA	2023	118.627	4.449	75,22	71,37	46,0	5.015,5
JAWA TIMUR	2015	1.331.376	41.740	70,73	55,29	2.593,4	35.489,8
JAWA TIMUR	2016	1.405.564	41.834	70,74	57,21	1.941,0	46.331,6
JAWA TIMUR	2017	1.482.300	40.955	70,76	58,30	1.566,7	45.044,5
JAWA TIMUR	2018	1.563.442	40.963	70,93	60,66	1.333,4	33.333,1
JAWA TIMUR	2019	1.649.896	41.587	71,23	62,16	866,3	45.452,7
JAWA TIMUR	2020	1.611.393	42.763	71,35	61,82	1.575,5	55.660,6
JAWA TIMUR	2021	1.668.754	42.521	71,43	62,99	1.849,2	52.552,2
JAWA TIMUR	2022	1.757.875	42.422	71,76	65,22	3.134,0	65.355,9
JAWA TIMUR	2023	1.844.809	42.466	72,16	64,60	4.741,0	74.937,4
BANTEN	2015	368.377	6.969	69,48	60,49	2.542,0	10.709,9
BANTEN	2016	387.835	6.967	69,49	60,92	2.912,1	12.426,3
BANTEN	2017	410.137	6.927	69,52	61,63	3.047,5	15.141,9

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
BANTEN	2018	433.783	6.817	69,67	64,25	2.827,3	18.637,6
BANTEN	2019	456.620	5.717	69,89	65,21	1.868,2	20.708,4
BANTEN	2020	441.149	5.712	70,01	64,40	2.143,6	31.145,7
BANTEN	2021	460.953	5.712	70,07	68,20	2.190,0	25.989,5
BANTEN	2022	484.131	5.715	70,41	70,25	3.410,7	31.283,9
BANTEN	2023	507.427	6.128	70,82	69,87	4.451,6	37.971,7
BALI	2015	129.127	7.879	71,40	63,77	495,8	1.250,4
BALI	2016	137.296	8.361	71,44	65,19	450,6	482,3
BALI	2017	144.933	8.678	71,47	66,24	886,9	592,5
BALI	2018	154.073	8.722	71,69	67,99	1.002,5	1.548,8
BALI	2019	162.693	8.758	72,00	69,61	426,0	7.393,2
BALI	2020	147.499	8.805	72,16	69,93	293,3	5.432,7
BALI	2021	143.872	8.787	72,28	71,65	452,0	6.355,2
BALI	2022	150.830	8.656	72,61	72,82	449,5	6.002,1
BALI	2023	159.448	8.864	73,03	73,20	808,5	6.950,8
NUSA TENGGARA BARAT	2015	89.338	8.169	65,43	45,26	699,4	347,8
NUSA TENGGARA BARAT	2016	94.524	8.223	65,47	47,79	439,0	1.342,8
NUSA TENGGARA BARAT	2017	94.608	8.525	65,50	48,96	132,1	5.413,5
NUSA TENGGARA BARAT	2018	90.349	8.504	65,82	53,88	251,6	4.135,1
NUSA TENGGARA BARAT	2019	93.872	8.504	66,24	57,10	270,7	3.519,0

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
NUSA TENGGARA BARAT	2020	93.289	8.504	66,51	56,36	302,1	6.582,4
NUSA TENGGARA BARAT	2021	95.438	8.504	66,74	59,16	244,2	9.090,5
NUSA TENGGARA BARAT	2022	102.074	8.509	67,11	61,11	704,6	11.031,5
NUSA TENGGARA BARAT	2023	103.906	8.509	67,52	61,48	468,4	30.766,2
NUSA TENGGARA TIMUR	2015	56.771	21.752	66,00	36,65	69,9	1.295,7
NUSA TENGGARA TIMUR	2016	59.678	22.686	66,05	37,96	58,2	822,2
NUSA TENGGARA TIMUR	2017	62.725	23.193	66,08	40,97	139,0	1.081,9
NUSA TENGGARA TIMUR	2018	65.929	23.635	66,40	43,91	100,4	4.246,1
NUSA TENGGARA TIMUR	2019	69.389	23.571	66,90	45,01	126,8	3.752,6
NUSA TENGGARA TIMUR	2020	68.810	23.656	67,06	44,12	81,3	3.028,5
NUSA TENGGARA TIMUR	2021	70.541	23.656	67,20	51,92	79,0	3.742,6
NUSA TENGGARA TIMUR	2022	72.695	24.050	67,49	52,73	73,3	3.459,3
NUSA TENGGARA TIMUR	2023	75.258	24.050	67,81	51,36	124,3	3.407,2
KALIMANTAN BARAT	2015	112.347	15.750	69,92	51,89	1.335,7	6.143,5
KALIMANTAN BARAT	2016	118.183	17.948	69,94	53,94	630,7	9.015,5
KALIMANTAN BARAT	2017	124.289	18.234	69,95	54,73	568,4	12.380,9
KALIMANTAN BARAT	2018	130.596	18.315	70,21	58,25	491,9	6.591,4
KALIMANTAN BARAT	2019	137.243	18.315	70,61	58,57	532,3	7.699,1
KALIMANTAN BARAT	2020	134.743	18.315	70,74	58,11	759,3	9.256,5
KALIMANTAN BARAT	2021	141.212	18.315	70,81	62,39	463,4	10.773,4

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
KALIMANTAN BARAT	2022	148.369	18.284	71,04	64,69	745,5	9.382,9
KALIMANTAN BARAT	2023	154.981	18.505	71,37	64,82	490,5	14.892,0
KALIMANTAN TENGAH	2015	78.891	15.081	69,58	63,29	933,6	1.270,1
KALIMANTAN TENGAH	2016	83.900	17.447	69,59	62,89	408,2	8.179,1
KALIMANTAN TENGAH	2017	89.545	17.939	69,60	65,64	641,0	3.037,8
KALIMANTAN TENGAH	2018	94.566	17.987	69,65	68,20	678,5	13.091,6
KALIMANTAN TENGAH	2019	100.349	18.686	69,70	70,28	283,5	8.591,9
KALIMANTAN TENGAH	2020	98.934	18.800	69,75	68,56	177,6	3.710,0
KALIMANTAN TENGAH	2021	102.481	18.809	69,81	71,62	162,5	6.359,8
KALIMANTAN TENGAH	2022	109.095	18.906	70,05	72,83	548,3	6.556,8
KALIMANTAN TENGAH	2023	113.612	18.923	70,33	73,11	697,6	8.779,5
KALIMANTAN SELATAN	2015	110.863	12.805	67,84	62,74	961,2	2.060,4
KALIMANTAN SELATAN	2016	115.744	13.623	67,88	63,97	249,4	6.163,0
KALIMANTAN SELATAN	2017	121.859	13.614	67,97	65,42	243,8	2.981,9
KALIMANTAN SELATAN	2018	128.053	13.447	68,18	66,04	129,2	9.975,2
KALIMANTAN SELATAN	2019	133.284	13.440	68,50	68,97	372,9	10.061,0
KALIMANTAN SELATAN	2020	130.864	13.440	68,69	67,69	240,8	4.286,3
KALIMANTAN SELATAN	2021	135.425	13.440	68,88	69,49	117,2	11.003,9
KALIMANTAN SELATAN	2022	142.341	13.477	69,18	70,51	208,1	12.310,4
KALIMANTAN SELATAN	2023	149.231	13.648	69,47	68,98	327,9	14.909,4

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
KALIMANTAN TIMUR	2015	440.676	12.463	73,71	74,43	2.381,4	9.611,3
KALIMANTAN TIMUR	2016	439.004	12.146	73,72	74,47	1.139,6	6.885,1
KALIMANTAN TIMUR	2017	452.742	13.333	73,74	74,30	1.285,2	10.980,2
KALIMANTAN TIMUR	2018	464.694	13.558	74,00	76,36	587,5	25.942,0
KALIMANTAN TIMUR	2019	486.523	12.587	74,27	76,88	861,0	21.952,0
KALIMANTAN TIMUR	2020	472.393	12.587	74,38	76,71	378,0	25.934,0
KALIMANTAN TIMUR	2021	484.440	13.270	74,65	81,10	745,2	30.297,4
KALIMANTAN TIMUR	2022	506.159	13.407	74,66	82,37	1.266,2	39.595,6
KALIMANTAN TIMUR	2023	537.630	13.375	74,79	81,75	1.332,7	52.171,7
KALIMANTAN UTARA	2015	49.316	4.977	72,38	67,48	230,9	921,8
KALIMANTAN UTARA	2016	51.065	4.547	72,40	68,72	160,8	3.345,7
KALIMANTAN UTARA	2017	54.537	3.183	72,42	68,62	149,0	853,3
KALIMANTAN UTARA	2018	57.459	4.006	72,45	73,99	67,3	1.356,8
KALIMANTAN UTARA	2019	61.418	4.596	72,49	74,32	81,7	4.400,9
KALIMANTAN UTARA	2020	60.746	4.914	72,54	71,95	68,4	2.235,2
KALIMANTAN UTARA	2021	63.168	4.914	72,59	76,02	133,5	3.792,5
KALIMANTAN UTARA	2022	66.528	4.973	72,62	78,62	430,5	7.526,4
KALIMANTAN UTARA	2023	69.817	4.973	72,74	77,57	1.272,1	8.199,1
SULAWESI UTARA	2015	70.425	9.488	71,03	59,45	88,0	270,6
SULAWESI UTARA	2016	74.765	9.742	71,04	61,78	382,8	5.069,6

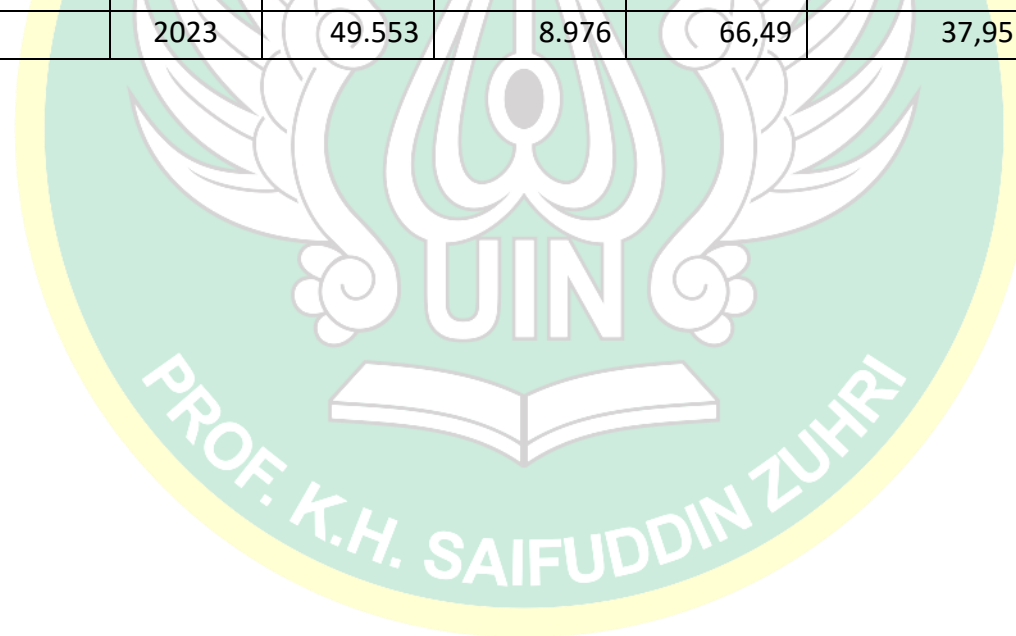
Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
SULAWESI UTARA	2017	79.484	9.840	71,06	61,95	482,9	1.488,2
SULAWESI UTARA	2018	84.250	10.072	71,28	64,64	295,9	4.320,1
SULAWESI UTARA	2019	89.009	10.006	71,63	67,90	220,5	8.259,6
SULAWESI UTARA	2020	88.126	10.058	71,75	67,13	155,7	3.005,6
SULAWESI UTARA	2021	91.791	10.091	71,81	70,32	169,1	3.480,0
SULAWESI UTARA	2022	96.768	10.211	72,10	71,12	105,1	5.042,1
SULAWESI UTARA	2023	102.070	10.309	72,45	70,22	203,7	7.698,2
SULAWESI TENGAH	2015	82.787	16.234	67,30	50,64	1.085,2	968,4
SULAWESI TENGAH	2016	91.015	16.286	67,34	51,08	1.600,3	1.081,2
SULAWESI TENGAH	2017	97.475	16.565	67,35	53,49	1.545,6	1.929,7
SULAWESI TENGAH	2018	117.556	16.908	67,81	56,66	672,4	8.488,9
SULAWESI TENGAH	2019	127.935	16.908	68,29	57,68	1.805,0	4.438,8
SULAWESI TENGAH	2020	134.153	16.908	68,75	57,89	1.779,0	5.261,3
SULAWESI TENGAH	2021	149.816	16.908	68,88	61,10	2.718,1	3.012,3
SULAWESI TENGAH	2022	172.625	16.952	68,97	62,39	7.486,0	3.758,6
SULAWESI TENGAH	2023	193.181	16.952	69,22	61,02	7.244,1	4.772,5
SULAWESI SELATAN	2015	250.803	33.215	69,85	56,21	233,3	9.215,3
SULAWESI SELATAN	2016	269.401	31.344	69,89	58,50	372,5	3.334,6
SULAWESI SELATAN	2017	288.814	30.679	69,91	60,30	712,8	1.969,4
SULAWESI SELATAN	2018	309.156	30.476	70,15	63,85	617,2	3.275,9

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
SULAWESI SELATAN	2019	330.506	30.470	70,48	65,07	302,6	5.672,6
SULAWESI SELATAN	2020	328.155	31.513	70,62	65,14	236,1	9.142,0
SULAWESI SELATAN	2021	343.395	30.397	70,71	69,13	310,0	12.075,4
SULAWESI SELATAN	2022	360.895	30.206	71,00	71,10	469,0	7.528,0
SULAWESI SELATAN	2023	377.162	30.357	71,26	69,83	336,7	11.468,3
SULAWESI TENGGARA	2015	72.993	11.424	70,48	54,84	145,0	2.015,4
SULAWESI TENGGARA	2016	77.746	12.725	70,51	56,39	376,1	1.794,2
SULAWESI TENGGARA	2017	83.002	13.064	70,52	56,85	693,0	3.148,7
SULAWESI TENGGARA	2018	88.310	13.235	70,77	60,34	672,9	1.603,4
SULAWESI TENGGARA	2019	94.054	12.291	71,16	62,68	987,7	3.827,1
SULAWESI TENGGARA	2020	93.446	12.590	71,34	63,86	1.268,6	2.865,7
SULAWESI TENGGARA	2021	97.275	12.867	71,36	68,22	1.616,5	4.334,2
SULAWESI TENGGARA	2022	102.656	12.802	71,46	70,00	877,9	7.596,0
SULAWESI TENGGARA	2023	108.153	13.066	71,53	70,94	448,3	7.734,6
GORONTALO	2015	22.069	5.885	67,17	51,34	6,9	94,3
GORONTALO	2016	23.507	5.546	67,19	52,93	12,7	2.202,5
GORONTALO	2017	25.090	5.495	67,21	55,36	41,3	888,4
GORONTALO	2018	26.719	5.539	67,52	58,50	40,8	2.666,8
GORONTALO	2019	28.430	5.513	67,98	60,36	171,3	844,4
GORONTALO	2020	28.425	5.513	68,12	61,42	67,6	683,6

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
GORONTALO	2021	29.108	5.513	68,24	64,64	78,0	1.004,3
GORONTALO	2022	30.284	5.516	68,55	67,73	102,9	1.113,5
GORONTALO	2023	31.648	5.516	68,89	67,55	33,8	3.960,1
SULAWESI BARAT	2015	25.964	6.942	64,27	42,56	2,0	1.103,8
SULAWESI BARAT	2016	27.525	6.409	64,35	46,17	20,6	84,1
SULAWESI BARAT	2017	29.282	5.758	64,38	46,76	11,4	660,2
SULAWESI BARAT	2018	31.114	5.677	64,62	50,44	24,7	3.144,2
SULAWESI BARAT	2019	32.844	5.841	64,87	52,18	10,1	1.187,2
SULAWESI BARAT	2020	32.074	5.861	65,11	54,41	6,5	252,9
SULAWESI BARAT	2021	32.898	6.175	65,29	59,51	5,9	395,3
SULAWESI BARAT	2022	33.658	6.180	65,67	61,07	28,3	1.313,3
SULAWESI BARAT	2023	35.426	5.648	66,06	61,89	24,3	2.011,1
MALUKU	2015	24.859	8.342	65,35	47,98	82,4	0,0
MALUKU	2016	26.284	9.890	65,39	49,84	102,6	11,4
MALUKU	2017	27.814	10.213	65,44	52,64	212,0	52,3
MALUKU	2018	29.457	10.185	65,63	56,13	8,0	1.013,5
MALUKU	2019	31.049	10.247	65,87	56,96	33,0	283,2
MALUKU	2020	30.766	10.669	66,03	56,16	176,7	474,8
MALUKU	2021	31.881	10.266	66,14	62,41	13,3	2.939,7
MALUKU	2022	33.575	10.373	66,48	63,85	73,4	611,0

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
MALUKU	2023	35.322	9.364	66,84	63,21	106,3	1.904,5
MALUKU UTARA	2015	20.380	7.100	67,49	45,08	203,8	48,2
MALUKU UTARA	2016	21.557	7.076	67,52	47,08	438,9	8,8
MALUKU UTARA	2017	23.211	7.432	67,55	49,53	228,1	1.150,6
MALUKU UTARA	2018	25.034	7.354	67,81	53,55	362,8	2.276,3
MALUKU UTARA	2019	26.598	7.354	68,21	53,69	1.008,5	682,7
MALUKU UTARA	2020	28.031	7.354	68,38	54,88	2.409,0	662,1
MALUKU UTARA	2021	32.739	7.354	68,50	59,08	2.819,9	2.665,3
MALUKU UTARA	2022	40.248	7.360	68,82	61,58	4.487,5	3.414,9
MALUKU UTARA	2023	48.495	7.360	69,16	60,85	4.998,2	6.901,0
PAPUA BARAT	2015	52.346	9.430	65,23	55,44	258,6	63,4
PAPUA BARAT	2016	54.711	9.760	65,24	56,93	514,5	10,6
PAPUA BARAT	2017	56.908	11.867	65,27	59,88	84,7	59,2
PAPUA BARAT	2018	60.466	12.529	65,50	65,08	286,9	50,9
PAPUA BARAT	2019	62.075	12.436	65,90	66,49	46,2	380,2
PAPUA BARAT	2020	61.604	12.522	66,05	66,61	10,6	1.925,4
PAPUA BARAT	2021	61.289	13.015	66,19	68,11	32,5	635,6
PAPUA BARAT	2022	62.519	13.028	66,49	68,01	71,8	2.139,1
PAPUA BARAT	2023	40.955	7.533	66,85	65,76	28,8	1.261,9
PAPUA	2015	130.312	18.548	65,14	32,04	897,0	1.275,2

Provinsi	Tahun	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
PAPUA	2016	142.225	18.702	65,22	34,24	1.168,4	220,5
PAPUA	2017	148.818	21.732	65,23	36,31	1.924,1	1.217,9
PAPUA	2018	159.712	21.824	65,45	40,46	1.132,3	104,6
PAPUA	2019	134.566	21.727	65,69	38,50	941,0	567,7
PAPUA	2020	137.787	21.547	65,84	40,44	567,7	2.722,2
PAPUA	2021	158.675	21.068	65,97	38,94	1.489,1	910,8
PAPUA	2022	172.907	21.562	66,25	35,33	1.260,5	1.311,8
PAPUA	2023	49.553	8.976	66,49	37,95	8,3	1.174,1



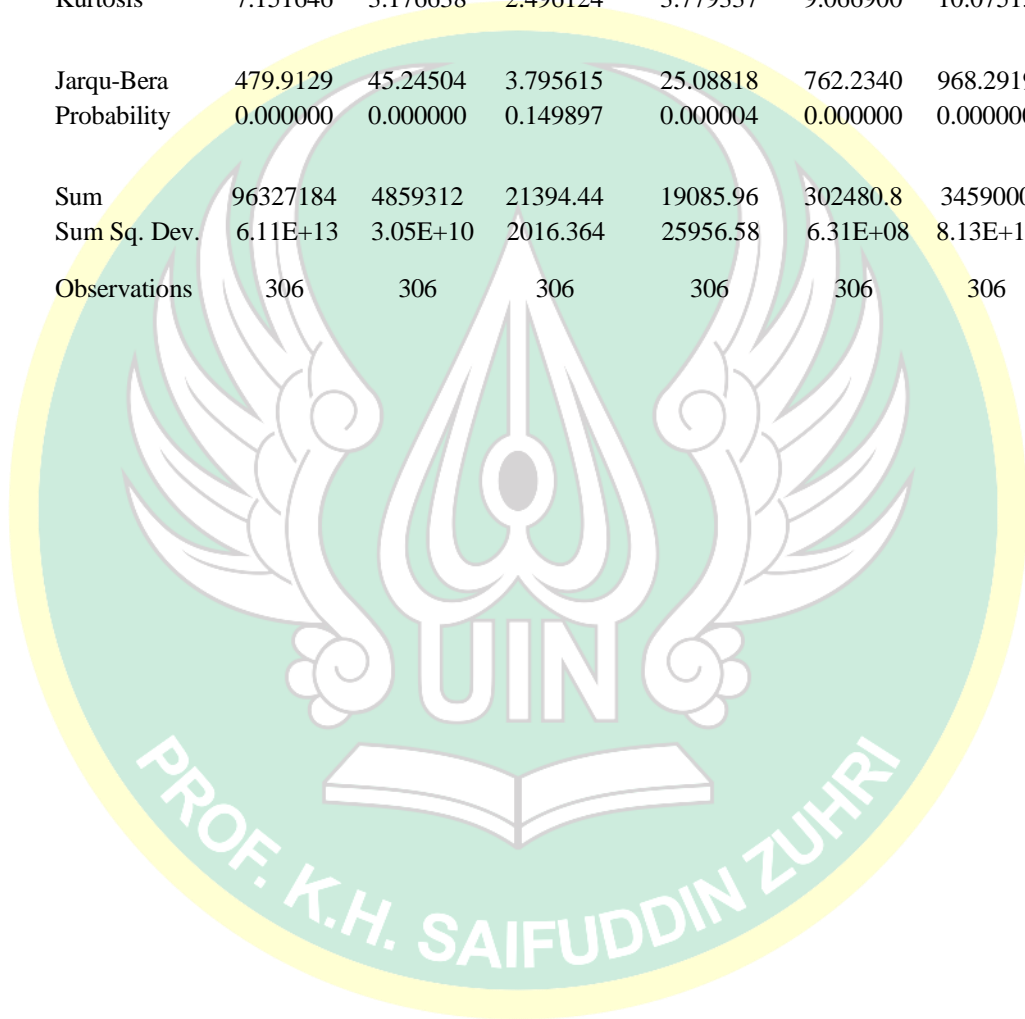
Lampiran 2. Tabel t dan F

Tabel distribusi t					Tabel distribusi F					
df (N-2)	0.25	0.10	0.05	0.025	df (N2)	df untuk pembilang (N1)				
	0.50	0.20	0.10	0.050		1	2	3	4	5
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	1	161	199	216	225	230
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81

18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46

Lampiran 3. Statistik Deskriptif

	PDRB	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
Mean	314794.7	15880.10	69.91649	62.37242	988.4993	11303.92
Median	134359.5	13136.00	69.97000	62.85000	417.1000	4969.500
Maximum	2050466	42763.00	75.21500	82.47000	8283.700	95202.10
Minimum	20380.00	3183.000	64.27000	32.04000	2.000000	0.000000
Std Dev.	447450.1	10003.01	2.571192	9.225158	1438.529	16326.44
Skewness	2.258543	0.937741	-0.104648	-0.583167	2.396653	2.543965
Kurtosis	7.151646	3.176638	2.496124	3.779337	9.066900	10.07513
Jarqu-Bera	479.9129	45.24504	3.795615	25.08818	762.2340	968.2919
Probability	0.000000	0.000000	0.149897	0.000004	0.000000	0.000000
Sum	96327184	4859312	21394.44	19085.96	302480.8	3459000
Sum Sq. Dev.	6.11E+13	3.05E+10	2016.364	25956.58	6.31E+08	8.13E+10
Observations	306	306	306	306	306	306



Lampiran 4. Hasil Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable : PDRB

Method : Panel Least Square

Date : 07/14/24 Time : 15.27

Sample : 2015 2023

Periods included : 9

Cross-sections included : 34

Total panel (balanced) observations : 306

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1256905.	353305.0	-3.557565	0.0004
INFRA-JALAN	6.967588	1.245930	5.592277	0.0000
INFRA-KES	199077.17	5922.510	3.221129	0.0014
INFRA-TELKOM	-2207.458	1685.963	-1.309316	0.1914
PMA	58.46409	9.967377	5.865544	0.0000
PMDN	18.32445	1.022316	17.92445	0.0000
R-squared	0.836580	Mean dependent var		314794.7
Adjusted R-squared	0.833856	S. D. dependent var		447450.1
S. E. of regression	182384.0	Akaike info criterion		27.08503
Sum squared resid	9.98E+12	Schwarz criterion		27.15804
Log likelihood	-4138.009	Hannan-Quinn criter		27.11423
F-statistic	307.1517	Durbin-Watson stat		0.322449
Prob (F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5. Hasil Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable : PDRB

Method : Panel Least Square

Date : 07/14/24 Time : 15.28

Sample : 2015 2023

Periods included : 9

Cross-sections included : 34

Total panel (balanced) observations : 306

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-267776.0	571925.6	-0.468201	0.6400
INFRA-JALAN	6.351514	2.135817	2.973810	0.0032
INFRA-KES	5782.185	8785.770	0.658131	0.5110
INFRA-TELKOM	242.9472	945.2044	0.257031	0.7974
PMA	7.014926	3.103237	2.260519	0.0246
PMDN	4.896575	0.294014	16.65424	0.0000
R-squared	0.994943	Mean dependent var		314794.7
Adjusted R-squared	0.994223	S. D. dependent var		447450.1
S. E. of regression	34.008.52	Akaike info criterion		23.82518
Sum squared resid	3.09E+11	Schwarz criterion		24.29975
Log likelihood	-3606.252	Hannan-Quinn criter		24.01497
F-statistic	1382.382	Durbin-Watson stat		0.785538
Prob (F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6. Hasil Random Effect Model (REM)

Dependent Variable : PDRB

Method : Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date : 07/14/24 Time : 15.29

Sample : 2015 2023

Periods included : 9

Cross-sections included : 34

Total panel (balanced) observations : 306

Swamyand Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1962511.	416494.6	-4.711972	0.0000
INFRA-JALAN	11.72023	1.439285	8.143091	0.0000
INFRA-KES	31082.06	6463.012	4.809222	0.0000
INFRA-TELKOM	-2414.286	774.9176	-3.115539	0.0020
PMA	10.52337	3.046791	3.453919	0.0006
PMDN	5.150544	0.284900	18.07843	0.0000
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			113922.0	0.9182
Idionsyncratic random			34008.52	0.0818
Weighted Statistics				
R-squared	0.589350	Mean dependent var	31170.71	
Adjusted R-squared	0.582506	S. D. dependent var	69355.23	
S. E. of regression	44813.03	Sum squared resid	6.02E+11	
F-statistic	86.10991	Durbin-Watson stat	0.486955	
Prob (F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.544444	Mean dependent var	314794.7	
Sum squared resid	2.78E+13	Durbin-Watson stat	0.010546	

Lampiran 7. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation : FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	253.369066	(33,267)	0.0000
Cross-section Chi-square	1063.515275	33	0.0000

Lampiran 8. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation : REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	225.899882	5	0.0000

Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil	Infra Jalan	Infra Kes	Infra Telkom	PMA	PMDN
Infra Jalan	1,000000	0,104607	-0,205761	0,210108	0,365024
Infra Kes	0,104607	1,000000	0,664744	0,304859	0,472159
Infra Telkom	-0,205761	0,664744	1,000000	0,171646	0,348526
PMA	0,210108	0,304859	0,171646	1,000000	0,676474
PMDN	0,365024	0,472159	0,348526	0,676474	1,000000

Lampiran 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable : RESABS

Method : Panel Least Square

Date : 07/14/24 Time : 15.36

Sample : 2015 2023

Periods included : 9

Cross-sections included : 34

Total panel (balanced) observations : 306

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-390407.2	301345.4	-1.295547	0.1963
INFRA-JALAN	-0.530499	1.125354	-0.471407	0.6377
INFRA-KES	6748.623	4629.188	1.457842	0.1461
INFRA-TELKOM	-856.8655	498.0245	-1.724545	0.0858
PMA	2.631668	1.635083	1.609501	0.1087
PMDN	-0.263691	0.154915	-1.702169	0.0899
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.566243	Mean dependent var	19059.56	
Adjusted R-squared	0.504510	S. D. dependent var	25456.30	
S. E. of regression	17918.96	Akaike info criterion	22.54367	
Sum squared resid	8.57E+10	Schwarz criterion	23.01825	
Log likelihood	-3410.182	Hannan-Quinn criter	22.73347	
F-statistic	9.172434	Durbin-Watson stat	1.729127	
Prob (F-statistic)	0.000000			

Lampiran 11. Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable : PDRB

Method : Panel Least Square

Date : 07/14/24 Time : 15.28

Sample : 2015 2023

Periods included : 9

Cross-sections included : 34

Total panel (balanced) observations : 306

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-267776.0	571925.6	-0.468201	0.6400
INFRA-JALAN	6.351514	2.135817	2.973810	0.0032
INFRA-KES	5782.185	8785.770	0.658131	0.5110
INFRA-TELKOM	242.9472	945.2044	0.257031	0.7974
PMA	7.014926	3.103237	2.260519	0.0246
PMDN	4.896575	0.294014	16.65424	0.0000
R-squared	0.994943	Mean dependent var		314794.7
Adjusted R-squared	0.994223	S. D. dependent var		447450.1
S. E. of regression	34.008.52	Akaike info criterion		23.82518
Sum squared resid	3.09E+11	Schwarz criterion		24.29975
Log likelihood	-3606.252	Hannan-Quinn criter		24.01497
F-statistic	1382.382	Durbin-Watson stat		0.785538
Prob (F-statistic)	0.000000			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dede Isfatkhurohmah
2. NIM : 2017201201
3. Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 17 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Desa Kalirejo Rt 02 Rw 05, Kecamatan Kebumen,
Kabupaten Kebumen
5. Nama Orangtua
 - a. Ayah : H. Iskandar
 - b. Ibu : Sutariyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 3 Kalirejo
2. SMP : SMP Negeri 3 Kebumen
3. SMA : MA Negeri 1 Kebumen
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Non-formal : Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto

C. Pengalaman Kerja dan Organisasi

1. Pengurus divisi ESDM IMAKERTO tahun 2022
2. Tentor Matematika & Ekonomi SMA bimbel Tuntas Study tahun 2023
3. Tentor private bimbel Ahe tahun 2023

Purwokerto, 1 Oktober 2024



Dede Isfatkhurohmah

NIM. 2017201201